

SKRIPSI

ANALISIS PENGARUH PENDAPATAN ASLI DESA (PADes), DANA DESA (DD), ALOKASI DANA DESA (ADD), DAN BAGI HASIL PAJAK DAN RETRIBUSI (BHPR) TERHADAP BELANJA DESA BIDANG PEMBANGUNAN DESA PADA DESA PULAU BARU KECAMATAN KUANTAN HILIR SEBERANG KABUPATEN KUANTAN SINGINGI PERIODE 2015 - 2018



Oleh :

**VIVIN DELMITA
NPM.150412083**

**PROGRAM STUDI AKUNTANSI
FAKULTAS ILMU SOSIAL
UNIVERSITAS ISLAM KUANTAN SINGINGI
TELUK KUANTAN
2020**

**ANALISIS PENGARUH PENDAPATAN ASLI DESA (PADes),
DANA DESA (DD), ALOKASI DANA DESA (ADD), DAN BAGI
HASIL PAJAK DAN RETRIBUSI (BHPR) TERHADAP
BELANJA DESA BIDANG PEMBANGUNAN DESA PADA
DESA PULAU BARU KECAMATAN KUANTAN HILIR
SEBERANG KABUPATEN KUANTAN SINGINGI
PERIODE 2015 – 2018**

SKRIPSI

Diajukan Untuk Memenuhi Persyaratan Memperoleh
Gelar Sarjana Akuntansi



Oleh :

**VIVIN DELMITA
NPM.150412083**

**PROGRAM STUDI AKUNTANSI
FAKULTAS ILMU SOSIAL
UNIVERSITAS ISLAM KUANTAN SINGINGI
TELUK KUANTAN
2020**

LEMBAR PERSETUJUAN
SKRIPSI

ANALISIS PENGARUH PENDAPATAN ASLI DESA (PADes), DANA
DESA (DD), ALOKASI DANA DESA (ADD), dan BAGI HASIL PAJAK
DAN RETRIBUSI (BHPR) TERHADAP BELANJA DESA BIDANG
PEMBANGUNAN DESA PADA DESA PULAU BARU KECAMATAN
KUANTAN HILIR SEBERANG KABUPATEN KUANTAN SINGINGI
PERIODE 2015-2018

Disusun dan diajukan oleh:

VIVIN DELMITA
NPM. 150412083

Telah diperiksa dan disetujui
oleh Komisi Pembimbing

PEMBIMBING I



Zul Ammar, SE., ME
NIDN. 102008841

PEMBIMBING II



M. Irwan, SE., MM
NIDN. 1012058301

Mengetahui,
Ketua Program Studi Akuntansi
Fakultas Ilmu Sosial
Universitas Islam Kuantan Singingi



Yul Emri Yulis, SE., M.Si
NIDN. 1014038901

**LEMBAR PENGESAHAN
SKRIPSI**

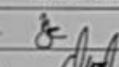
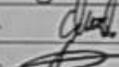
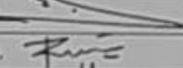
**ANALISIS PENGARUH PENDAPATAN ASLI DESA (PADes), DANA
DESA (DD), ALOKASI DANA DESA (ADD), DAN BAGI HASIL PAJAK
DAN RETRIBUSI (BHPR) TERHADAP BELANJA DESA BIDANG
PEMBANGUNAN DESA PADA DESA PULAU BARU KECAMATAN
KUANTAN HILIR SEBERANG KABUPATEN KUANTAN SINGINGI
PERIODE 2015 - 2018**

Disusun dan diajukan oleh:

**VIVIN DELMITA
NPM. 150412083**

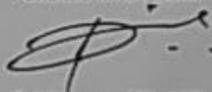
Telah dipertahankan dalam sidang Ujian Skripsi
Pada tanggal 14 Oktober 2020
Dan dinyatakan memenuhi syarat

Menyetujui,
Dewan Sidang Ujian Skripsi

No	Nama Dosen	Jabatan	Tanda Tangan
1	Yul Emri Yulis, SE., ME	Ketua	1. 
2	Dessy Kumala Dewi, SE., M.Ak	Sekretaris	2. 
3	Zul Ammar, SE., ME	Anggota 1	3. 
4	M. Irwan, SE., MM	Anggota 2	4. 
5	Rina Andriani, SE., M.Si	Anggota 3	5. 
6	Diskhamarzaweny, SE., MM	Anggota 4	6. 

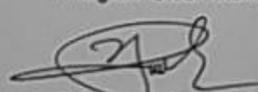
Mengetahui,

Dekan
Fakultas Ilmu Sosial



Zul Ammar, SE., ME
NIDN. 1020088401

Ketua
Program Studi Akuntansi



Yul Emri Yulis, SE., M.Si
NIDN. 1014038901

PERNYATAAN ORISINALITAS SKRIPSI

saya yang bertanda tangan dibawah ini,

Nama : Vivin Delmita
NPM : 150412083
Program Studi : Akuntansi
Konsentrasi : Akuntansi Keuangan
Fakultas : Ilmu Sosial

Dengan ini menyatakan dengan sebenar-benarnya bahwa skripsi yang berjudul:

ANALISIS PENGARUH PENDAPATAN ASLI DESA (PADes), DANA DESA (DD), ALOKASI DANA DESA (ADD), dan BAGI HASIL PAJAK DAN RETRIBUSI (BHPR) TERHADAP BELANJA DESA BIDANG PEMBANGUNAN DESA PADA DESA PULAU BARU KECAMATAN KUANTAN HILIR SEBERANG KABUPATEN KUANTAN SINGINGI PERIODE 2015-2018

Adalah karya ilmiah saya sendiri dan sepanjang pengetahuan saya di dalam naskah skripsi ini tidak terdapat karya ilmiah yang pernah diajukan oleh orang lain untuk memperoleh gelar akademik disuatu perguruan tinggi, dan tidak terdapat karya atau pendapat yang pernah ditulis atau diterbitkan oleh orang lain, kecuali yang secara tertulis dikutip dalam naskah ini dan disebutkan dalam sumber kutipan dan daftar pustaka.

Apabila dikemudian hari ternyata di dalam naskah skripsi ini dapat dibuktikan terdapat unsure-unsur plagiat, saya bersedia menerima sanksi atas perbuatan tersebut dan diproses sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Teluk Kuantan, 14 Oktober 2020
Yang Membuat Pernyataan

Vivin Delmita
NPM. 150412083

KATA PENGANTAR

Assalamualaikum Wr, Wb

Alhamdulillahirabbil'alamin. Puji syukur atas kehadiran Allah SWT yang telah melimpahkan berkah, rahmat dan karunianya, sehingga peneliti dapat menyelesaikan skripsi yang berjudul "Analisis Pengaruh Pendapatan Asli Desa (PADes), Dana Desa (DD), Alokasi Dana Desa (ADD), Dan Bagi Hasil Pajak Dan Retribusi (BHPR) Terhadap Belanja Desa Bidang Pembangunan Desa Pada Desa Pulau Baru Kecamatan Kuantan Hilir Seberang Kabupaten Kuantan Singingi periode 2015-2018".

Penulisan skripsi ini disusun guna memenuhi salah satu syarat dalam menyelesaikan pendidikan program Sarjana (S1) Program Studi Akuntansi pada Fakultas Ilmu Sosial Universitas Islam Kuantan Singingi.

Pada kesempatan ini dengan kerendahan hati, peneliti menyadari bahwa dalam penyusunan skripsi ini mendapat banyak bantuan, bimbingan, saran-saran dari berbagai pihak. Oleh karena itu dalam kesempatan ini peneliti ingin menyampaikan ucapan terimakasih kepada:

1. Ibu **Ir. Hj. Elfi Indrawanis, MM** selaku Rektor Universitas Islam Kuantan Singingi.
2. Bapak **Yul Emri Yulis, SE., M.Si** selaku Ketua Program Studi Akuntansi Fakultas Ilmu Social Universitas Islam Kuantan Singingi.
3. Bapak **Zul Ammar, SE., ME** selaku pembimbing I sekaligus Dekan Fakultas Ilmu Sosial peneliti yang telah meluangkan waktu dan kesempatan

dalam mengarahkan dan membimbing peneliti dalam menyelesaikan skripsi ini.

4. Bapak **M. Irwan, SE., MM** selaku pembimbing II sekaligus Penasehat Akademik peneliti yang telah member banyak masukan dan meluangkan waktu dalam membimbing peneliti untuk kesempurnaan skripsi ini.
5. Seluruh Bapak dan Ibu Dosen Akuntansi Fakultas Ilmu Sosial Universitas Islam Kuantan Singingi yang telah mengajarkan berbagai ilmu pengetahuan selama proses perkuliahan.
6. Bapak **Marswandi** selaku Kepala Desa Pulau Baru Kecamatan Kuantan Hilir Seberang yang telah memberi izin penelitian.
7. Kedua orang tua tercinta Ayahanda **Amiruddin** dan Ibunda **Darmilis** yang selalu memberikan do'a, motivasi, semangat dan memberikan banyak dukungan moril maupun materil sehingga peneliti selalu semangat dan berusaha dengan baik dalam perkuliahan dan menimba ilmu di kampus.
8. Suami tersayang Kanda **Amrim Syahrudin, S.H** yang telah banyak memberikan dukungan moril dan materil serta motivasi terhadap peneliti.
9. Serta adik tersayang **Ridho Okdamir Putra** yang telah banyak memberikan dukungan moril serta motivasi kepada peneliti.
10. Seluruh teman-teman Program Studi Akuntansi terkhusus Akuntansi A angkatan 2015 & 2016 atas kebersamaan dan kerjasamanya selama ini.
11. Semua pihak yang telah turut membantu peneliti, baik langsung maupun tidak langsung. Hanya terimakasih yang mampu peneliti sampaikan.

Skripsi ini masih jauh dari kata kesempurnaan walaupun telah menerima bantuan dari berbagai pihak. Apabila terdapat kesalahan-kesalahan dalam skripsi ini sepenuhnya menjadi tanggungjawab peneliti,

bukan para pemberi bantuan. Saran dan kritik yang sifatnya membangun sangat peneliti harapkan.

Akhir kata, dengan kerendahan hati dan penuh ketulusan semoga skripsi ini bermanfaat dan dapat member sumbangan berarti untuk berbagai pihak yang membutuhkan dan berguna bagi kita semua, Aamiin.

Teluk Kuantan, 14 Oktober 2020

VIVIN DELMITA
NPM. 150412083

ABSTRAK

ANALISIS PENGARUH PENDAPATAN ASLI DESA, DANA DESA, ALOKASI DANA DESA , dan BAGI HASIL PAJAK DAN RETRIBUSI (BHPR) TERHADAP BELANJA DESA BIDANG PEMBANGUNAN DESA PADA DESA PULAU BARU KECAMATAN KUANTAN HILIR SEBERANG KABUPATEN KUANTAN SINGINGI PERIODE 2015-2018

Vivin Delmita
Zul ammar
M. Irwan

Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis ,dan menguji : (1) pengaruh Pendapatan Asli Desa secara parsial terhadap belanja Desa Bidang Pembangunan Desa Pada Desa Pulau Baru Kecamatan Kuantan Hilir Seberang periode 2015-2018, (2) Pengaruh Dana Desa secara parsial terhadap Belanja Desa Bidang Pembangunan Desa Pada Desa Pulau Baru Kecamatan Kuantan Hilir Seberang periode 2015-2018, (3) Alokasi Dana Desa secara parsial terhadap Belanja Desa Bidang Pembangunan Desa Pada Desa Pulau Baru Kecamatan Kuantan Hilir Seberang periode 2015-2018, (4) pengaruh Bagi Hasil Pajak Dan Retribusi secara parsial terhadap Belanja Desa Bidang Pembangunan Desa Pada Desa Pulau Baru Kecamatan Kuantan Hilir Seberang periode 2015-2018, (5) pengaruh Pendapatan Asli Desa, Dana Desa , Alokasi Dana Desa, Dan Bagi Hasil Pajak Dan Retribusi secara simultan terhadap Belanja Desa Bidang Pembangunan Desa Pada Desa Pulau Baru Kecamatan Kuantan Hilir Seberang periode 2015-2018 secara bersama-sama. (6) Seberapa besar pengaruh pendapatan asli desa (PADes), dana desa (DD), alokasi dana desa (ADD), dan bagi hasil pajak dan retribusi (BHPR) secara simultan terhadap belanja desa bidang pembangunan desa Pada Desa Pulau Baru Kecamatan Kuantan Hilir Seberang periode 2015-2018. Metode penelitian yang digunakan adalah penelitian kuantitatif. Data penelitian ini adalah data sekunder. Teknik pengumpulan data yang digunakan yaitu dokumentasi dan kepustakaan.

Hasil penelitian menunjukkan bahwa : (1) Pendapatan Asli Desa secara parsial berpengaruh signifikan terhadap Belanja Desa Bidang Pembangunan Desa, (2) Dana Desa secara parsial berpengaruh signifikan terhadap Belanja Desa Bidang Pembangunan Desa, (3) Alokasi Dana Desa secara parsial berpengaruh signifikan terhadap Belanja Desa Bidang Pembangunan Desa, (4) Bagi Hasil Pajak dan Retribusi secara parsial berpengaruh signifikan terhadap Belanja Desa Bidang Pembangunan Desa, (5) Pendapatan Asli Desa, Dana Desa, Alokasi Dana Desa, dan Bagi Hasil Pajak Dan Retribusi secara simultan berpengaruh signifikan terhadap Belanja Desa Bidang Pembangunan Desa secara simultan. (6) seberapa besar pengaruh pendapatan asli desa (PADes), dana desa (DD), alokasi dana desa (ADD), dan bagi hasil pajak dan retribusi (BHPR) secara simultan terhadap belanja desa bidang pembangunan desa Pada Desa Pulau Baru Kecamatan Kuantan Hilir Seberang periode 2015-2018.

Kata Kunci: Pendapatan Asli Desa, Dana Desa, Alokasi Dana Desa, Bagi Hasil Pajak Dan Retribusi, dan Belanja Desa

ABSTRACT

ANALYSIS OF THE EFFECT OF ORIGINAL VILLAGE INCOME, VILLAGE FUND, VILLAGE FUND ALLOCATION, and SHARED TAX AND RETRIBUTION RESULTSON VILLAGE SHOPPINGIN THE VILLAGE DEVELOPMENT AREAS IN THE PULAU BARU VILLAGE KUANTAN HILIR SEBERANG SUBDISTRICT KUANTAN SINGINGI DISTRICTS PERIOD 2015-2018

VivinDelmita
ZulAmmar
M. irwan

This study aims to analysis and test, (1) the effect of original village income partially on village expenditure in the village development sector in pulau baru village kuantan hilir seberang subdistrict for the period 2015-2018, (2) the effect of village funds partially on village expenditures in the village development sector in pulau baru village kuantan hilir seberang subdistrict for the period 2015-2018, (3) the effect of village fund allocation partially for village expenditure in the village development sector in pulau baru village kuantan hilir seberang subdistrict for the period 2015-2018, (4) the effect of the influence of tax and retribution revenue sharing partially on village expenditure development sector in pulau baru village kuantan hilir seberang subdistrict for the period 2015-2018, (5) the effect of original village income, village funds, village fund allocation, and tax and retribution sharing simultaneously on village expenditures development sector in pulau baru village kuantan hilir seberang subdistrict for the period 2015-2018 together. (6) How much influence of original village income, village funds, village fund allocation, and tax and retribution sharing simultaneously on village expenditures development sector in pulau baru village kuantan hilir seberang subdistrict for the period 2015-2018. The research method used is quantitative research. The data of this study is secondary data. The data analysis technique used is by documentation and literature.

The result show that: (1) original village income partially has a significant effect on village expenditure development sector, (2) village fund partially has a significant effect on village expenditure development sector, (3) village fund allocation partially has a significant effect on village expenditure development sector, (4) the influence of tax and retribution revenue sharing partially has a significant effect on village expenditure development sector, (5) original village income, village fund, village fund allocation, and influence of tax and retribution revenue sharing simultaneously have a significant effect on village expenditure development sector. (6) the magnitude of the influence of original village income, village fund, village fund allocation, and influence of tax and retribution revenue sharing simultaneously on village expenditures development sector is 94,8%.

Keyword: original village income, village fund, village fund allocation, influence of tax and retribution revenue sharing, village expenditure

DAFTAR ISI

	Halaman
HALAMAN SAMPUL	
HALAMAN JUDUL	
LEMBARAN PERSETUJUAN	
LEMBARAN PENGESAHAN	
LEMBARAN PERNYATAAN ORISINILISASI SKRIPSI	
KATA PENGANTAR.....	i
ABSTRAK	iv
ABSTRACT	v
DAFTAR ISI	vi
DAFTAR TABEL.....	x
DAFTAR GAMBAR.....	xi
DAFTAR LAMPIRAN	xii
BAB I PENDAHULUAN	
1.1 Latar Belakang.....	1
1.2 Rumusan Masalah	9
1.3 Tujuan Penelitian	10
1.4 Manfaat Penelitian	10
1.4.1 Manfaat Teoritis	10
1.4.2 Manfaat Praktis	11
BAB II TINJAUAN PUSTAKA	
2.1 Landasan Teori.....	12
2.1.1 Pengertian Desa	12
2.1.2 Pemerintah Desa	14
2.1.3 Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa.....	19
2.1.3.1 Pendapatan Desa.....	19
2.1.3.2 Belanja Desa.....	21
2.1.3.3 Pembiayaan Desa	23
2.1.4 Pendapatan Asli Desa (PADes)	24
2.1.5 Dana Desa (DD).....	27
2.1.6 Alokasi Dana Desa (ADD).....	28

2.1.7	Bagi Hasil Pajak dan Retribusi	30
2.1.8	Belanja Desa Bidang Pembangunan Desa	31
2.1.9	Pengelolaan Keuangan Desa	38
2.1.9.1	Tahap Pengelolaan Keuangan Desa.....	38
2.1.9.2	Tahap Penganggaran Keuangan Desa	39
2.1.9.3	Tahap Pelaksanaan Keuangan Desa	41
2.1.9.4	Tahap Penatausahaan Keuangan Desa	43
2.1.9.5	Pelaporan dan Pertanggungjawaban Keuangan Desa....	45
2.1.9.6	Pengawasan Keuangan Desa	46
2.2	Penelitian Terdahulu	47
2.3	Kerangka Pemikiran	51
2.4	Hipotesis	52
2.4.1	Pengaruh Pendapatan Asli Desa (PADes) Terhadap Belanja Desa Bidang Pembangunan Desa	53
2.4.2	Pengaruh Dana Desa (DD) Terhadap Belanja Desa Bidang Pembangunan Desa	53
2.4.3	Pengaruh Alokasi Dana Desa (DD) Terhadap Belanja Desa Bidang Pembangunan Desa	54
2.4.4	Pengaruh Bagi Hasil Pajak dan Retribusi Terhadap Belanja Desa Bidang Pembangunan Desa	55
2.4.5	Pengaruh Pades, DD, ADD Dan BHPR Terhadap Belanja Desa Bidang Pembangunan Desa	55
BAB III METODOLOGI PENELITIAN		
3.1	Rancangan Penelitian	57
3.2	Tempat dan Waktu Penelitian	57
3.2.1	Tempat Penelitian	57
3.2.2	Waktu Penelitian	58
3.3	Populasi dan Sampel	58
3.3.1	Populasi	58
3.3.2	Sampel	59
3.4	Jenis dan Sumber Data	59
3.4.1	Jenis Data	59
3.4.2	Sumber Data	59
3.5	Teknik Pengumpulan Data	60

3.6	Defenisi Operasional Variabel.....	61
3.6.1	Variabel Penelitian	61
3.6.2	Defenisi Operasional.....	63
3.7	Analisis Data	64
3.7.1	Statistik Deskriptif.....	65
3.8	Uji Asumsi Klasik.....	65
3.8.1	Uji Normalitas	65
3.8.2	Uji Multikolinearitas	65
3.8.3	Uji Heteroskedastisitas.....	66
3.8.4	Uji Autokorelasi	66
3.9	Pengujian Hipotesis	67
3.9.1	Metode Regresi Linier Berganda.....	67
3.9.2	Uji Signifikan Simultan (Uji F)	68
3.9.3	Uji Signifikansi parameter individual (Uji t)	68
3.9.4	Uji Koefisien Determinasi (<i>R square</i>)	69
BAB IV HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN		
4.1	Gambaran Umum Objek Penelitian.....	71
4.1.1	Sejarah Singkat Desa Pulau Baru.....	71
4.1.2	Lembaga Pendidikan	71
4.1.3	Visi dan Misi Desa Pulau Baru	72
4.1.4	Struktur Organisasi Pemerintahan Desa Pulau Baru	73
4.1.5	Tugas dan Fungsi Pemerintah Desa.....	74
4.2	Hasil Penelitian	78
4.2.1	Deskriptif Variabel Penelitian	78
4.3	Hasil Uji Asumsi Klasik.....	82
4.3.1	Hasil Uji Normalitas	82
4.3.2	Hasil Uji Multikolonearitas	84
4.3.3	Hasil Uji Heteroskedastisitas	84
4.3.4	Hasil Uji Autokorelasi	85
4.4	Hasil Analisis Regresi Linier Berganda	86
4.5	Uji Hipotesis	88
4.5.1	Hasil Uji Simultan (Uji F).....	88
4.5.2	Hasil Uji Signifikansi Parameter Individual(Uji t)	89
4.5.3	Hasil Uji Koefisien Determinasi (<i>R square</i>).....	91

4.6 Pembahasan	91
4.6.1 Pengaruh Pendapatan Asli Desa terhadap Belanja Desa Bidang Pembangunan Desa Secara Parsial	92
4.6.2 Pengaruh Dana Desa terhadap Belanja Desa Bidang Pembangunan Desa	93
4.6.3 Pengaruh Alokasi Dana Desa terhadap Belanja Desa Bidang Pembangunan Desa	94
4.6.4 Pengaruh Bagi Hasil Pajak dan Retribusi terhadap Belanja Desa Bidang Pembangunan Desa	95
4.6.5 Pengaruh Pendapatan Asli Desa, Dana Desa, Alokasi Dana Desa, dan Bagi Hasil Pajak dan Retribusi terhadap Belanja Desa Bidang Pembangunan Desa	96
BAB V PENUTUP	
5.1 kesimpulan	98
5.2 saran	99
DAFTAR PUSTAKA	101

DAFTAR TABEL

Tabel	Halaman
1.1 Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa	6
2.1 Penelitian Terdahulu	47
3.1 Waktu Penelitian	58
3.2 Defenisi Operasional Variabel	63
3.3 Interpretasi Nilai R.....	70
4.1 Daftar Kepala Desa Pulau Baru	71
4.2 Kelompok Penduduk Berdasarkan Mata Pencaharian	72
4.3 Keadaan Sosial.....	72
4.4 Variabel yang Menunjukkan Variable Independen (X) dan Dependen (Y) Terikat	80
4.5 Statistik Deskriptif Variabel Independen (X) dan Dependen (Y)SebelumTranspormasi	80
4.6 Statistik Deskriptif Variabel Independen (X) dan Dependen (Y)Setelah Transpormasi.....	81
4.7 Hasil Uji Multikolonearitas	84
4.8 Hasil Uji Autokorelasi	86
4.9 Hasil Uji Persamaan Regresi Linier Berganda.....	86
4.10 Hasil Uji F	88
4.11 Hasil Uji t	89
4.12 Hasil UjiKoefisien Determinasi (R^2)	91
4.13 Hasil Uji Hipotesis 1	92
4.14 Hasil Uji Hipotesis 2	93
4.15 Hasil Uji Hipotesis 3	94
4.16 Hasil Uji Hipotesis 4	95
4.17 Hasil Uji Hipotesis 5	96

DAFTAR LAMPIRAN

Lampiran 1: Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa tahun 2015-2018

Lampiran 2: Tabulasi Data Sebelum Dan Sesudah Transpormasi

Lampiran 3: Tabel Pengujian Asumsi Klasik, Uji Multikolinearitas, Uji Autokorelasi, Uji Heterokedastisitas

Lampiran 4: Tabel Uji Regresi Linier Berganda

Lampiran 5: Tabel Uji Signifikansi Parameter Individual (Uji t), Uji Simultan Uji (F), Uji Koefisien Determinasi (R^2)

Lampiran 6: Tabel t

Lampiran 7: Tabel F

Lampiran 8: Surat Keterangan Telah Melakukan Riset

Lampiran 9: Kartu Bimbingan

Lampiran 10: Biodata

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Menurut Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Desa, yang dimaksud dengan desa adalah kesatuan masyarakat hukum yang memiliki batas wilayah yang berwenang untuk mengatur dan mengurus urusan pemerintahan, kepentingan masyarakat setempat berdasarkan prakarsa masyarakat, hak asal usul, dan/atau hak tradisional yang diakui dan dihormati dalam sistem pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia.

Dalam hal ini desa diberikan wewenang yang luas untuk mengatur rumah tangganya sendiri sesuai dengan potensi desa yang dimiliki dalam rangka upaya peningkatan kualitas hidup dan kehidupan untuk sebesar-besarnya kesejahteraan masyarakat desa. Tentu saja wewenang yang luas tersebut tetap diatur sesuai dengan undang-undang.

Salah satu aspek yang ikut berperan dalam pengembangan desa adalah keuangan desa dan aset desa. Keuangan desa berkaitan dengan hak dan kewajiban desa yang dapat dinilai dengan uang, sedangkan aset desa adalah barang milik desa yang berasal dari kekayaan asli desa, dibeli atau diperoleh atas beban Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa atau perolehan hak lainnya yang sah.

Dalam hal keuangan dan aset desa, ada dua hal yang perlu mendapatkan perhatian serius dari desa yaitu pendapatan desa dan belanja desa. Pendapatan desa berasal dari berbagai sumber pendapatan yang terdapat pada desa tersebut dan pendapatan desa ini digunakan oleh desa untuk

membayai berbagai jenis belanja desa dimana belanja desa diprioritaskan untuk memenuhi kebutuhan pembangunan yang disepakati dalam musyawarah desa.

Pendapatan desa adalah semua penerimaan uang melalui rekening desa yang merupakan hak desa dalam 1 (satu) tahun anggaran yang tidak perlu dibayar kembali oleh desa (Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 113 Tahun 2014 Tentang Pengelolaan Keuangan Desa).

Belanja desa adalah semua pengeluaran dari rekening desa yang merupakan kewajiban desa dalam 1 (satu) tahun anggaran yang tidak akan diperoleh pembayarannya kembali oleh desa (Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 113 Tahun 2014 Tentang Pengelolaan Keuangan Desa).

Pembangunan desa adalah upaya peningkatan kualitas hidup dan kehidupan untuk sebesar-besarnya kesejahteraan masyarakat desa (undang-undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang desa)

Tentu saja tiap desa memiliki sumber pendapatan desa yang berbeda-beda sesuai dengan besarnya potensi desa yang bersangkutan. Begitu pula dengan belanja desa tentunya harus disesuaikan dengan besarnya pendapatan desa yang diperoleh. Makin besar pendapatan desa maka akan makin besar pula belanja desa yang bisa digunakan untuk pembangunan desa. Dalam tindakan hukum yang dimiliki oleh desa, salah satunya memiliki harta benda dan kekayaan sendiri. Kekayaan desa atau yang biasa disebut asset desa merupakan harta yang dimiliki oleh desa dan hal itu yang membedakan antara desa dengan kelurahan.

Pendapatan desa terdiri dari Pendapatan Asli Desa (PADes), dana transfer, dan pendapatan lain-lain. Peningkatan dari PADes akan mutlak dilakukan oleh pemerintah desa untuk membiayai kebutuhan sendiri, agar

nantinya pemerintah desa dapat berlaku mandiri dan tidak sepenuhnya bergantung pada pemerintah pusat.

Dari penjelasan tersebut dapat diketahui bahwa belanja desa harus ada prioritas utama sesuai dengan besarnya pendapatan desa yang tersedia. Desa harus bisa membuat Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa dengan baik dan benar sehingga dapat mencapai tujuan pembangunan desa dan tidak terjadi pemborosan dalam usaha untuk mengembangkan desa.

Agar pembangunan desa bisa berjalan dengan baik dan menghasilkan, maka pembangunan desa perlu terencana, terkoordinasi, berbatas waktu, serta sesuai dengan kondisi khas masyarakat dan wilayah desa yang bersangkutan. Selain itu dalam pelaksanaan pembangunan desa diperlukan adanya peran aktif masyarakat, perangkat desa, lembaga-lembaga desa, lembaga ditingkat kecamatan dan kabupaten. Undang-undang No. 6 Tahun 2014, menjelaskan bahwa desa nantinya akan mendapatkan Dana Desa (DD).

Dana Desa (DD) diperoleh sebesar 10% dari Anggaran Pendapatan Belanja Negara (APBN), dimana kucuran DD itu tidak melewati perantara melainkan langsung ke desa. Walaupun pada prakteknya, DD tersebut disalurkan melalui kabupaten/kota sebagai bentuk pengawasan. Tetapi jumlah nominal DD berbeda-beda untuk tiap-tiap desa. Alokasi APBN yang sebesar 10% nanti akan menambah penerimaan desa. Desa juga mendapatkan kucuran Alokasi Dana Desa (ADD) yang merupakan dukungan dana oleh pemerintah pusat dan daerah pada pemerintah desa dalam upaya peningkatan pelayanan dasar kepada 6 masyarakat, dan pemberdayaan masyarakat desa.

Alokasi Dana Desa (ADD) merupakan substansi baru didalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa (APBDes) untuk mendukung dana rangsangan pembangunan desa dalam pemberdayaan masyarakat dan publik. Besar ADD tersebut berjumlah 30% dialokasikan untuk aparatur pemerintah desa sedangkan

70% digunakan untuk program pemberdayaan masyarakat dan publik. Hal ini sangat membuktikan arti penting desa dan potensi desa secara luas dalam menunjang kesuksesan pemerintah nasional (Purbasari, 2018). Namun dalam pelaksanaannya, sering terjadi permasalahan diberbagai daerah/desa adalah kontribusi alokasi dana desa dalam membiayai belanja desa lebih besar dari pada kontribusi pendapatan asli desa terhadap belanja desa. Hal ini dikarenakan pendapatan asli desa yang masih sedikit dibandingkan dengan alokasi dana desa.

Dalam Undang-Undang No. 28 Tahun 2009 tentang pajak daerah dan retribusi daerah memaparkan bahwa Bagi Hasil Pajak dan Retribusi (BHPR) dialokasikan sebesar 60% secara merata dan 40% secara proporsional dari realisasi pajak dan retribusi masing-masing daerah. Pemerintah juga mengalokasikan BHPR kepada desa paling sedikit 10% dari realisasi penerimaan hasil pajak dan retribusi daerah/kabupaten.

Kabupaten Kuantan Singingi sebagai salah satu kabupaten di Provinsi Riau memiliki banyak desa dan salah satunya adalah Desa Pulau Baru di Kecamatan Kuantan Hilir Seberang. Desa Pulau Baru memiliki potensi yang cukup besar dalam rangka pengembangan kemajuan desanya.

Untuk menjalankan roda pemerintahannya, pemerintah desa harus menganggarkan terlebih dahulu segala kebutuhannya dalam APBDes dan harus disesuaikan dengan pendapatan desa yang diterima. Setiap desa memiliki kemampuan keuangan yang tidak sama dalam mendanai kegiatan-kegiatannya. Oleh karena itu pemerintah daerah dituntut untuk mengambil kebijakan yang tepat dalam membelanjakan kebutuhannya secara efektif dan efisien demi kelangsungan hidupnya serta untuk kesejahteraan masyarakatnya di desa, mengingat sumber pendapatan desa yang diterima juga memiliki keterbatasan.

Beberapa pendapatan desa yang terdapat pada Desa Pulau Baru meliputi: Pendapatan asli desa (PADes), dana desa (DD), bagi hasil pajak dan retribusi (BHPR), alokasi dana desa (ADD), bantuan keuangan provinsi.

Sedangkan belanja desa pada Desa Pulau Baru cukup banyak, antara lain: belanja bidang penyelenggaraan pemerintah desa, belanja bidang pembangunan desa, belanja bidang pembinaan masyarakat. Selain pengelolaan keuangan desa, salah satu dari hak otonomi desa adalah mengelola kekayaan desa.

Alasan peneliti memilih melakukan penelitian di Desa Pulau Baru Kecamatan Kuantan Hilir Seberang adalah karena di dalam Realisasi Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Pulau Baru Kecamatan Kuantan Hilir Seberang Kabupaten Kuantan Singingi terlihat bahwa pemerintah Desa Pulau Baru tidak melaksanakan pengelolaan keuangan dengan baik karena terlihat adanya ketidakimbangan pendapatan yang diperoleh dengan belanja yang dikeluarkan oleh pemerintah desa pada Desa Pulau Baru Kecamatan Kuantan Hilir Seberang. Seperti pada data anggaran pendapatan dan belanja Desa Pulau Baru Kecamatan Kuantan Hilir Seberang pada tahun 2016 dimana pendapatan yang diterima jumlahnya lebih kecil dari belanja yang dikeluarkan.

Ini menunjukkan bahwa pemerintah desa tidak melaksanakan pengelolaan keuangan desa seperti yang tertera pada Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 113 Tahun 2014 tentang pengelolaan keuangan desa bab 5 yang menyatakan bahwa adanya perencanaan, pelaksanaan, penatausahaan, pelaporan, dan pertanggungjawaban.

Pada penelitian terdahulu oleh Ummu Habibah (2017) yang berjudul Analisis Pengaruh Pendapatan Asli Desa (Pades), Dana Desa (DD), Alokasi Dana Desa (ADD), dan Bagi Hasil Pajak Dan Retribusi Terhadap Belanja Desa Bidang Pendidikan. Yang menyatakan bahwa Hasil pengujian secara simultan

menunjukkan bahwa variabel PADes, DD, ADD, dan BHPR berpengaruh secara signifikan terhadap belanja desa bidang pendidikan. Dengan uji F sebesar 0,042 lebih kecil dari 0,05 yang berarti variabel independen tersebut berpengaruh signifikan terhadap variabel belanja desa bidang pendidikan. Berdasarkan pengujian secara parsial variabel PADes, ADD, dan BHPR tidak berpengaruh secara signifikan terhadap belanja desa bidang pendidikan. Sementara variabel DD berpengaruh secara signifikan terhadap belanja desa bidang pendidikan. Yang berarti dimana belanja desa bidang pendidikan diperoleh dari alokasi yang berasal dari DD.

Berikut ini adalah data Pendapatan desa dan Belanja Desa Bidang Pembangunan Desa Pulau Baru tahun 2015 sampai tahun 2018:

Tabel 1.1
Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa

NO	TAHUN	PENDAPATAN DESA				BELANJA DESA
		PAD	DD	ADD	BHPR	PEMBANGUNAN DESA
1	2015	-	260.605.000	172.450.000	-	400.000.000
2	2016	1.000.000	590.393.000	117.673.000	26.283.000	990.393.000
3	2017	146.169	752.060.000	411.822.000	22.030.000	761.427.000
4	2018	-	681.684.000	410.456.000	40.532.000	656.684.000

Sumber: Data Laporan Realisasi Anggaran Desa Pulau Baru, 2020

Dari tabel 1.1 dapat dilihat bahwa pendapatan yang diperoleh Desa Pulau Baru adalah pendapatan asli desa (PADes), dana desa (DD), alokasi dana desa (ADD), dan bagi hasil pajak dan retribusi (BHPR). Dimana pada tahun 2015 pendapatan asli desa (PADes) dan bagi hasil pajak dan retribusi tidak memperoleh penerimaan, lain halnya dengan dana desa (DD) dan alokasi dana desa (ADD). DD memperoleh penerimaan sebesar Rp260.605.000, dan ADD memperoleh penerimaan sebesar Rp172.450.000. pada tahun 2016 pendapatan asli desa (PADes) memperoleh penerimaan sebesar Rp1.000.000 dari jasa giro/pendapatan bunga, dana desa (DD) memperoleh penerimaan sebesar

Rp590.393.000, alokasi dana desa (ADD) memperoleh penerimaan sebesar Rp117.673.000, dan bagi hasil pajak dan retribusi (BHPR) memperoleh penerimaan sebesar Rp26.283.000. Pada tahun 2017 pendapatan asli desa (PADes) memperoleh penerimaan sebesar Rp1.000.000 dari jasa giro/pendapatan bunga, dana desa (DD) memperoleh penerimaan sebesar Rp752.060.000, alokasi dana desa (ADD) memperoleh penerimaan sebesar Rp411.822.000, dan bagi hasil pajak dan retribusi (BHPR) memperoleh penerimaan sebesar Rp22.030.000. Pada tahun 2018 pendapatan asli desa (PADes) kembali tidak memperoleh penerimaan, dana desa (DD) memperoleh penerimaan sebesar Rp681.684.000, alokasi dana desa (ADD) memperoleh penerimaan sebesar Rp410.456.000, dan bagi hasil pajak dan retribusi (BHPR) memperoleh penerimaan sebesar Rp40.532.000. Berbeda dengan belanja desa, belanja desa yang maksud adalah belanja desa dalam bidang pembangunan desa, dimana pada tahun 2015, 2017, 2018 pengeluaran yang dikeluarkan untuk pembangunan desa masih bisa ditanggulangi oleh semua pendapatan desa, akan tetapi pada tahun 2016 anggaran pembangunan desa melebihi dari anggaran pendapatan desa yang mengakibatkan keuangan desa pulau baru mengalami deficit sebesar Rp255.044.000.

Fenomena masalah dalam penelitian ini yaitu dapat dilihat bahwa jika pendapatan desa naik maka akan diikuti dengan naiknya belanja desa. Oleh karena itu, perlu ada pembuktian untuk mengetahui seberapa besar pengaruh dan hubungan antara pendapatan desa dengan belanja desa, apakah pengaruhnya besar atau kecil dan hubungannya kuat atau lemah.

Penelitian ini mengacu pada penelitian Ummu Habibah (2017). Persamaan penelitian ini dan penelitian sebelumnya yaitu sama-sama meneliti

tentang Pengaruh Alokasi Dana Desa (ADD), Dana Desa (DD), Pendapatan Asli Desa (PADes), dan Bagi Hasil Pajak dan Retribusi (BHPR). Sedangkan perbedaan penelitian ini dengan penelitian sebelumnya yaitu pada variabel Y dan lokasi penelitian. Pada penelitian sebelumnya menggunakan variabel belanja desa bidang pendidikan, sedangkan pada penelitian ini saya menggunakan variabel belanja desa bidang pembangunan desa sebagai variabel Y. Lokasi penelitian Ummu Habibah di desa pada kabupaten sukoharjo, sedangkan lokasi penelitian saya di Desa Pulau Baru Kecamatan Kuantan Hilir Seberang.

Peneliti mengambil objek penelitian pada Desa Pulau Baru Kecamatan Kuantan Hilir Seberang, karena peneliti ingin mengetahui lebih dalam perlakuan akuntansi tentang pengaruh pendapatan asli desa (PADes), dana desa (DD), alokasi dana desa (ADD), dan bagi hasil pajak dan retribusi (BHPR) terhadap belanja desa bidang pembangunan desa pada Desa Pulau Baru.

Berdasarkan uraian latar belakang masalah di atas, maka peneliti tertarik untuk melakukan penelitian dengan judul: **“ANALISIS PENGARUH PENDAPATAN ASLI DESA (PADes), DANA DESA (DD), ALOKASI DANA DESA (ADD), DAN BAGI HASIL PAJAK DAN RETRIBUSI (BHPR) TERHADAP BELANJA DESA BIDANG PEMBANGUNAN DESA PADA DESA PULAU BARU KECAMATAN KUANTAN HILIR SEBERANG KABUPATEN KUANTAN SINGINGI PERIODE 2015-2018”**.

1.2 Rumusan Masalah

Berdasarkan uraian dalam latar belakang masalah di atas, maka perumusan masalah dalam skripsi ini adalah:

1. Apakah pendapatan asli desa (PADes) secara parsial berpengaruh signifikan terhadap belanja desa bidang pembangunan desa Pada Desa Pulau Baru Kecamatan Kuantan Hilir Seberang periode 2015-2018?
2. Apakah dana desa (DD) secara parsial berpengaruh signifikan terhadap belanja desa bidang pembangunan desa Pada Desa Pulau Baru Kecamatan Kuantan Hilir Seberang periode 2015-2018?
3. Apakah alokasi dana desa (ADD) secara parsial berpengaruh signifikan terhadap belanja desa bidang pembangunan desa Pada Desa Pulau Baru Kecamatan Kuantan Hilir Seberang periode 2015-2018?
4. Apakah bagi hasil pajak dan retribusi (BHPR) secara parsial berpengaruh signifikan terhadap belanja desa bidang pembangunan desa Pada Desa Pulau Baru Kecamatan Kuantan Hilir Seberang periode 2015-2018?
5. Apakah pendapatan asli desa (PADes), dana desa (DD), alokasi dana desa (ADD), dan bagi hasil pajak dan retribusi (BHPR) secara simultan berpengaruh signifikan terhadap belanja desa bidang pembangunan desa Pada Desa Pulau Baru Kecamatan Kuantan Hilir Seberang periode 2015-2018?
6. Seberapa besar pengaruh pendapatan asli desa (PADes), dana desa (DD), alokasi dana desa (ADD), dan bagi hasil pajak dan retribusi (BHPR) secara simultan terhadap belanja desa bidang pembangunan desa Pada Desa Pulau Baru Kecamatan Kuantan Hilir Seberang periode 2015-2018?

1.3 Tujuan Penelitian

Tujuan peneliti mengadakan penelitian ini yaitu:

1. Untuk menganalisis dan menguji pengaruh pendapatan asli desa (PADes) secara parsial terhadap belanja desa bidang pembangunan Desa Pada Desa Pulau Baru Kecamatan Kuantan Hilir Seberang periode 2015-2018.
2. Untuk menganalisis dan menguji pengaruh dana desa (DD) secara parsial terhadap belanja desa bidang pembangunan desa Pada Desa Pulau Baru Kecamatan Kuantan Hilir Seberang periode 2015-2018.
3. Untuk menganalisis dan menguji pengaruh alokasi dana desa (ADD) secara parsial terhadap belanja desa bidang pembangunan desa Pada Desa Pulau Baru Kecamatan Kuantan Hilir Seberang periode 2015-2018.
4. Untuk menganalisis dan menguji pengaruh bagi hasil pajak dan retribusi (BHPR) secara parsial terhadap belanja desa bidang pembangunan desa Pada Desa Pulau Baru Kecamatan Kuantan Hilir Seberang periode 2015-2018.
5. Untuk menganalisis dan menguji pengaruh pendapatan asli desa (PADes), dana desa (DD), alokasi dana desa (ADD), dan bagi hasil pajak dan retribusi (BHPR) secara simultan terhadap belanja desa bidang pembangunan desa Pada Desa Pulau Baru Kecamatan Kuantan Hilir Seberang periode 2015-2018 secara bersama-sama.
6. Untuk menganalisis dan menguji seberapa besar pengaruh pendapatan asli desa (PADes), dana desa (DD), alokasi dana desa (ADD), dan bagi hasil pajak dan retribusi (BHPR) secara simultan terhadap belanja desa bidang pembangunan desa Pada Desa Pulau Baru Kecamatan Kuantan Hilir Seberang periode 2015-2018 secara bersama-sama.

1.4 Manfaat Penelitian

1.4.1 Manfaat Teoritis

Manfaat yang dapat diperoleh dari penelitian ini diharapkan dapat memberikan masukan untuk penelitian lain yang memiliki tema yang sama serta dapat bermanfaat untuk menyumbangkan pemikiran dalam rangka mengembangkan ilmu pengetahuan.

1.4.2 Manfaat Praktis

Penelitian ini diharapkan dapat memberi manfaat bagi berbagai pihak antara lain:

1. Bagi peneliti, diharapkan dapat menambah wawasan pengembangan ilmu pengetahuan mengenai akuntansi sektor publik.
2. Bagi desa, diharapkan dapat dijadikan bahan masukan bagi desa.
3. Bagi akademis, diharapkan dapat memperkaya khasanah penelitian ilmu akuntansi khususnya akuntansi sektor publik.
4. Bagi peneliti lainnya, diharapkan dapat dijadikan referensi tambahan untuk melaksanakan penelitian serupa.

BAB II

TINJAUAN PUSTAKA

2.1. Landasan Teori

Landasan teori merupakan teori-teori yang dipilih peneliti sebagai tuntunan untuk mengerjakan penelitian lebih lanjut. Landasan teori mengemukakan kaidah-kaidah keilmuan ataupun konsep-konsep yang dijadikan dasar acuan dalam menyelesaikan masalah dalam sebuah penelitian.

2.1.1 Pengertian Desa

Secara etimologi kata desa berasal dari bahasa sansekerta, deca yang berarti tanah air, tanah asal, atau tanah kelahiran. Dari perspektif geografis, desa atau village diartikan sebagai "*a groups of houses or shops in a country area, smaller then a town*". Desa adalah kesatuan masyarakat hukum yang memiliki kewenangan untuk mengurus rumah tangganya sendiri berdasarkan hak asal-usul dan adat istiadat yang diakui dalam pemerintahan nasional dan berada di daerah kabupaten.

Menurut R. Bintarto, berdasarkan tinjauan geografi yang dikemukakannya, desa merupakan suatu hasil perwujudan geografis, social, politik, kultural yang terdapat di suatu daerah serta memiliki hubungan timbale balik dengan daerah lain.

Desa adalah sebuah aglomerasi permukiman di area pedesaan di Indonesia, istilah desa adalah pembagian wilayah administratif dibawah kecamatan yang dipimpin oleh kepala desa. Sebuah desa merupakan kumpulan dari beberapa unit permukiman kecil yang disebut kampung atau dusun (sebutan

banyak daerah terkecil di wilayah Indonesia). Desa adalah sekelompok rumah di luar kota yang merupakan satu kesatuan kampung dan dusun.

Menurut kartodihadikoesmo (2002) “desa” dusun “desi” asalnya dari perkataan Sanskrit yang artinya tanah air, tanah asal, tanah kelahiran. Sejak diberlakukannya otonomi daerah istilah desa dapat disebut dengan nama lain, misalnya di sumatra barat dengan istilah negeri, di aceh dengan istilah gampong hal ini merupakan salah satu pangkuan dan penghormatan pemerintah terhadap asal usul adat istiadat setempat.

Desa merupakan *self community* yaitu komunitas yang mengatur dirinya sendiri. Dengan pemahaman bahwa desa memiliki kewenangan untuk mengurus dan mengatur kepentingan masyarakatnya sesuai dengan kondisi dan sosial budaya setempat, maka posisi desa yang memiliki otonomi asli sangat strategis sehingga memerlukan perhatian yang seimbang terhadap penyelenggaraan otonomi daerah. Karena dengan otonomi desa yang kuat akan mempengaruhi secara signifikan perwujudan otonomi daerah menurut undang-undang republik Indonesia nomor 6 tahun 2014 pasal 5 tentang desa menyebutkan bahwa desa berkedudukan di wilayah kabupaten/kota. Desa terdiri atas desa dan desa adat.

Unit pemerintahan paling rendah di Negara Indonesia adalah desa. Konsep desa sebagai entitas sosial sangat beragam, yaitu sesuai dengan maksud dan sudut pandang yang hendak digunakan dalam melihat desa. Sebutan desa dapat berupa konsep tanpa makna politik, namun juga dapat berarti suatu posisi politik dan sekaligus kualitas posisi dihadapan pihak atau kekuatan lain.

2.1.2 Pemerintah Desa

Menurut undang-undang republik Indonesia nomor 6 tahun 2014 tentang desa menyebutkan bahwa pemerintah desa adalah kepala desa atau yang disebut dengan nama lain dibantu perangkat desa sebagai unsur penyelenggaraan pemerintahan desa.

Pemerintahan adalah proses cara pembuatan pemerintah yang berdasarkan Demokrasi Gubernur 16 memegang tampuk di daerah tingkat 1 segala urusan yang dilakukan oleh negara dalam menyelenggarakan kesejahteraan masyarakat dan kepentingan negara. Pemerintah merupakan bagian dari pemerintah nasional, yang menyelenggarakannya ditunjukkan kepada desa. Pemerintah desa proses dimana usaha-usaha pemerintah untuk meningkatkan taraf hidup masyarakat disamping kewenangan dan hak memiliki kepala desa dan konteks Undang-undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang pemerintah desa kepala desa yang dibantu oleh perangkat desa dan Badan Permusyawaratan Desa (BPD) dalam menjalankan tugasnya.

Sejarah perjalanan tata pemerintahan Daerah/Desa selama ini berubah-ubah seiring dengan dinamika kondisi dan situasi politik nasional. Undang-undang Nomor 5 Tahun 1974 dan Undang-undang Nomor 5 Tahun 1979 kurang memberikan kebebasan Daerah/Desa untuk mengatur dan mengurus rumah tangganya sendiri.

Kepala Desa mempunyai tugas menyelenggarakan urusan pemerintahan, pembangunan, dan kemasyarakatan. Dalam melaksanakan tugasnya kepala desa mempunyai wewenang (Nurcholis, 2004: 74).

- a. Memimpin penyelenggaraan pemerintahan desa berdasarkan kebijakan yang ditetapkan bersama Badan Permusyawaratan Desa (BPD).
- b. Mengajukan rancangan peraturan desa.

- c. Menetapkan peraturan desa yang telah mendapat persetujuan bersama Badan Permusyawaratan Desa (BPD).
- d. Menyusun dan mengajukan rancangan peraturan desa mengenai APBDesa untuk dibahas dan ditetapkan bersama Badan Permusyawaratan Desa (BPD).
- e. Membina kehidupan masyarakat desa.
- f. Membina perekonomian desa.
- g. Mengkoordinasikan pembangunan desa secara partisipatif.
- h. Melaksanakan wewenang lain sesuai dengan peraturan perundang-undang.

Undang dalam melaksanakan tugas dan wewenangnya kepada desa mempunyai kewajiban:

- a. Memegang teguh dan mengamalkan pancasila, melaksanakan Undang-undang dasar negara Republik Indonesia Tahun 1945 serta mempertahankan dan memelihara keutuhan negara kesatuan Republik Indonesia.
- b. Meningkatkan kesejahteraan masyarakat.
- c. Memelihara ketentraman dan ketertiban masyarakat.
- d. Melaksanakan kehidupan demokrasi.
- e. Melaksanakan prinsip tata pemerintahan desa yang bersih dan bebas dari kolusi, korupsi dan nepotisme.
- f. Mengembangkan pendapatan masyarakat dan desa.
- g. Memberdayakan masyarakat dan kelembagaan di desa.

Tugas dan kewajiban kepala desa dalam memimpin penyelenggaraan pemerintahan desa diatur lebih lanjut dengan peraturan daerah berdasarkan peraturan pemerintah.

Agar fokus dalam pelayanan kepada masyarakat, kepala desa dilarang:

- a. Menjadi pengurus partai politik.
- b. Merangkap jabatan sebagai ketua dan/atau anggota Badan Permusyawaratan Desa (BPD), dan lembaga kemasyarakatan di desa bersangkutan.
- c. Merangkap jabatan sebagai anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD).
- d. Terlibat dalam kampanye pemilihan umum, pemilihan presiden, dan pemilihan kepala daerah.
- e. Melakukan kolusi, korupsi dan nepotisme, menerima uang, barang dan, atau jasa dari pihak lain yang dapat memengaruhi keputusan atau tindakan yang akan dilakukannya.
- f. Melanggar sumpah/janji jabatan.

Pemerintahan kepentingan masyarakat setempat berdasarkan prakarsa masyarakat hak asal usul dan atau hak tradisional dan diakui dan dihormati dalam sistem pemerintahan negara kesatuan Republik Indonesia 12 desa dibentuk atas prakarsa masyarakat dengan memperhatikan asal-usul desa dan kondisi sosial budaya masyarakat setempat. Pembentukan desa dapat berupa pemekaran dari satu desa menjadi dua desa atau lebih. Atau pembentukan dengan keinginan perangkat desa yang berwenang mengatur keseluruhan kegiatan di desa seperti halnya dengan pembentukan atau pendirian organisasi baru pembentukan desa pun harus memenuhi aturan-aturan yang

ada. Berikut landasan hukum pembentukan desa adalah Undang-Undang No. 6 Tahun 2014 yang telah direvisi menjadi PP No. 47 Tahun 2015 tentang peraturan pelaksanaan Undang-undang Nomor 6 Tahun 2014. Dalam Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 pembentukan desa harus memenuhi syarat sebagai berikut:

- a. Batas usia desa induk paling sedikit 5 (lima) Tahun terhitung sejak pembentukkan.
- b. Jumlah penduduk sebagaimana diatur pada pasal 8 ayat 3.
- c. Wilayah kerja yang memiliki akses transportasi antar wilayah.
- d. Sosial wilayah yang dapat menciptakan kerukunan hidup bermasyarakat sesuai dengan adat istiadat desa.
- e. Batas wilayah desa yang dinyatakan dalam bentuk peta desa yang telah ditetapkan dalam peraturan Bupati/walikota.
- f. Sarana dan prasarana bagi pemerintahan desa dan pelayanan publik dan tersedianya dana operasional, penghasilan tetap, dan tunjangan lainnya bagi perangkat pemerintahan desa sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Melaksanakan tugas dan wewenangnya. Perangkat desa terdiri atas sekretaris desa dan perangkat desa lainnya. Sekretaris desa diisi dari pegawai negeri sipil yang memenuhi persyaratannya, yaitu (Nurcholis, 2004 : 76):

- a. Berpendidikan paling rendah lulusan SMA atau sederajat.
- b. Mempunyai pengetahuan tentang teknis pemerintahan.
- c. Mempunyai kemampuan di bidang administrasi perkantoran.
- d. Mempunyai pengalaman di bidang admistrasi keuangan dan di bidang perencanaan.

- e. Bersedia tinggal di desa yang bersangkutan.

Jumlah perangkat desa di sesuaikan dengan kebutuhan dan kondisi sosial budaya masyarakat setempat. Susunan organisasi dan tata kerja pemerintahan desa ditetapkan dengan peraturan desa. Ketentuan lebih lanjut mengenai pedoman penyusunan organisasi dan tata kerja pemerintahan desa diatur dengan peraturan daerah kabupaten/kota peraturan daerah Kabupaten/kota sekurang-kurangnya memuat:

- a. Tata cara penyusunan struktur organisasi.
- b. Perangkat.
- c. Tugas dan fungsi.
- d. Hubungan kerja.

Kepala desa dan perangkat desa diberikan penghasilan tetap setiap bulan dan atau tunjangan lainnya sesuai dengan kemampuan keuangan desa yang ditetapkan setiap tahun dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa (APBDesa). Penghasilan tetap tersebut paling sedikit sama dengan upah minimum regional kabupaten/kota. Ketentuan lebih lanjut mengenai kedudukan keuangan kepala desa dan perangkat desa diatur dengan peraturan daerah kabupaten/kota yang sekurang-kurangnya memuat:

- a. Rincian jenis penghasilan.
- b. Rincian jenis tunjangan.
- c. Penentuan besarnya dan pembebanan pemberian.
- d. Penghasilan dan/tunjangan

2.1.3 Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa

Anggaran pendapatan dan belanja desa adalah peraturan desa yang memuat sumber-sumber penerimaan dan alokasi pengeluaran desa dalam kurun

waktu satu tahun. APBDes terdiri dari pendapatan desa, belanja desa, dan pembiayaan. Rancangan APBDes dibahas dalam musyawarah perencanaan pembangunan desa. Kepala desa bersama badan permusyawaratan desa (BPD) menetapkan APBDes setiap tahun dengan peraturan desa.

Menurut Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 43 Tahun 2014 Tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Desa, dinyatakan bahwa Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa, selanjutnya disebut APBDesa, adalah rencana keuangan tahunan Pemerintahan Desa. Rancangan peraturan desa tentang APBDesa disepakati bersama oleh kepala desa dan Badan Permasyarakatan Desa paling lambat bulan Oktober tahun berjalan.

Rancangan peraturan desa tentang APBDesa kemudian disampaikan oleh kepala Desa kepada bupati melalui camat paling lambat 3 (tiga) hari sejak disepakati untuk dievaluasi lebih lanjut.

2.1.3.1 Pendapatan Desa

Menurut Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 Tentang Standar Akuntansi Pemerintahan (SAP) pada Pernyataan Standar Akuntansi Pemerintahan Nomor 2 Tentang Laporan Realisasi Anggaran dinyatakan bahwa pendapatan adalah semua penerimaan Rekening Kas Umum Negara/Daerah yang menambah ekuitas dana lancar dalam periode tahun anggaran yang bersangkutan yang menjadi hak pemerintah, dan tidak perlu dibayar kembali oleh pemerintah.

Pengertian pendapatan menurut Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 Tentang Standar Akuntansi Pemerintahan (SAP) di atas sama dengan pengertian pendapatan yang terdapat dalam peraturan sebelumnya yaitu

sebagaimana yang diatur dalam Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2005 Tentang Standar Akuntansi Pemerintahan (SAP).

Menurut Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 113 Tahun 2014 Tentang Pengelolaan Keuangan Desa, pendapatan desa adalah semua penerimaan uang melalui rekening desa yang merupakan hak desa dalam 1 (satu) tahun anggaran yang tidak perlu dibayar kembali oleh desa.

Berdasarkan undang-undang nomor 6 tahun 2016 tentang desa, pasal 72 ayat (1) menjelaskan bahwa pendapatan desa dapat bersumber dari:

1. Pendapatan asli desa terdiri atas hasil usaha, hasil asset, swadaya dan partisipasi, gotong royong, dan lain-lain pendapatan asli desa.
2. Alokasi anggaran pendapatan dan belanja Negara
3. Bagian dari hasil pajak daerah dan retribusi daerah kabupaten/kota
4. Alokasi dana desa yang merupakan bagian dari dana berimbang yang diterima kabupaten/kota
5. Dana perimbangan yang diterima kabupaten/kota
6. Bantuan keuangan dari anggaran pendapatan dan belanja daerah provinsi dan anggaran pendapatan belanja daerah kabupaten/kota
7. Hibah dan sumbangan yang tidak mengikat dari pihak ketiga; dan
8. Lain-lain pendapatan desa yang sah.

Menurut permendagri 113/2014 pendapatan desa dibagi menjadi 3 kelompok yaitu:

1. Pendapatan asli desa (PADes)

Pendapatan asli desa adalah pungutan dan pendapatan yang dimasukkan ke rekening desa, yang merupakan pendapatan dari hasil usaha, hasil

riset, swadaya, dan partisipasi, gotong royong, dan lain-lain yang dilakukan oleh sebuah desa.

2. Transfer

Pendapatan desa jenis ini bersumber dari pemerintah (baik pusat maupun kabupaten) yaitu diperoleh melalui transfer antar rekening yaitu dari rekening kabupaten atau provinsi ke rekening desa.

3. Pendapatan lain-lain

4. Pendapatan lain-lain merupakan pendapatan yang bersumber dari hibah dan sumbangan yang tidak mengikat dari pihak ketiga dan lain-lain pendapatan desa yang sah. Keseluruhan pendapatan desa akhirnya harus tercermin dalam anggaran pendapatan dan belanja desa (APBDes).

2.1.3.2 Belanja Desa

Menurut Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 Tentang Standar Akuntansi Pemerintahan (SAP) pada Pernyataan Standar Akuntansi Pemerintahan Nomor 3 Tentang Laporan Arus Kas dinyatakan bahwa belanja adalah semua pengeluaran dari Rekening Kas Umum Negara/Daerah yang mengurangi ekuitas dana lancar dalam periode tahun anggaran bersangkutan yang tidak akan diperoleh pembayarannya kembali oleh pemerintah.

Pengertian belanja menurut Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 Tentang Standar Akuntansi Pemerintahan (SAP) di atas sama dengan pengertian belanja yang terdapat dalam peraturan sebelumnya yaitu sebagaimana yang diatur dalam Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2005 Tentang Standar Akuntansi Pemerintahan (SAP).

Menurut Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 113 Tahun 2014 Tentang Pengelolaan Keuangan Desa, belanja desa adalah semua pengeluaran dari rekening desa yang merupakan kewajiban desa dalam 1 (satu) tahun anggaran yang tidak akan diperoleh pembayarannya kembali oleh desa. Belanja desa dipergunakan dalam rangka mendanai penyelenggaraan kewenangan desa.

Klasifikasi belanja desa terdiri atas:

1. Penyelenggaraan pemerintahan desa
2. Pelaksanaan pembangunan desa
3. Pembinaan kemasyarakatan desa
4. Pemberdayaan masyarakat desa
5. Belanja tak terduga

Kelompok belanja diatas dibagi dalam kegiatan sesuai dengan kebutuhan desa yang telah dituangkan dalam rencana kerja pemerintah desa. Kegiatan-kegiatan yang dimaksud adalah:

1. Belanja pegawai

Pengeluaran penghasilan tetap dan tunjangan kepala desa, perangkat desa, dan badan permusyawaratan desa (BPD) yang pembayarannya dilakukan setiap bulan.

2. Belanja barang dan jasa

Pengeluaran pembelian/pengadaan barang yang nilai manfaatnya kurang dari 12 (dua belas) bulan.

Seperti: alat tulis kantor, benda pos, bahan/material, pemeliharaan, cetak atau penggandaan, sewa kantor desa, sewa perlengkapan dan peralatan kantor, makanan dan minuman rapat, pakaian dinas dan atributnya,

perjalanan dinas, upah kerja, honorarium narasumber atau ahli, operasional pemerintah desa, operasional BPD, insentif RT/RW, pemberian barang pada masyarakat atau kelompok masyarakat.

3. Belanja modal

Pengeluaran dalam rangka pembelian atau pengadaan barang atau bangunan yang nilai manfaatnya lebih dari 12 (dua belas) bulan.

Seperti: barang atau bangunan yang digunakan untuk kegiatan penyelenggaraan kewenangan desa.

2.1.3.3 Pembiayaan Desa

Menurut Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 113 Tahun 2014 Tentang Pengelolaan Keuangan Desa dinyatakan bahwa pembiayaan desa adalah semua penerimaan yang perlu dibayar kembali atau pengeluaran yang akan diterima kembali, baik pada tahun anggaran yang bersangkutan maupun pada tahun-tahun anggaran berikutnya.

Pembiayaan desa terdiri atas dua kelompok:

1. penerimaan pembiayaan

a. sisa lebih perhitungan anggaran (SiLPA) tahun sebelumnya adalah pelampauan penerimaan pendapatan terhadap belanja, penghematan belanja, dan sisa dana kegiatan lanjutan.

Kegunaannya untuk menutupi deficit anggaran apabila realisasi pendapatan lebih kecil dari pada realisasi belanja, untuk mendanai pelaksanaan kegiatan lanjutan, dan untuk mendanai kewajiban lainnya yang sampai dengan akhir tahun anggaran belum diselesaikan.

b. pencairan dana cadangan

adalah dana yang bersumber dari penyisihan atas penerimaan desa, kecuali dari penerimaan yang penggunaannya telah ditentukan secara khusus berdasarkan peraturan perundang-undangan.

- c. hasil penjualan kekayaan desa yang dipisahkan.

Kekayaan desa yang dipisahkan adalah kekayaan milik desa baik bergerak maupun tidak yang dikelola oleh BUMDesa. Hasil penjualannya digunakan untuk menganggarkan hasil penjualan kekayaan desa yang dipisahkan.

2. Pengeluaran pembiayaan

- a. pembentukan dana cadangan

kegunaan dari pembentukan dana cadangan untuk mendanai kegiatan yang penyediaan dananya tidak dapat sekaligus atau sepenuhnya dibabankan dalam satu tahun anggaran.

- b. penyertaan modal desa.

Digunakan untuk menganggarkan kekayaan pemerintah desa yang diinvestasikan dalam BUMDes untuk meningkatkan pendapatan desa atau pelayanan kepada masyarakat. Penyertaan modal diatur lebih lanjut dalam peraturan bupati/wali kota mengenai pengelolaan keuangan desa.

2.1.4 Pendapatan Asli Desa (PADes)

Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang desa menyatakan pendapatan asli desa yaitu, pendapatan yang berasal dari kewenangan desa berdasarkan hak asal-usul dan kewenangan skala lokal desa. PADes merupakan pendapatan yang dihasilkan oleh usaha-usaha desa, hasil kekayaan desa, swadaya dan

partisipasi, hasil gotong royong dan lain-lain pendapatan asli desa yang sah (Nurcholis, 2011:82). Jenis PADes diuraikan sebagai berikut:

1. hasil usaha

adalah jenis usaha yang meliputi pelayanan ekonomi desa seperti usaha jasa yang meliputi usaha jasa keuangan, jasa angkutan darat dan air, listrik desa, dan usaha lain yang sejenis, penyaluran Sembilan bahan pokok ekonomi desa, perdagangan hasil pertanian meliputi tanaman pangan, perkebunan, peternakan, perikanan dan agrobisnis, industry dan kerajinan rakyat. Sedangkan jenis usaha yang berasal dari badan hukum dapat berupa lembaga bisnis, yaitu unit usaha kepemilikan sahamnya berasal dari pemerintah desa dan masyarakat seperti mikro kecil dan menengah, lembaga keuangan mikro pedesaan (usaha ekonomi desa simpan pinjam, badan kredit desa, lembaga simpan pinjam berbasis masyarakat, lembaga perkreditan desa dan sebagainya).

2. Hasil kekayaan desa

Adalah segala kekayaan yang bersumber penghasilan bagi desa yang bersangkutan yaitu tanah kas desa, tambahan perahu, pasar desa, tempat pemandian umum, jaringan irigasi, dan hasil asset lainnya sesuai dengan kewenangans berdasarkan hak asal-usul dan kewenangan local berskala desa. Lain-lain kekayaan milik desa antara lain: barang yang dibeli atau diperoleh atas beban APBDes, barang yang berasal dari perolehan lainnya dan dari pihak ketiga, barang yang diperoleh dari hibah/sumbangan atau sejenisnya, barang yang diperoleh sebagai pelaksanaan dari perjanjian /kontrak dan lain-lain sesuai dengan peraturan perundangan, hak desa dari dana perimbangan, pajak daerah

dan retribusi daerah, hibah dari pemerintah, pemerintah provinsi, pemerintah kabupaten, hibah dari pihak ketiga yang sah dan tidak mengikat, dan hasil kerjasama desa.

3. Hasil swadaya

Adalah kemampuan dari suatu kelompok masyarakat dengan kesadaran dan inisiatif sendiri mengadakan usaha kearah pemenuhan kebutuhan jangka pendek maupun jangka panjang yang dirasakan dalam kelompok masyarakat itu.

4. Hasil partisipasi dan gotong royong

Adalah keikutsertaan dalam kerjasama yang spontan dan sudah melembaga serta mengandung unsure-unsur timbale balik yang bersifat sukarela antara warga desa dan atau warga desa dengan pemerintah desa untuk memenuhi kebutuhan yang insidental maupun berkelanjutan dalam rangka meningkatkan kesejahteraan bersama baik materil maupun spirituil.

5. Lain-lain pendapatan asli desa yang sah

Yaitu giro, pendapatan denda atas keterlambatan pelaksanaan pekerjaan, penggunaan fasilitas umum asset desa (*public service*), hasil kerjasama desa, hasil penyertaan modal desa, lain-lain pendapatan asli desa yang lain yang ditetapkan dengan peraturan desa sesuai peraturan perundang-undangan yang berlaku, hasil pungutan desa.

6. Hasil pungutan desa

Adalah segala pungutan baik berupa uang maupun barang oleh pemerintah desa terhadap masyarakat, berdasarkan pertimbangan kemampuan social ekonomi masyarakat dalam rangka meningkatkan

penyelenggaraan pemerintahan, pembangunan dan kemasyarakatan yang ditetapkan dengan peraturan desa. Pemerintah desa dapat melakukan pungutan desa secara sukarela untuk kegiatan social tertentu yang bersifat mendesak tanpa persetujuan BPD terlebih dahulu.

2.1.5 Dana Desa (DD)

Permendagri No.113 Tahun 2014 menyatakan, dana desa (DD) adalah sumber dana desa yang berasal dari anggaran dan belanja Negara di transfer melalui anggaran pendapatan dan belanja daerah kabupaten dan digunakan untuk menyelenggarakan pemerintahan, pembangunan desa, pembinaan, dan pemberdayaan masyarakat. Tujuan diberikannya DD adalah untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat desa dan kualitas hidup masyarakat desa serta penanggulangan kemiskinan desa melalui peningkatan pelayanan publik di desa, memajukan perekonomian desa, mengatasi kesenjangan pembangunan antar desa serta memperkuat masyarakat desa sebagai subyek dari pembangunan.

Dana desa merupakan dana yang bersumber dari anggaran pendapatan dan belanja negara yang diperuntukkan untuk desa yang ditransfer melalui anggaran pendapatan dan belanja daerah kabupaten/kota dan digunakan untuk membiayai penyelenggaraan pemerintahan, pelaksanaan pembangunan, pembinaan kemasyarakatan dan pemberdayaan masyarakat. Pemerintah menganggarkan dana desa secara nasional dalam APBN setiap tahunnya yang bersumber dari belanja pemerintah dengan mengefektifkan program yang berbasis desa secara merata dan berkeadilan (A Saibani, 2014).

Undang-undang desa mengamanatkan anggaran DD yang bersumber dari APBN dihitung berdasarkan jumlah desa dan dialokasikan dengan memperhatikan jumlah penduduk, angka kemiskinan, luas wilayah, dan tingkat

kesulitan geografis. Untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat desa dan kualitas hidup manusia serta penanggulangan kemiskinan, prioritas penggunaan DD diarahkan untuk pelaksanaan program kegiatan pembangunan desa, meliputi:

1. Pembangunan, pengembangan dan pemeliharaan infrastruktur atau sarana prasarana fisik untuk penghidupan, termasuk ketahanan pangan dan pemukiman.
2. Pembangunan, pengembangan dan pemeliharaan sarana dan prasarana pendidikan, social dan kebudayaan.
3. Pengembangan usaha ekonomi masyarakat, meliputi pembangunan dan pemeliharaan sarana prasarana produksi dan distribusi.
4. Pembangunan dan pengembangan sarana prasarana energy terbarukan serta kegiatan pelestarian lingkungan hidup.

Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal Dan Transmigrasi Republik Indonesia Nomor 19 Tahun 2017 tentang Penetapan Prioritas Penggunaan Dana Desa Tahun 2018 menetapkan prioritas penggunaan dana desa untuk membiayai pelaksanaan program dan kegiatan dibidang pembangunan desa dan pemberdayaan masyarakat desa.

2.1.6 Alokasi Dana Desa (ADD)

Undang-undang No 8 Tahun 2014 menyatakan, alokasi dana desa selanjutnya disingkat ADD, adalah 10% dari dana perimbangan yang diterima kabupaten dalam APBD setelah dikurangi dana alokasi khusus. Tujuan pemberian transfer ADD untuk mendukung ketersediaan dana dalam memenuhi kebutuhan belanja desa dalam menjalankan fungsi yang telah didesentralisasikan. Nurcholis (2011:88-89) menyatakan hakikat ADD adalah

ADD akan mendorong terlaksananya otonomi desa, sekaligus sebagai upaya pemberdayaan pemerintahan desa dan masyarakat desa. Pemerintah provinsi dan pemerintah kabupaten sebagai fasilitator, memfasilitasi masyarakat desa agar mampu menjalankan fungsi perencanaan, pelaksanaan dan pengawasan terhadap penggunaan ADD yang diterimanya.

Untuk memaksimalkan pengelolaan ADD yang diberikan oleh pemerintah kabupaten kepada desa, maka ADD memiliki tujuan yaitu:

1. Menanggulangi kemiskinan dan mengurangi kesenjangan
2. Meningkatkan perencanaan dan penganggaran pembangunan di tingkat desa dan pemberdayaan masyarakat
3. Meningkatkan pembangunan infrastruktur desa
4. Meningkatkan pengalaman nilai-nilai keagamaan, sosial budaya dalam rangka mewujudkan peningkatan sosial
5. Meningkatkan ketentraman dan ketertiban masyarakat
6. Meningkatkan pelayanan pada masyarakat desa dalam rangka pengembangan kegiatan sosial dan ekonomi masyarakat
7. Mendorong peningkatan keswadayaan dan gotong royong masyarakat
8. Meningkatkan pendapatan desa dan masyarakat desa melalui badan usaha milik desa (BUMDes).

Menurut Sahdan (2004:10) alokasi dana desa yang kemudian disebut ADD adalah dana responsivitas Negara untuk membiayai kewenangan desa.

Kewenangan desa mencakup:

1. Kewenangan asal-usul (mengelola sumberdaya alam, peradilan adat, membentuk susunan asli, melestarikan pranata local) yang diakui (rekognisi) oleh Negara.

2. Kewenangan atributif organisasi lokal (perencanaan, tata ruang, ekologi, pemukiman, membentuk organisasi lokal dan lain-lain) yang ditetapkan oleh pemerintah melalui undang-undang.
3. Kewenangan delegatif-administratif dari delegasi atau tugas pembantu dari pemerintah.

Menurut HAW Widjaja (2005:133) Alokasi Dana Desa adalah dalam rangka meningkatkan pemberdayaan, kesejahteraan dan pemerataan pembangunan dipedesaan melalui dana APBD kabupaten, provinsi dan pemerintah pusat, pemerintah kabupaten, provinsi, dan pusat perlu merealisasikan dana APBD masing-masing sebesar 10% untuk dana Alokasi Dana Desa.

Menurut Simanjuntak dan Hidayanto (2002:158) menyebutkan bahwa perumusan alokasi dana bantuan harus memiliki sifat kecukupan, fleksibel dan stabil. Kecukupan artinya alokasi dana dapat menutupi kebutuhan dana pemerintah daerah. Fleksibel artinya besar dana alokasi disesuaikan dengan kemampuan pemerintah pusat sedangkan stabil artinya bahwa adanya kepastian bagi pemerintah daerah dalam mendapatkan alokasi dana.

2.1.7 Bagi Hasil Pajak Dan Retribusi

Undang-Undang No 28 Tahun 2009 tentang pajak daerah dan retribusi daerah memaparkan bagian hasil pajak dan retribusi (BHPR) dialokasikan sebesar 60% secara merata dan 40% secara proporsional dari realisasi pajak dan retribusi masing-masing daerah. Pemerintah juga mengalokasikan BHPR kepada desa paling sedikit 10% untuk desa di wilayahnya, dengan memperhatikan aspek pemerataan dan potensi desa serta penggunaan ditetapkan sepenuhnya oleh desa penerima.

Bagi hasil pajak daerah kabupaten/kota untuk desa paling sedikit 10% untuk desa dan dari retribusi kabupaten/kota sebagian diperuntukkan bagi desa. Sumber pendapatan daerah yang berada di desa baik pajak maupun retribusi yang sudah dipungut oleh provinsi atau kabupaten/kota tidak dibenarkan adanya pungutan tambahan oleh pemerintah desa. Sebaliknya, pungutan retribusi dan pajak lainnya yang telah dipungut oleh desa tidak dibenarkan dipungut atau diambil alih oleh pemerintah provinsi atau pemerintah kabupaten/kota (Suprihartini, 2007:38).

Sumber lain menegaskan bahwa bagian dari dana perimbangan keuangan pusat dan daerah atau disebut juga bagian dari retribusi kabupaten untuk desa paling sedikit 10% , yang dibagi kesetiap desa secara proporsional yang merupakan alokasi dana desa (Nurcholis, 2011:82).

2.1.8 Belanja Desa Bidang Pembangunan Desa

Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang desa menyatakan pembangunan desa adalah upaya peningkatan kualitas hidup dan kehidupan untuk sebesar-besarnya kesejahteraan masyarakat desa. Peningkatan kualitas hidup dan kehidupan masyarakat desa tentunya dilakukan dengan berbagai pembangunan diberbagai bidang yang menyangkut dengan kesejahteraan masyarakat desa seperti: pemenuhan kebutuhan dasar, pembangunan sarana dan prasarana desa, pengembangan potensi ekonomi lokal, serta pemanfaatan sumber daya alam dan lingkungan secara berkelanjutan.

Nurman (2015:266) menyatakan hakikat pembangunan desa tidak terlepas dari konteks manajemen pembangunan daerah baik di tingkat kabupaten maupun tingkat provinsi karena kedudukan desa dalam konteks yang lebih luas (sosial, ekonomi, akses pasar, dan politik) harus melihat keterkaitan

antardesa, desa dalam kecamatan, antarkecamatan dan kabupaten dan antar kabupaten.

Rahardjo (2013:24) menyatakan pembangunan desa memiliki peran penting dalam projek pembangunan nasional. Pembangunan desa ditujukan untuk sebuah peningkatan kualitas hidup dan kehidupan masyarakat desa. Pelaksanaan pembangunan desa seharusnya mengacu pada pencapaian tujuan dari pembangunan yaitu mewujudkan kehidupan masyarakat pedesaan yang mandiri, maju, sejahtera, dan berkeadilan.

Pembangunan desa memiliki 2 tujuan yaitu:

1. Pembangunan jangka panjang yaitu terwujudnya peningkatan kesejahteraan masyarakat desa yang secara langsung dilakukan melalui peningkatan kesempatan kerja, kesempatan berusaha dan pendapatan berdasarkan pada pendekatan bina lingkungan, bina usaha, dan bina manusia, dan secara tidak langsung adalah meletakkan dasar-dasar yang kokoh bagi pembangunan nasional.
2. Pembangunan desa jangka pendek yaitu peningkatan efektivitas dan efisiensi dalam pelaksanaan kegiatan ekonomi dan dalam pemanfaatan sumber daya alam dan sumber daya manusia yang dimiliki oleh desa tersebut.

Pembangunan desa terdapat dua aspek yang menjadi objek pembangunan desa, meliputi:

1. Pembangunan perdesaaan dalam aspek fisik, yaitu pembangunan yang objek utamanya dalam aspek fisik (sarana, prasarana dan manusia) seperti jalan desa, bangunan rumah, pemukiman, jembatan, pendidikan,

sarana ibadah dan sebagainya. Pembangunan dalam aspek fisik ini selanjutnya disebut pembangunan desa.

2. Pembangunan perdesaan dalam aspek pemberdayaan insani, yaitu pembangunan yang aspek utamanya aspek pengembangan dan peningkatan kemampuan, skill dan memberdayakan masyarakat di daerah perdesaan sebagai warga Negara, seperti pendidikan dan pelatihan, pembinaan usaha ekonomi, kesehatan, spiritual dan sebagainya. Tujuan utamanya adalah untuk membantu masyarakat yang masih tergolong marjinal agar dapat melepaskan diri dari belenggu keterbelakangan sosial, ekonomi dan politik.

Pembangunan dalam aspek pemberdayaan insani ini selanjutnya disebut sebagai pemberdayaan masyarakat desa. Permendesa PDPTT No. 19 Tahun 2017 tentang Penetapan Prioritas Penggunaan Dana Desa Tahun 2018 menyatakan terdapat kegiatan-kegiatan pembangunan desa yang dapat dibiayai DD yaitu:

1. Pengadaan, pembangunan, pengembangan dan pemeliharaan sarana prasarana desa.
 - a) Pengadaan, pembangunan, pengembangan dan pemeliharaan sarana dan prasarana lingkungan pemukiman, antara lain: pembangunan dan/atau perbaikan rumah sehat untuk fakir miskin, penerangan lingkungan pemukiman, pedestrian, drainase, selokan, tempat pembuangan sampah, gerobak sampah, kendaraan pengangkut sampah, mesin pengolah sampah dan sarana prasarana lingkungan pemukiman lainnya yang sesuai dengan kewenangan desa dan diputuskan dalam musyawarah desa.

- b) Pengadaan, pembangunan, pengembangan dan pemeliharaan sarana prasarana transportasi, antara lain: tambatan perahu, jalan pemukiman, jalan poros desa, jalan desa antara permukiman ke wilayah pertanian, jalan desa antara permukiman ke lokasi wisata, jembatan desa, gorong-gorong, terminal desa, sarana prasarana transportasi lainnya yang sesuai dengan kewenangan desa dan diputuskan dalam musyawarah desa.
 - c) Pengadaan, pembangunan, pengembangan dan pemeliharaan sarana dan prasarana energi, antara lain: pembangkit listrik tenaga mikrohidro, pembangkit listrik tenaga diesel, pembangkit listrik tenaga matahari, instalasi biogas, jaringan distribusi tenaga listrik dan sarana prasarana energi lainnya yang sesuai dengan kewenangan desa dan diputuskan dalam musyawarah desa.
 - d) Pengadaan, pembangunan, pemanfaatan dan pemeliharaan sarana dan prasarana informasi dan komunikasi, antara lain: jaringan internet untuk warga desa, website desa, peralatan pengeras suara (loudspeaker), telepon umum, radio Single Side Band (SSB) dan sarana prasarana komunikasi lainnya yang sesuai dengan kewenangan desa dan diputuskan dalam musyawarah desa.
2. Peningkatan kualitas dan akses terhadap pelayanan sosial dasar.
- a) Pengadaan, pembangunan, pengembangan dan pemeliharaan sarana prasarana kesehatan, antara lain: air bersih berskala desa, sanitasi lingkungan, jambanisasi, mandi, cuci, kakus (MCK), mobil/kapal motor untuk ambulance desa, alat bantu penyandang disabilitas, panti rehabilitasi penyandang disabilitas, balai pengobatan, posyandu, poskesdes/polindes, posbindu, reagen rapid tes kid untuk menguji

sampel-sampel makanan, sarana prasarana kesehatan lainnya yang sesuai dengan kewenangan desa dan diputuskan dalam musyawarah desa.

- b) Pengadaan, pembangunan, pengembangan dan pemeliharaan sarana prasarana pendidikan dan kebudayaan antara lain: taman bacaan masyarakat, bangunan PAUD, buku dan peralatan belajar PAUD lainnya, wahana permainan anak di PAUD, taman belajar keagamaan, bangunan perpustakaan desa, buku/bahan bacaan, balai pelatihan/kegiatan belajar masyarakat, sanggar seni, film documenter, peralatan kesenian dan sarana prasarana pendidikan dan kebudayaan lainnya yang sesuai dengan kewenangan desa dan diputuskan dalam musyawarah desa.
3. Pengadaan, pembangunan, pengembangan dan pemeliharaan sarana prasarana usaha ekonomi desa.
 - a) Pengadaan, pembangunan, pengembangan dan pemeliharaan sarana prasarana produksi usaha pertanian untuk ketahanan pangan dan usaha pertanian berskala produktif yang difokuskan kepada pembentukan dan pengembangan produk unggulan desa dan/atau produk unggulan kawasan perdesaan, antara lain: bendungan berskala kecil, pembangunan atau perbaikan embung, irigasi desa, percontakan lahan pertanian, kolam ikan, kapal penangkap ikan, tempat pendaratan kapal penangkap ikan, tambak garam, kandang ternak, mesin pakan ternak, gudang penyimpanan sarana produksi pertanian (saprotan) dan sarana prasarana produksi pertanian lainnya yang sesuai dengan kewenangan desa dan diputuskan dalam musyawarah desa.

- b) Pengadaan, pembangunan, pemanfaatan dan pemeliharaan sarana dan prasarana pengolahan hasil pertanian untuk ketahanan pangan dan usaha pertanian yang difokuskan kepada pembentukan dan pengembangan produk unggulan desa dan/atau produk unggulan kawasan perdesaan, antara lain: pengeringan hasil pertanian seperti: lantai jemur gabah, jagung, kopi, coklat, kopra, dan tempat penjemuran ikan, lumbung desa, gudang pendingin (cold storage) dan sarana dan prasarana pengolahan hasil pertanian lainnya yang sesuai dengan kewenangan desa dan diputuskan dalam musyawarah desa.
- c) Pengadaan, pembangunan, pemanfaatan dan pemeliharaan sarana dan prasarana jasa dan industri kecil yang difokuskan kepada pembentukan dan pengembangan produk unggulan desa dan/atau produk unggulan kawasan perdesaan, antara lain: mesin jahit, peralatan bengkel kendaraan bermotor, mesin bubut untuk meubeler dan sarana dan prasarana jasa dan industri kecil lainnya yang sesuai dengan kewenangan desa dan diputuskan dalam musyawarah desa.
- d) Pengadaan, pembangunan, pemanfaatan dan pemeliharaan sarana dan prasarana pemasaran yang difokuskan kepada pembentukan dan pengembangan produk unggulan desa dan/atau produk unggulan kawasan perdesaan, antara lain: pasar desa, pasar sayur, pasar hewan, tempat pelelangan ikan, toko online, gudang barang dan sarana dan prasarana pemasaran lainnya yang sesuai dengan kewenangan desa dan diputuskan dalam musyawarah desa.
- e) Pengadaan, pembangunan, pemanfaatan dan pemeliharaan sarana dan prasarana desa wisata, antara lain: pondok wisata, panggung hiburan,

kios cenderamata, kios warung makan, wahana permainan anak, wahana permainan outbound, taman rekreasi, tempat penjualan tiket, rumah penginapan, angkutan wisata dan sarana dan prasarana desa wisata lainnya yang sesuai dengan kewenangan desa dan diputuskan dalam musyawarah desa.

- f) Pengadaan, pembangunan, pemanfaatan dan pemeliharaan sarana dan prasarana Teknologi Tepat Guna (TTG) untuk kemajuan ekonomi yang difokuskan kepada pembentukan dan pengembangan produk unggulan desa dan/atau produk unggulan kawasan perdesaan, antara lain: penggilingan padi, peraut kelapa, penepung biji-bijian, pencacah pakan ternak, sangrai kopi, pemotong/pengiris buah dan sayuran, pompa air, traktor mini dan sarana dan prasarana desa wisata lainnya yang sesuai dengan kewenangan desa dan diputuskan dalam musyawarah desa.
4. Pengadaan, pembangunan, pengembangan dan pemeliharaan sarana prasarana untuk pelestarian lingkungan hidup antara lain: pembuatan terasering, kolam untuk, mata air, plesengan sungai, pencegahan abrasi pantai; dan sarana prasarana untuk pelestarian lingkungan hidup lainnya yang sesuai dengan kewenangan desa dan diputuskan dalam musyawarah desa.
5. Pengadaan, pembangunan, pengembangan dan pemeliharaan sarana prasarana untuk penanggulangan bencana alam dan/atau kejadian luar biasa lainnya yang meliputi: pembangunan jalan evakuasi dalam bencana gunung berapi, pembangunan gedung pengungsian, pembersihan lingkungan perumahan yang terkena bencana alam, rehabilitasi dan rekonstruksi lingkungan perumahan yang terkena bencana alam dan

sarana prasarana untuk penanggulangan bencana yang lainnya sesuai dengan kewenangan desa dan diputuskan dalam musyawarah desa.

2.1.9 Pengelolaan Keuangan Desa

2.1.9.1 Tahap Perencanaan Keuangan Desa

Pengelolaan keuangan desa sebagai rangkaian kegiatan yang diawali dengan kegiatan perencanaan, yaitu penyusunan APBDes. Perencanaan keuangan adalah kegiatan untuk memperkirakan pendapatan dan belanja untuk kurun waktu tertentu dimasa yang akan datang. Dalam kaitannya dengan pengelolaan keuangan desa, perencanaan yang dimaksud adalah proses penyusunan APBDes. Penyusunan APBDes berdasar pada RKPDes, yaitu rencana pembangunan tahunan yang ditetapkan dengan Peraturan Desa (Perdes). Perencanaan keuangan desa dilakukan untuk menentukan arah pada pembangunan desa.

Perencanaan pembangunan yang dilaksanakan didasarkan pada jangka waktu atau periode. Jangka waktu tersebut termuat dalam Rencana Kerja Pemerintah Jangka Menengah (RPJM) desa yang akan dilaksanakan dalam jangka waktu lima tahun. Rencana Kerja Pemerintah (RKP) desa adalah rencana kerja tahunan yang merupakan penjabaran dari RPJM desa dan berjangka waktu satu tahun. Dalam perencanaan tersebut pemerintah desa akan didampingi oleh pemerintah daerah dan tenaga professional untuk mengkaji lebih lanjut tentang perencanaan pembangunan.

Pemerintah akan mengetahui keadaan daerah dengan melaksanakan pengkajian sebelum perencanaan keuangan yang direpresentasikan pada tahap penganggaran dibuat. RKP desa yang dibuat adalah perencanaan lanjutan yang berasal dari RPJM desa. Maka dari itu, RPJM desa yang berjangka waktu lima

tahun harus menentukan arah kebijakan yang ada dalam pembangunan. Kemudian RKP hanya mengikuti arah kebijakan tersebut dengan melakukan pencermatan kembali terhadap RPJM desa. Setelah pencermatan kembali sudah selesai, maka penyusunan RKP desa sudah bisa dilaksanakan. Penyusunan RKP desa akan menghasilkan formulir rancangan RKP desa. Rencana Anggaran Biaya (RAB) dan daftar usulan biaya yang pada dasarnya memuat jenis kegiatan, volume, sasaran, dan perkiraan waktu dan anggaran yang akan dilaksanakan dalam bentuk belanja empat bidang, yaitu penyelenggaraan pemerintah, pembangunan, pembinaan kemasyarakatan, dan pemberdayaan masyarakat. Pelaksanaan belanja tersebut ada didalam APBDes dan mempunyai batasan yang harus diketahui bahwa 70% anggaran harus dilaksanakan dalam empat bidang tersebut dan sisanya untuk item belanja bersangkutan.

2.1.9.2 Tahap Penganggaran Keuangan Desa

Penganggaran merupakan proses pengalokasian keuangan setelah perencanaan disetujui ketika RKP desa yang telah ditetapkan akan dilanjutkan dengan proses penyusunan APBDes. Tahap dalam proses penganggaran melibatkan Sekdes, Kepala Desa, BPD, Camat, dan Bupati/Walikota dengan alur pelaporan sebai berikut. Pertama, penetapan pagu indikatif dalam anggaran yang digunakan untuk prioritas penggunaan anggaran. Pagu indikatif tersebut disampaikan oleh pemerintah kabupaten kepada desa setelah RPJM desa dibuat dan RKP desa mulai disusun. Batas waktu penyampaian pagu indikatif oleh pemerintah kabupaten adalah akhir bulan juli dan batas waktu penyusunan RKP desa adalah akhir September. Kemudian sekdes akan menyusun dan merancang Peraturan Desa yang membahas tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa (APBDes) dengan RKP desa sebagai pedoman APBDes pada

awal Oktober yang kemudian diserahkan ke Kepala Desa. Kedua, rancangan peraturan APBDes tersebut akan dibahas bersama BPD dalam rapat Peraturan Desa. Paling lama pembahasan dan penetapan tersebut berakhir pada bulan Oktober sehingga jangka waktu penyusunan dan penetapan adalah satu bulan penuh. Setelah rapat dengan BPD dan dalam pembahasan rancangan APBDes yang akan menjadi peraturan Desa yang disetujui, maka akan diajukan ke Bupati/Walikota melalui kecamatan maksimal tiga hari. Tugas kecamatan adalah mengumpulkan syarat administrasi dalam rancangan APBDes. Ketiga, akan dilakukan evaluasi di kabupaten setelah rancangan APBDes disepakati bersama dengan BPD selama 20 hari. Ketika Bupati menyampaikan bahwa rancangan peraturan desa yang memuat APBDes tersebut tidak sesuai, maka akan dilaksanakan penyempurnaan oleh Kepala Desa dengan proses penyempurnaan adalah tujuh hari terhitung dari hari peraturan desa tersebut dikembalikan ke Kepala Desa. Secara umum, bupati tidak menyetujui peraturan Desa tersebut karena sebagian besar terdapat ketidaksesuaian dengan kepentingan umum. Jika kepala desa tetap menginginkan penggunaan peraturan desa yang telah dibuat dan Bupati tidak berkenan, maka secara langsung akan menggunakan pagu indikatif tahun sebelumnya dalam APBDes. Keempat, jika Bupati mengevaluasi Peraturan Desa dan setuju, maka peraturan Desa tersebut akan ditetapkan. Penetapan Peraturan Desa paling lama adalah Desember akhir.

2.1.9.3 Tahap Pelaksanaan Keuangan Desa

Pelaksanaan keuangan desa secara umum merupakan proses penerimaan pada pendapatan, pengeluaran pada belanja desa, maupun pembiayaan. Penerimaan dan pengeluaran desa termuat dalam Rekening Kas Desa (RKD) sebagai media dalam melaksanakan keuangan desa. RKD dalam

Peraturan Kepala Daerah disebutkan sebagai tempat penyimpanan uang kas desa yang berada pada bank.

Dalam pendapatan desa, terdapat pendapatan asli desa, pendapatan transfer, dan pendapatan lain-lain. Pendapatan Asli Desa yang kemudian disebut PADes mempunyai jenis dalam pelaksanaannya. Pertama melalui dana tunai, yaitu dana yang diterima secara langsung oleh pihak penerima dana dan akan dibuatkan tanda penerimaan sebagai bukti yang sah oleh bendahara. Kedua, masyarakat dapat menyetorkan dana langsung ke RKD pada bank yang sudah ditunjuk lalu menyerahkan bukti penyetoran ke bendahara desa. Ketiga, penerimaan yang berasal dari swadaya, partisipasi masyarakat, dan gotong royong. Pada prinsipnya akan sama dengan penerimaan dana tunai. Penerimaan dana dari swadaya, partisipasi masyarakat, dan gotong royong dapat berupa barang, uang, dan tenaga. Jika yang diserahkan adalah barang atau tenaga sebagai jasa, maka barang yang sudah dikumpulkan atau jasa yang sudah diberikan masyarakat dapat langsung disetorkan ke pelaksana kegiatan dengan meminta tanda bukti penerimaan. Pelaksana kegiatan akan mengonversikan ke nilai rupiah tertentu berdasarkan harga pasar atau RAB yang telah ditetapkan. Dalam hal yang diterima adalah uang, maka mempunyai prinsip yang sama dengan penerimaan dana tunai.

Pendapatan transfer desa (PTD) dapat berupa Dana Desa yang berasal dari pusat, Alokasi Dana Desa (ADD) dan dana Bagi Hasil Pajak Dan Retribusi (BHPR) yang peraturannya berasal dari kabupaten, dan dana bantuan baik dari pemerintah pusat, provinsi, dan kabupaten. Dalam PDT berbentuk dana desa, akan dilaksanakan secara bertahap sesuai PMK Nomor 225 Tahun 2017. Peraturan tersebut menyebutkan bahwa dana desa akan disalurkan melalui tiga

tahap, yaitu tahap pertama sebesar 20% dengan maksimal pencairan adalah bulan juni minggu kedua, tahap kedua sebesar 40% dengan maksimal pencairan pada bulan juni minggu keempat, dan tahap ketiga sebesar 40% dengan pencairan dimulai pada bulan juli. ADD dan BHPR juga akan dibagikan secara bertahap, namun melalui peraturan daerah terkait.

Pelaksanaan keuangan terhadap belanja pada awalnya harus menetapkan RAB bersama RKP desa dalam proses perencanaan dan penyusunan karena dalam melakukan pengeluaran anggaran harus diketahui batas-batas anggaran dan maksimal pengeluarannya terhadap suatu belanja. Pengeluaran anggaran tersebut harus melalui pengajuan Surat Permintaan Pembayaran (SPP). SPP merupakan dokumen untuk melakukan pencairan dana terhadap pelaksanaan suatu belanja. Dalam menerbitkan SPP harus melakukan verifikasi ke sekdes dan kemudian disetujui oleh kepala desa lalu dicairkan oleh bendahara desa. Terdapat dua cara untuk melaksanakan pembayaran dalam proses pengeluaran kas oleh bendahara desa, yaitu melalui pembayaran dengan panjar dan tanpa panjar. Uang panjar adalah uang yang telah disediakan untuk melaksanakan kegiatan.

Pembayaran dengan panjar maka cirri utamanya terdapat pada pelaksanaan kegiatan. Maksudnya adalah uang yang diterima akan segera dibayarkan dalam suatu kegiatan atau pelaksanaan belanja tanpa tersedia barang atau jasanya terlebih dahulu. Oleh sebab itu, sangat dibutuhkan bukti-bukti pengeluaran bahwa uang yang telah dikeluarkan dapat dipertanggung jawabkan sepenuhnya. Dalam suatu hal kegiatan telah selesai dan uang panjar masih ada, maka uang panjar akan dikembalikan ke kas desa melalui bendahara desa. Pembayaran tanpa uang panjar tidak menyaratkan barang dan jasa sudah

ada terlebih dahulu. Hal ini sangat baik jika dilakukan karena uang hanya cukup untuk pembayaran tanpa ada kelebihan uang panjar. Hal tersebut akan mengurangi penyimpangan uang panjar kegiatan.

Pelaksanaan keuangan dalam pembiayaan desa menyangkut uang yang akan diterima kembali setelah uang tersebut dikeluarkan pada tahun anggaran berjalan ataupun pada tahun anggaran sebelumnya. Sisa Lebih Perhitungan Anggaran Tahun Sebelumnya (SILPA) dan dana cadangan desa, penggunaan dan pengalokasiannya harus terlebih dahulu melalui musyawarah desa. Dalam melaksanakan penyertaan modal, pejabat yang mengajukan adalah Kepala Urusan Keuangan dengan menyertakan SPP pembiayaan. Setelah mengajukan SPP pembiayaan, maka akan ditindak lanjuti oleh bendahara desa dan akan di sah kan oleh Kepala Desa. Setelah mendapat persetujuan, Bendahara Desa akan melakukan penyertaan modal terhadap usaha desa maupun pada pihak ketiga, atau sebagai dana cadangan.

2.1.9.4 Penatausahaan Keuangan Desa

Proses dalam penatausahaan pendapatan desa membutuhkan pencatatan transaksi dalam bentuk pembukuan, yaitu Buku Kas Umum, Buku Rincian Pendapatan, dan Buku Bank Desa yang dicatat oleh bendahara. Pelaksana kegiatan akan mencatat transaksi jika terdapat pendapatan yang berasal dari masyarakat, yaitu berupa swadaya, partisipasi masyarakat, dan gotong royong yang merupakan dana dari masyarakat dalam Buku Kas Pembantu Kegiatan.

Perlakuan pendapatan yang diterima secara tunai adalah pencatatan langsung ke Buku Kas Umum sekaligus bendahara membuat kwitansi penerimaan. Jika diterima dari transfer, maka bendahara akan melihat RKD di

bank dengan nota kredit akan diterbitkan oleh bank. Setelah mendapat nota kredit tersebut, bendahara akan mencatat penerimaan di Buku Bank Desa. Pendapatan yang berasal dari swadaya, partisipasi masyarakat, dan gotong royong dapat berbentuk tunai, barang atau jasa, bahkan tenaga. Bentuk tersebut akan dicatat oleh bendahara dan pelaksana kegiatan. Dalam hal berbentuk barang atau jasa dan tenaga, pelaksana kegiatan akan melakukan konversi ke nilai rupiah tertentu yang akan dicatat dalam Buku Kas Pembantu Kegiatan, dan jika berbentuk tunai akan dicatat dalam Buku Kas Umum Desa. Buku Pembantu Rincian Pendapatan merupakan buku yang menjelaskan keterangan atau informasi yang ada dalam pendapatan desa untuk memudahkan penyusunan Laporan Realisasi Anggaran desa tahun bersangkutan. Dalam informasi tersebut dijelaskan asal dan klasifikasi pendapatan.

Ketika APBDes disetujui dan akan dibelanjakan, pelaksana kegiatan mengajukan pendanaan kegiatan ke bendahara. Pengajuan pelaksanaan kegiatan tersebut terlampir dalam formulir RAB dan dana akan dicairkan melalui SPP oleh bendahara melalui RKD. SPP yang sudah disetujui oleh Kepala Desa akan dicairkan oleh Bendahara Desa. Selain pencatatan dilaksanakan dalam Buku Kas Umum Desa dan Buku Bank Desa, terdapat dokumen yang bernama Buku Kas Pembantu Kegiatan. Buku Kas Pembantu Kegiatan merupakan dokumen yang menyajikan informasi pendanaan pelaksanaan belanja oleh pelaksana kegiatan dan informasi penerimaan dana panjar oleh Bendahara Desa. Terdapat pula Buku Pembantu Pajak yang akan mencatat penerimaan kas dari potongan pajak serta pengeluarannya sebagai setoran pajak ke daerah. Penatausahaan pembiayaan meliputi dua jenis, yaitu penerimaan dan pengeluaran pembiayaan. Dalam hal penerimaan pembiayaan akan sama

dengan pendapatan pada umumnya,yaitu secara tunai dan transfer. Pada pengeluaran pembiayaan pun mempunyai kesamaan prinsip pada belanja

Selain Buku Kas Umum Desa dan Buku Bank Desa, masih terdapat Buku Pembantu Rincian Pembiayaan sebagai pengendali atas pelaksanaan kegiatan pembiayaan.Buku Pembantu Rincian Pembiayaan juga dapat digunakan untuk mencatat berbagai informasi dan klasifikasi pembiayaan supaya dapat mempermudah penyusunan laporan keuangan.

2.1.9.5 Pelaporan dan Pertanggungjawaban Keuangan Desa

Peraturan terbaru dari kemendagri menyebutkan bahwa dalam pelaporan keuangan tersusun atas Laporan Pelaksanaan APBDes (LPA) dan Laporan Realisasi Kegiatan (LRK). Kedua laporan tersebut diserahkan oleh Kepala Desa kepada Bupati melalui kecamatan. Laporan Pelaksanaan APBDes (LPA) adalah laporan yang menunjukkan anggaran dan realisasinya, serta terdapat penjelasan mengenai sumber dana tersebut. LRK adalah laporan yang menyajikan rencana kegiatan yang akan dilaksanakan. LPA dan LRK adalah laporan yang menyajikan rencana kegiatan yang akan dilaksanakan. LPA dan LRK akan dikombinasi sehingga penyebutan kedua laporan selanjutnya hanya LPA. LPA terbagi dalam semester, yaitu Semester I adalah pelaporan seluruh sumber dan penggunaan dana dalam semester pertama dengan batas waktu penyampaian laporan adalah bulan juli minggu kedua LPA. Semester II merupakan laporan keseluruhan selama satu tahun pada tahun berjalan dengan batas penyampaian adalah bulan Januari tahun berikutnya LPA akan diserahkan ke kabupaten melalui kecamatan.

Laporan pertanggungjawaban yang dimaksud adalah Laporan Pertanggungjawaban Realisasi APBDes yang dibuat pada akhir masa anggaran dengan batas waktu penyampaian tiga bulan setelah akhir masa

anggaran. Laporan tersebut disampaikan oleh Kepala Desa kepada kabupaten melalui kecamatan yang telah ditetapkan dengan peraturan desa.

Peraturan Desa dalam laporannya akan dilampirkan laporan keuangan yang terdiri dari Laporan Realisasi APBDes (LRA) dan Catatan atas Laporan Keuangan (CaLK), Laporan Realisasi Kegiatan (LRK), dan daftar program yang masuk ke desa dan telah dilaksanakan yang melibatkan secara sektoral, program daerah, dan lain sebagainya. Penyebutan yang biasa digunakan dalam laporan LRA adalah Laporan Realisasi APBDes. Laporan Realisasi Kegiatan (LRK) hampir sama dengan program untuk sektoral, daerah, dan lainnya yang digunakan oleh desa.

2.1.9.6 Pengawasan Keuangan Desa

Pada dasarnya, pengawasan keuangan desa bukan bagian dari pengelolaan keuangan desa. Namun demikian, saat ini desa mengelola dana yang cukup besar sehingga memungkinkan berbagai pihak untuk melakukan pengawasan terhadap pengelolaan keuangan desa supaya tidak terjadi penyimpangan anggaran oleh pemerintah desa. Masyarakat akan mengawasi penyelenggaraan pemerintah desa dan pembangunan desa. BPD akan mengawasi kinerja pemerintah desa. Kecamatan mengawasi pada fasilitas kegiatan desa. APIP akan mengawasi keuangan, asset, dan penyelenggaraan pemerintah desa. BPK mengawasi pengelolaan keuangan Negara melalui desa.

Pengawasan yang dilakukan oleh kabupaten dalam inspektorat dilakukan dengan melaksanakan audit keuangan. Audit keuangan secara defenisi adalah audit yang dilakukan pada bagian keuangan tertentu yang berkaitan dengan APBN/D dalam pelaksanaan keuangan penyelenggaraan pemerintah desa. Audit

tersebut dapat memberi informasi tentang keyakinan yang memadai pada pengelolaan keuangan bahwa sudah tepat sasaran dan reliable.

2.2 Penelitian Terdahulu

Penelitian terdahulu merupakan acuan untuk penelitian selanjutnya, yang mana penelitian-penelitian tersebut digunakan untuk membandingkan hasil penelitiannya. Adapun beberapa penelitian terdahulu yang menjadi landasan dalam melakukan penelitian ini diantaranya disajikan dalam bentuk table 2.1 berikut:

Tabel 2.1
Penelitian Terdahulu

No	Nama Peneliti	Judul Penelitian	Hasil penelitian
1	Addina Marizka (2010)	Analisis Kinerja Pengelolaan Anggaran Pendapatan Dan Belanja Daerah Pemerintah Kota Medan.	Pemerintah kota medan dalam merealisasikan pajak daerah pada tahun 2003 sampai 2007 dapat dikatakan efektif dan efisien dan pertumbuhan pendapatan menunjukkan pertumbuhan yang positif. Pada tahun 2003 sampai tahun 2007 pemerintah kota medan masih bergantung pada pemerintah pusat sehingga penyelenggaraan desentralisasi masih rendah. Dalam merealisasikan anggaran belanja dapat dikatakan efisien dan pertumbuhan belanja menunjukkan pertumbuhan yang positif yang diimbangi dengan pertumbuhan pendapatan. Pada

			pembiayaan, adanya perkembangan SILPA yang bersaldo positif menunjukkan kesehatan fiskal.
2	Harnita (2013)	Analisis pendapatan asli daerah terhadap belanja daerah di kabupaten rokan hulu	Pendapatan asli daerah berpengaruh signifikan terhadap belanja daerah, dan hubungan antara pendapatan asli daerah dan belanja daerah lemah dikarenakan masih banyak faktor lain yang mempengaruhi belanja daerah.
3	M. syari faidar (2014)	Analisis pendapatan asli desa terhadap pembangunan pada desa sangkir indah	Secara parsial menunjukkan bahwa Variable kebun desa, UED-SP,PLTD, dan retribusi agen sawit tidak berpengaruh signifikan terhadap pembangunan, sedangkan secara simultan keempat variable juga tidak berpengaruh signifikan terhadap pembangunan.
4	Aprisilia Ristia kaeng (2015)	Analisis Pendapatan Asli Daerah Untuk Belanja Daerah Pada Pemerintah Kota Tomohon	Pemerintah kota tomohon belum mampu mengelola dan mengoptimalkan pendapatan asli daerahnya, sehingga masih sangat bergantung pada bantuan pemerintah berupa dana transfer/dana perimbangan dari pemerintah pusat.
5	Suhairi (2016)	Analisis pendapatan desa terhadap belanja desa pada desa kepayang kecamatan	Pendapatan desa sangat berpengaruh signifikan terhadap belanja desa pada desa kepayang kecamatan kepenuhan hulu.

		kepenuhan hulu	
6	Yanti (2016)	Pengaruh pendapatan asli daerah, dana perimbangan, dan lain-lain pendapatan yang sah terhadap belanja daerah di kota cimahi tahun anggaran 2005-2014	Pendapatan asli daerah, dana perimbangan, dan lain-lain pendapatan yang sah mempunyai pengaruh yang signifikan terhadap belanja daerah.
7	Ummu habibah (2017)	Analisis pengaruh pendapatan asli desa (PADes), dana desa (DD), alokasi dana desa (ADD), dan bagi hasil pajak dan retribusi terhadap belanja desa bidang pendidikan	Hasil pengujian secara simultan menunjukkan bahwa variabel PADes, DD, ADD, dan BHPR berpengaruh secara signifikan terhadap belanja desa bidang pendidikan. Dengan uji F sebesar 0,042 lebih kecil dari 0,05 yang berarti variabel independen tersebut berpengaruh signifikan terhadap variabel belanja desa bidang pendidikan. Berdasarkan pengujian secara parsial variabel PADes, ADD, dan BHPR tidak berpengaruh secara signifikan terhadap belanja desa bidang pendidikan. Sementara variabel DD berpengaruh secara signifikan terhadap belanja desa bidang pendidikan. Yang berarti dimana belanja desa bidang pendidikan diperoleh dari alokasi yang berasal dari DD.
8	Alfin nova safitri (2019)	Pengaruh Kontribusi Pendapatan Asli	Pajak daerah tidak berpengaruh terhadap anggaran pendapatan

		Daerah Terhadap Anggaran Pendapatan Belanja Daerah (PAD) Di Kabupaten Trenggalek	belanja daerah pemerintah kabupaten trenggalek selama 24 (dua puluh empat) bulan dari tahun 2017-2018.
9	Novemia Nanda Yuliawati (2019)	Pengaruh alokasi dana desa (ADD), dana desa (DD), pendapatan asli desa (PADes), dan bantuan keuangan APBD terhadap belanja desa bidang pembangunan desa	alokasi dana desa berpengaruh signifikan terhadap belanja desa bidang pembangunan desa. Dana desa berpengaruh signifikan terhadap belanja desa bidang pembangunan desa, sedangkan pendapatan asli desa tidak berpengaruh signifikan terhadap belanja desa bidang pembangunan desa, dan bantuan keuangan APBD berpengaruh secara signifikan terhadap belanja desa bidang pembangunan desa.

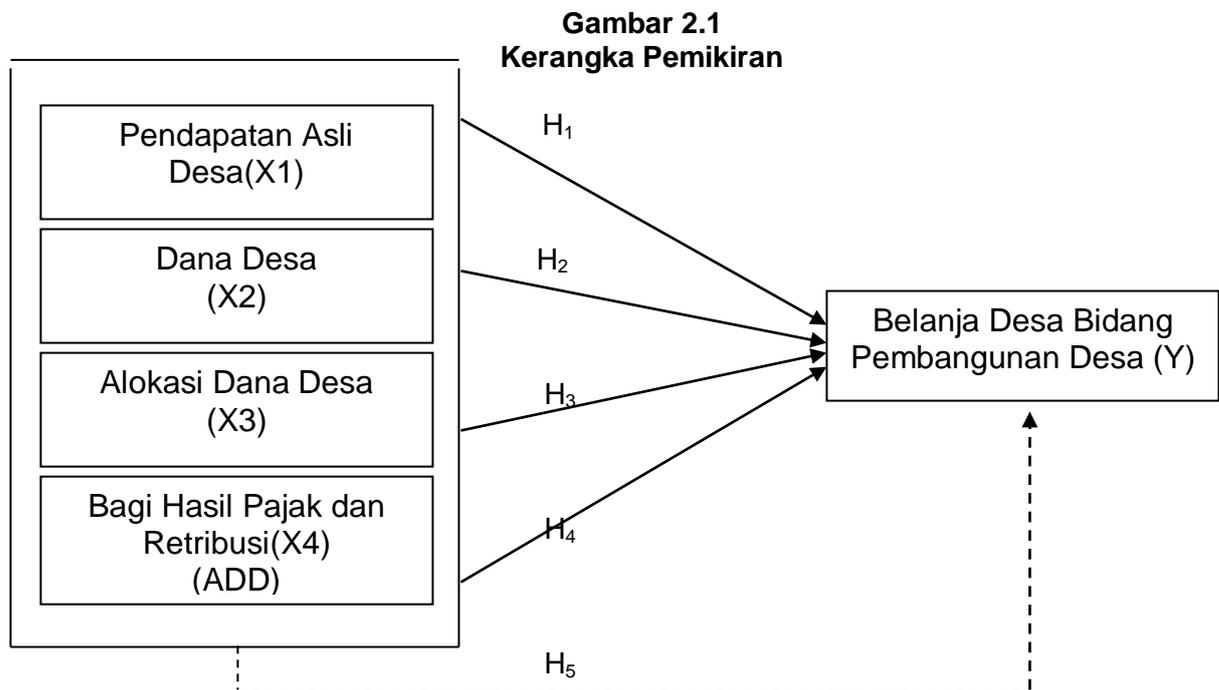
10	Yani Rizal (2019)	Pengaruh pendapatan asli daerah terhadap belanja modal di kota langsa	Dari hasil uji t dapat dijelaskan bahwa PAD berpengaruh secara signifikan terhadap belanja modal di kota langsa. Dimana diperoleh $t\text{-hitung} > t\text{-tabel}$ ($1,986 > 1,833$). Dari analisis koefisien determinasi diketahui bahwa pendapatan asli daerah mempengaruhi belanja modal kota langsa sebesar 40,6% sedangkan sisanya 59,4% dipengaruhi oleh variabel lain diluar model penelitian ini.
----	----------------------	---	---

Sumber: Hasil Review Penelitian Terdahulu, 2020

2.3 Kerangka Pemikiran

Pendapatan desa merupakan pendapatan yang berasal dari dana desa, bagi hasil pajak dan retribusi, alokasi dana desa, bantuan keuangan provinsi. Semakin besar pendapatan yang diterima suatu desa, akan menentukan tingkat kemampuan keuangannya untuk membiayai belanja desa program pembangunan desa dalam rangka penyelenggaraan pemerintah desa.

Kerangka pemikiran menjelaskan argumentasi secara logis keterkaitan antar variabel yang akan diteliti didasarkan pada teori-teori yang menjadi rujukan. Dalam kerangka pemikiran ini akan dijelaskan mengenai keberadaan variabel yang akan dijadikan sebagai dimensi penelitian yaitu pendapatan desa dan belanja desa program pembangunan desa. Kerangka pemikiran dapat dilihat pada gambar di bawah ini :



Sumber: Ummu Habibah (2017)

2.4 Hipotesis

Berdasarkan kerangka pemikiran diatas, hipotesis yang akan diuji dalam penelitian ini adalah pengaruh Pendapatan Desa Terhadap Belanja Desa Program Pembangunan Pada Desa Pulau Baru Kecamatan Kuantan Hilir Seberang Kabupaten Kuantan Singingi sebagai berikut:

2.4.1 Pengaruh Pendapatan Asli Desa (PADes) Terhadap Belanja Desa Program Pembangunan

Pendapatan asli desa (PADes) adalah pendapatan yang berasal dari kewenangan desa berdasarkan hak asal usul dan kewenangan skala lokal desa. PADes merupakan pendapatan yang dihasilkan oleh usaha-usaha desa, hasil kekayaan desa, hasil swadaya dan partisipasi, hasil gotong royong dan lain-lain pendapatan asli desa yang sah. Semakin besar PADes yang diperoleh

memungkinkan desa dapat memenuhi kebutuhan belanja desanya sendiri dengan tidak menunggu bantuan dari pemerintah pusat. Begitu pula sebaliknya semakin rendah PADes yang diperoleh suatu desa maka desa tidak dapat memenuhi seluruh belanja desanya yang akibatnya akan bergantung kepada pemerintah pusat. Berdasarkan teori-teori penghubung di atas, maka dapat disimpulkan PADes berpengaruh signifikan terhadap belanja desa bidang pembangunan desa.

Berdasarkan pemaparan tersebut, maka ditarik hipotesis:

H₁: Pendapatan asli desa (PADes) secara parsial berpengaruh signifikan terhadap belanja desa bidang pembangunan desa.

2.4.2 Pengaruh Dana Desa (DD) terhadap Belanja Desa Bidang Pembangunan Desa

UU No. 6 Tahun 2014 menjelaskan desa akan mendapatkan DD yang diperoleh sebesar 10% dari APBN yang akan menambah penerimaan tiap masing masing desa dengan jumlah yang berbeda-beda. Penggunaan DD diprioritaskan untuk membiayai pembangunan dan pemberdayaan masyarakat agar nantinya bisa meningkatkan kesejahteraan masyarakat desa. Tujuan diberikannya DD adalah meningkatkan kesejahteraan masyarakat desa dan kualitas hidup masyarakat desa serta penanggulangan kemiskinan desa melalui peningkatan pelayanan publik di desa, memajukan perekonomian desa, mengatasi kesenjangan pembangunan antar desa serta memperkuat masyarakat desa sebagai subyek dari pembangunan. Semakin besar DD yang diterima suatu desa maka tingkat ketergantungan dalam membiayai kewenangan desa semakin tinggi. Berdasarkan teori-teori penghubung di atas, maka dapat disimpulkan DD berpengaruh signifikan terhadap belanja desa bidang pembangunan desa.

Berdasarkan pemaparan tersebut, maka ditarik hipotesis:

H₂: Dana Desa (DD) secara parsial berpengaruh signifikan terhadap belanja desa bidang pembangunan desa

2.4.3 Hubungan ADD terhadap Belanja Desa Bidang Pembangunan Desa

Wijaya (2018:63) menyatakan pemerintah daerah kabupaten atau kota sesuai dengan amanat Undang Undang wajib mengalokasikan ADD ke dalam APBD kabupaten/kota setiap tahun anggaran, ADD merupakan bagian dari dana perimbangan yang diterima oleh pemerintah daerah kabupaten/kota paling sedikit 10% setelah dikurangi dana alokasi khusus. ADD tersebut akan mendorong terlaksananya otonomi desa, sekaligus sebagai upaya pemberdayaan pemerintahan desa dan masyarakat desa. Pemerintahan provinsi dan pemerintahan kabupaten sebagai fasilitator, memfasilitasi masyarakat desa agar mampu menjalankan fungsi perencanaan, pelaksanaan, dan pengawasan terhadap penggunaan ADD yang diterimanya (Hanif, 2011). Semakin besar ADD yang diterima suatu desa maka tingkat ketergantungan dalam membiayai pengeluaran desa semakin tinggi. Berdasarkan teori-teori penghubung di atas, maka dapat disimpulkan ADD berpengaruh secara signifikan terhadap belanja desa bidang pembangunan desa.

Berdasarkan pemaparan tersebut, maka ditarik hipotesis:

H₃: Alokasi dana desa secara parsial berpengaruh signifikan terhadap belanja desa bidang pembangunan desa.

2.4.4 Hubungan BHPR terhadap Belanja Desa Bidang Pembangunan Desa

Undang-Undang No. 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah memaparkan bagian hasil pajak dan retribusi (BHPR) dialokasikan sebesar 60% secara merata dan 40% secara proposional dari realisasi pajak dan retribusi masing-masing daerah. Pemerintah juga mengalokasikan BHPR kepada desa paling sedikit 10% untuk desa di wilayahnya, dengan memperhatikan aspek

pemerataan dan potensi desa serta penggunaan ditetapkan sepenuhnya oleh desa penerima. Berdasarkan teori-teori penghubung di atas, maka dapat disimpulkan BHPR berpengaruh signifikan terhadap belanja desa bidang pembangunan desa.

Berdasarkan pemaparan tersebut, maka ditarik hipotesis:

H₄: Bagi hasil pajak dan retribusi secara parsial berpengaruh signifikan terhadap belanja desa bidang pembangunan desa.

2.4.5 Hubungan PADes, DD, ADD dan BHPR terhadap Belanja Desa Bidang Pembangunan Desa

Belanja desa bidang pembangunan digunakan untuk membiayai pelaksanaan program dan kegiatan pembangunan desa yang ditujukan untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat desa, peningkatan kualitas hidup manusia serta penanggulangan kemiskinan (Bastian, 2015). Semakin besar pengeluaran anggaran dalam belanja pembangunan maka akan menurun angka kemiskinan. Semakin besarnya alokasi belanja desa bidang pembangunan diharapkan mampu menekan angka kemiskinan sehingga angka kemiskinan akan menurun. Berdasarkan teori di atas, maka dapat disimpulkan PADes, DD, ADD, dan BHPR secara bersama sama atau simultan berpengaruh signifikan terhadap belanja desa bidang pembangunan desa.

Berdasarkan pemaparan tersebut, maka ditarik hipotesis:

H₅: PADes, DD, ADD, dan BHPR secara simultan berpengaruh signifikan terhadap belanja desa bidang pembangunan desa.

BAB III METODE PENELITIAN

3.1 Rancangan Penelitian

Penelitian ini adalah penelitian kausal yang bertujuan menjelaskan fenomena dalam bentuk pengaruh dengan menggunakan pendekatan deskriptif kuantitatif. Menurut Sugiono (2018:37), hubungan kausal adalah hubungan yang bersifat sebab akibat antara variabel independen (variabel yang mempengaruhi) dan variabel dependen (variabel yang dipengaruhi). Penelitian kausal merupakan tipe penelitian dengan karakteristik masalah berupa hubungan sebab akibat antar dua variabel atau lebih (Indriantoro dan Supomo, 1999:27). Penelitian dengan judul analisis pengaruh pendapatan asli desa (PADes), dana desa (DD), alokasi dana desa (ADD), dan bagi hasil pajak dan retribusi (BHPR) terhadap belanja desa bidang pembangunan desa pada desa pulau baru kecamatan Kuantan Hilir Seberang Kabupaten Kuantan Singingi, variabel bebas/independen pada penelitian ini adalah pendapatan asli desa (X_1), dana desa (X_2), alokasi dana desa (X_3), bagi hasil pajak dan retribusi (X_4) sedang kan variabel terikat/dependen pada penelitian ini adalah belanja desa bidang pembangunan desa (Y).

3.2 Tempat dan Waktu Penelitian

3.2.1 Tempat Penelitian

Penelitian ini dilakukan pada Desa Pulau Baru Kecamatan Kuantan Hilir Seberang Kabupaten Kuantan Singingi.

3.2.2 Waktu Penelitian

Tabel 3.1
Waktu Penelitian

No	Keterangan	2020								
		Feb	Mar	Apr	Mei	Jun	Jul	Ags	Sep	Okt
1	Judul diterima									
2	Melakukan penelitian dan bimbingan									
3	Ujian proposal									
4	Revisi proposal									
5	Pengumpulan data									
6	Bimbingan skripsi									
7	Ujian komprehensif									

Sumber: Modifikasi Peneliti Tahun, 2020

3.3 Populasi dan Sampel

3.3.1 Populasi

Menurut Sugiyono (2015:167) "Populasi merupakan keseluruhan objek atau subjek yang berada pada suatu wilayah dan memenuhi syarat-syarat tertentu berkaitan dengan masalah penelitian atau keseluruhan unit atau individu dalam ruang lingkup yang akan diteliti". Berdasarkan pendapat diatas, maka yang menjadi populasi dalam penelitian ini adalah Data Laporan Realisasi Anggaran(LRA) Pemerintah Desa Pulau Baru Kecamatan Kuantan Hilir Seberang Tahun 2015 Sampai 2018.

3.3.2 Sampel

Menurut Sugiyono (2015:168) “Sampel merupakan bagian dari populasi yang memiliki ciri-ciri atau keadaan tertentu yang akan diteliti. Teknik Pengambilan Sampel yang dipakai adalah Purposive Sampling, yaitu cara pengambilan sampel dimana pengambilan elemen elemen yang dimasukkan dalam sampel dilakukan dengan sengaja, dengan catatan sampel tersebut adalah *representative* atau mewakili sampel. sampel dapat didefinisikan sebagai anggota populasi yang dipilih dengan menggunakan prosedur tertentu sehingga diharapkan dapat mewakili populasi”. Sampel dalam penelitian ini adalah Pendapatan Asli Daerah, Dana Desa, Alokasi Dana Desa, Bagi Hasil Pajak dan Retribusi, dan Belanja Desa Bidang Pembangunan Desa dalam Laporan Realisasi Anggaran Pemerintah Desa Pulau Baru Kecamatan Kuantan Hilir Seberang Tahun 2015 Sampai 2018 yaitu tahun anggaran 4 tahun terakhir.

3.4 Jenis dan Sumber Data

3.4.1 Jenis Data

Jenis data yang digunakan dalam penelitian ini adalah data kuantitatif. Menurut Sugiyono (2015 : 12) jenis data terbagi dua macam yaitu: data kualitatif adalah yang berbentuk deksriptif atau uraian lain dan pengukurannya tidak dapat menggunakan skala numerik, data kuantitatif adalah data yang berbentuk angka atau bilangan. Sehingga untuk bisa dilakukan pemrosesan statistik, bentuk penelitian Kuantitatif harus disajikan dalam angka- angka.

3.4.2 Sumber Data

Sumber data dalam penelitian ini bersumber dari data sekunder. Menurut Sugiyono (2015:14) bahwa data sekunder adalah “sumber data yang diperoleh dengan membaca, mempelajari dan memahami melalui media lain yang

bersumber dari literatur, buku-buku, serta dokumen resmi yang dikeluarkan oleh dinas terkait". Peneliti menggunakan data sekunder karena peneliti mengumpulkan informasi dari data yang telah diolah oleh pihak yang berwenang dalam bentuk dokumen seperti laporan realisasi anggaran dan data lain yang diperlukan dalam penelitian.

3.5 Teknik Pengumpulan Data

Teknik pengumpulan data merupakan langkah yang paling strategis dalam penelitian, karena tujuan utama dari penelitian adalah mendapatkan data. Dalam usaha pengumpulan data serta keterangan yang diperlukan dalam penelitian ini, peneliti menggunakan metode sebagai berikut:

1. Teknik Dokumentasi

Menurut Sugiyono (2013:240) "Dokumen merupakan catatan peristiwa yang sudah berlalu". Jadi penulis juga melakukan pengumpulan informasi dari data akuntansi, dokumen-dokumen dan catatan seperti laporan realisasi anggaran dan data lainnya yang diperlukan pada pemerintahan desa Pulau Baru Kecamatan Kuantan Hilir Seberang.

2. Kepustakaan

Adalah sumber data yang diperoleh dari buku-buku yang menjadi kajian pustaka dalam sebuah penelitian (Pasalong 2012: 137). Kepustakaan yang digunakan dalam penelitian ini berupa teori tentang Kinerja Belanja Desa dalam Laporan Realisasi Anggaran (LRA) Pemerintah Desa Pulau Baru Kecamatan Kuantan Hilir Seberang.

3.6 Defenisi Operasional Variabel

3.6.1 Variabel Penelitian

Dalam penelitian ini variabel-variabel penelitian ini diklasifikasikan menjadi 2 kelompok, yaitu variabel terikat (dependent variable), variabel bebas (independent variable). Variabel dependen pada penelitian ini adalah Belanja

Desa Bidang Pembangunan (Y) dan yang menjadi variabel independen adalah Pendapatan Asli Desa (X_1), Dana Desa (X_2), Alokasi Dana Desa (X_3), Bagi Hasil Pajak dan Retribusi (X_4).

1. Variabel Dependen (Y) Adalah Belanja Desa Bidang Pembangunan Desa.

Belanja desa adalah semua pengeluaran dari rekening desa yang merupakan kewajiban desa dalam 1 (satu) tahun anggaran yang tidak akan diperoleh pembayarannya kembali oleh desa. Belanja desa dipergunakan dalam rangka mendanai penyelenggaraan kewenangan desa (Peraturan Menteri Dalam Negeri, 2014: 113).

Pembangunan desa adalah Upaya peningkatan kualitas hidup dan kehidupan untuk sebesar-besarnya kesejahteraan masyarakat desa (Permendes, Pembangunan Daerah Tertinggal, Dan Transmigrasi Nomor 3 Tahun 2015 Tentang Pendamping Desa, Pasal 1 ayat 9).

2. Variabel Independen (X_1) Adalah Pendapatan Asli Desa

Menurut Undang-Undang No 6 Tahun 2004 Pendapatan Asli Desa adalah pendapatan yang berasal dari kewenangan desa berdasarkan hak asal usul dan kewenangan skala lokal desa. Terdiri dari usaha-usaha desa, hasil kekayaan desa, swadaya dan partisipasi, hasil gotong royong dan lain-lain pendapatan asli desa yang sah.

3. Variabel Independen (X_2) Adalah Dana Desa

Menurut Undang-Undang No 6 Tahun 2004 Dana Desa adalah dana yang dialokasikan dalam APBN, yang diperuntukkan untuk desa dan digunakan untuk membiayai penyelenggaraan pemerintahan, pelaksanaan pembangunan, pembinaan masyarakat, dan pemberdayaan masyarakat. Dana Desa (DD)

diperoleh sebesar 10% dari Anggaran Pendapatan Belanja Negara (APBN), dimana kucuran DD itu tidak melewati perantara melainkan langsung ke desa. Walaupun pada prakteknya, DD tersebut disalurkan melalui kabupaten/kota sebagai bentuk pengawasan. Tetapi jumlah nominal DD berbeda-beda untuk tiap-tiap desa. Alokasi APBN yang sebesar 10% nanti akan menambah penerimaan desa.

4. Variabel Independen (X_3) Adalah Alokasi Dana Desa

Menurut Hanif Nurcholis, 2011 Alokasi Dana Desa adalah perolehan bagian keuangan desa yang dari kabupaten yang penyalurannya melalui kas desa, yang digunakan untuk membiayai program pemerintah desa dalam melaksanakan kegiatan penyelenggaraan pemerintahan dan pembangunan serta pemberdayaan masyarakat. Alokasi Dana Desa (ADD) merupakan substansi baru didalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa (APBDes) untuk mendukung dana rangsangan pembangunan desa dalam pemberdayaan masyarakat dan publik. Besar ADD tersebut berjumlah 30% dialokasikan untuk aparatur pemerintah desa sedangkan 70% digunakan untuk program pemberdayaan masyarakat dan publik.

5. Variabel Independen (X_4) Adalah Bagi Hasil Pajak dan Retribusi

Menurut Undang-Undang No 6 Tahun 2004 Bagi Hasil Pajak Dan Retribusi adalah penerimaan bagi hasil pajak dan retribusi dari pemerintah kabupaten.

3.6.2 Defenisi Operasional

Defenisi operasional adalah penentuan *construct* sehingga menjadi variabel yang dapat diukur. Defenisi operasional menjelaskan cara tertentu yang dapat digunakan oleh peneliti dalam mengoperasionalkan *construct*, sehingga memungkinkan bagi peneliti yang lain untuk melakukan replikasi pengukuran

dengan cara yang sama atau mengembangkan cara pengukuran *construct* yang lebih baik (Indriantoro dan Supomo, 1999:69). Data yang digunakan dalam penelitian ini adalah data laporan realisasi APBDes Desa Pulau Baru tahun 2015 sampai dengan tahun 2018 yang bersumber dari kantor Desa Pulau Baru Kecamatan Kuantan Hilir Seberang Kabupaten Kuantan Singingi. Data tersebut dikumpulkan dengan teknik dokumentasi. Analisis data yang digunakan adalah analisis kuantitatif yang dinyatakan dalam angka-angka. Alat analisis data yang digunakan adalah uji asumsi klasik, regresi linier sederhana, uji hipotesis.

Tabel 3.2
Defenisi Operasional Variabel

Variabel	Defenisi	Indikator
Belanja Desa Bidang Pembangunan Desa (Y)	Pembangunan Desa adalah upaya peningkatan kualitas hidup dan kehidupan untuk sebesar-besarnya kesejahteraan masyarakat desa (undang-undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang desa)	Jumlah Penerimaan Belanja Desa Bidang Pembangunan Desa Tahun 2015-2018 (Data LRA 2015-2018)
Pendapatan Asli Desa (X ₁)	Pendapatan yang berasal dari kewenangan desa berdasarkan hak asal usul dan kewenangan skala local desa. (Undang-Undang No 6 Tahun 2004)	Jumlah Pendapatan Asli Desa Tahun 2015-2018 (Data LRA Tahun 2015-2018)
Dana desa (X ₂)	Dana yang dialokasikan dalam APBN, yang diperuntukkan untuk desa dan digunakan untuk membiayai penyelenggaraan pemerintahan, pelaksanaan pembangunan, pembinaan masarakat, dan pemberdayaan masyarakat.	Jumlah Penerimaan Dana Desa Tahun 2015-2018 (Data LRA Tahun 2015-2018)

	(Undang-Undang No 6 Tahun 2004)	
Alokasi dana desa (X_3)	Perolehan bagian keuangan desa yang dari kabupaten yang penyalurannya melalui kas desa, yang digunakan untuk membiayai program pemerintah desa dalam melaksanakan kegiatan penyelenggaraan pemerintahan dan pembangunan serta pemberdayaan masyarakat. (Hanif Nurcholiz, 2011)	Jumlah Penerimaan Alokasi Dana Desa Tahun 2015-2018 (Data LRA Tahun 2015-2018)
Bagi hasil pajak dan retribusi (X_4)	Penerimaan bagi hasil pajak dan retribusi dari pemerintah kabupaten. (Undang-Undang No 6 Tahun 2004)	Jumlah Penerimaan Bagi Hasil Pajak dan Retribusi Tahun 2015-2018 (Data LRA Tahun 2015-2018)

3.7 Analisis Data

3.7.1 Statistik Deskriptif

Variable dalam penelitian ini dideskripsikan menggunakan analisis statistik deskriptif. Analisis data deskriptif yang disajikan dalam penelitian ini meliputi harga mean (M), Modus (M_o), dan standar Deviasi (SD).

3.8 Uji Asumsi Klasik

Uji asumsi klasik dilakukan untuk memenuhi syarat analisis regresi linier, yaitu penaksiran tidak bias dan terbaik atau sering disingkat BLUE (best linier

unbias estimate). Ada berapa asumsi yang harus terpenuhi agar kesimpulan dari hasil pengujian tidak bias, diantaranya adalah uji normalitas, dan uji heteroskedastisitas.

3.8.1 Uji Normalitas

Uji normalitas adalah sebuah uji yang dilakukan dengan tujuan untuk menilai sebaran data pada sebuah kelompok data atau variabel, apakah sebaran data tersebut berdistribusi normal atau tidak. Kita dapat melihatnya dari *normal probability Plot* yang membentuk suatu garis lurus diagonal, dan plotting data yang akan dibandingkan dengan garis diagonalnya. Jika data menyebar disekitar garis diagonalnya dan mengikuti arah garis diagonalnya atau grafik histogram maka menunjukkan pola distribusi normal. Apabila data jauh dari garis dan tidak mengikuti arah garis diagonalnya maka menunjukkan pola distribusi tidak normal (Ghozali,2013 : 160).

3.8.2 Uji Multikolinearitas

Menurut Imam Ghozali (2011: 105) uji multikoloneritas bertujuan untuk menguji apakah dalam model regresi ditemukan adanya korelasi antar variabel bebas (independen). Model regresi yang baik seharusnya tidak terjadi korelasi di antara variabel independen. Jika variabel independen saling berkorelasi, maka variabel-variabel ini tidak ortogonal. Kemudian, yang dimaksud dengan variabel ortogonal adalah variabel independen yang nilai korelasi antar sesama variabel independennya sama dengan nol. Dikatakan terjadi multikolinieritas jika koefisien korelasi antar variabel bebas lebih besar 0,60, dikatakan tidak terjadi multikolinieritas jika koefisien korelasi antar variabel bebas lebih kecil atau sama dengan 0,60 ($r \leq 0,60$) (Danang Sunyoto, 2007:89).

3.8.3 Uji Heteroskedastisitas

Uji heteroskedastisitas bertujuan untuk menguji apakah dalam model regresi terjadi ketidaksamaan varian dari residual satu pengamatan ke

pengamatan yang lain. Bilamana varian dari residual satu pengamatan ke pengamatan lain tetap maka disebut homokedastisitas dan bilamana berbeda disebut heterokedastisitas. Model regresi yang baik adalah regresi yang bebas dari heterokedastisitas. Pengujian dilakukan dengan melihat gambar plot antar nilai prediksi variabel independen dengan residualnya. Apabila dalam grafik tersebut tidak terdapat pola tertentu yang teratur dan data tersebar secara acak di atas dan di bawah angka 0 pada sumbu Y maka diidentifikasi tidak terdapat heterokedastisitas.

3.8.4 Uji Autokorelasi

Autokorelasi digunakan untuk menguji suatu model apakah antara variabel pengganggu masing-masing variabel bebas saling mempengaruhi. Untuk mengetahui apakah pada model regresi mengandung autokorelasi dapat digunakan pendekatan D-W (Durbin Watson).

Dasar pengambilan keputusan ada tidaknya autokorelasi dengan menggunakan tabel Durbin-Watson (Duwi Priyatno, 2012:173):

1. $DU < DW < 4-DU$ maka H_0 diterima, artinya tidak terjadi autokorelasi
2. $DW < DL$ atau $DW > 4-DL$ maka H_0 ditolak, artinya terjadi autokorelasi
3. $DL < DW < DU$ atau $4-DL < DW < 4-DL$, artinya tidak ada kepastian atau kesimpulan yang pasti.

Nilai DU dan DL diperoleh dari tabel statistic Durbin Watson.

3.9 Pengujian Hipotesis

Pengujian hipotesis adalah suatu prosedur yang akan menghasilkan keputusan menerima atau menolak hipotesis. Uji hipotesis dilakukan untuk mengetahui pengaruh variable bebas terhadap variable terikatnya

3.9.1 Metode Regresi Linier Berganda

Analisis regresi linier berganda adalah hubungan secara linier antara dua atau lebih variabel independen dengan variabel dependen. Analisis ini untuk mengetahui arah hubungan antara variabel independen dan variabel dependen berhubungan positif atau negative dan untuk memprediksi nilai dari variabel dependen apabila variabel independen mengalami kenaikan atau penurunan.

Analisis regresi linier berganda dilakukan dengan cara menetapkan persamaan $Y = a + b_1X_1 + b_2X_2 + b_3X_3 + b_4X_4 + e$

Dengan ketentuan :

Y : belanja desa bidang pembangunan desa

X₁ : pendapatan asli desa

X₂ : dana desa

X₃ : alokasi dana desa

X₄ : bagi hasil pajak dan retribusi

b₁ : nilai koefisien regresi X₁

b₂ : nilai koefisien regresi X₂

b₃ : nilai koefisien regresi X₃

b₄ : nilai koefisien regresi X₄

a : nilai konstanta

e : nilai error

3.9.2 Uji Signifikan Simultan (Uji F)

Uji signifikan simultan atau sering disebut uji F bertujuan untuk melihat pengaruh variabel-variabel bebas secara bersamaan terhadap variabel terikat (ghozali, 2006). pengujian ini dilakukan dengan melihat nilai probabilitas signifikan (sig.) F yang di bandingkan dengan batas signifikansi yang ditetapkan yaitu

sebesar 0,05. Cara yang dilakukan dengan membandingkan nilai F_{hitung} dengan F_{tabel} dengan ketentuan sebagai berikut:

$H_0 = 0$, berarti tidak ada pengaruh pendapatan asli desa, dana desa, alokasi dana desa, dan bagi hasil pajak dan retribusi terhadap belanja desa bidang pembangunan desa secara bersama-sama.

$H_0 > 0$, berarti ada pengaruh pendapatan asli desa, dana desa, alokasi dana desa, dan bagi hasil pajak dan retribusi terhadap belanja desa bidang pembangunan desa secara bersama-sama.

3.9.3 Uji Signifikansi parameter individual (Uji t)

Untuk mengetahui besarnya pengaruh masing-masing variabel independen secara individual (parsial) terhadap variabel dependen. Hasil uji t_{hitung} ini ada pada *output* perangkat lunak, dapat dilihat pada tabel *coefficient level of significance* yang digunakan sebesar 5% atau $(\alpha) = 0,05$. Apabila $t_{hitung} > t_{tabel}$ maka H_0 ditolak dan H_a diterima, artinya variabel independen secara parsial mempunyai pengaruh yang signifikan terhadap variabel dependen.

Apabila $t_{hitung} < t_{tabel}$ maka H_0 diterima dan H_a di tolak, artinya variabel independen secara parsial tidak mempunyai pengaruh yang signifikan terhadap variabel dependen. Analisis ini dapat juga memberikan informasi tentang kontribusi masing-masing variabel independen terhadap variabel dependen dengan melihat r^2 nya. Variabel yang mempengaruhi r^2 terbesar adalah variabel independen yang mempunyai pengaruh dominan. Adapun rumus untuk menentukan nilai t_{hitung} adalah sebagai berikut:

$$t_{hitung} = \frac{\beta - Se}{S\beta}$$

$$S\beta = \frac{Se}{\sqrt{\sum Y^2 - \left(\frac{\sum X}{n}\right)^2}}$$

$$S_e = \frac{\sqrt{\sum Y^2 - \alpha \sum Y - \beta \sum XY}}{(n-2)}$$

Keterangan :

α = konstanta

β = koefisien korelasi

n = jumlah sampel

S_β = kesalahan baku koefisien korelasi

S_e = kesalahan baku estimasi

3.9.4 Uji Koefisien Determinasi (*R square*) dan Koefisien Korelasi (*R*)

Koefisien determinasi adalah salah satu nilai statistik yang dapat digunakan untuk mengetahui apakah ada pengaruh antara dua variabel secara bersama. Nilai koefisien determinasi yang biasanya diberi simbol R^2 menunjukkan hubungan pengaruh variabel independen dan variabel dependen dari hasil perhitungan tertentu dimana besar pengaruh dapat diketahui dari nilai R^2 x 100% (Ghazali, 2013: 97). Nilai Koefisien determinasi adalah diantara Nol dan satu. Jika koefisien determinasi (R^2) = 1, artinya variabel independen memberikan semua informasi yang dibutuhkan untuk memprediksi variasi variabel dependen. Jika koefisien determinasi (R^2) = 0, artinya variabel independen tidak mampu menjelaskan variasi-variasi dependen. Sedangkan koefisien korelasi (*R*) digunakan untuk membandingkan hasil pengukuran dua variabel yang berbeda agar dapat menentukan tingkat hubungan antara variabel variabel ini. Nilai interpretasi nilai *r* dapat dilihat pada tabel berikut :

Tabel 3.3
Interpretasi Nilai R

Besarnya Nilai R	Interpretasi
0,80-1,000	Sangat kuat

0,60-0,799	Kuat
0,40-0,599	Cukup kuat/sedang
0,20-0,399	Rendah
0,00-0,199	Sangat rendah

Sumber :(Arikunto,2010:89)

Kemungkinan-Kemungkinan koefisien korelasi r , maka nilai r dapat bervariasi antara lain :

Jika $r = 0$ atau mendekati 0 maka hubungan antara kedua variabel sangat lemah atau tidak ada hubungan.

Jika $r =$ mendekati 1 maka hubungan kedua variabel kuat positif.

Jika $r =$ mendekati -1 maka hubungan kedua variabel kuat negative

BAB IV

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

4.1 Gambaran Umum Objek Penelitian

4.1.1 Sejarah Singkat Desa Pulau Baru

Desa pulau baru merupakan salah satu desa yang berada di kecamatan kuantan hilir seberang yang dulunya berada di kecamatan kuantan hilir. Setelah terjadi pembentukan kecamatan yang baru yakni kecamatan kuantan hilir seberang Jumlah penduduk Desa Pulau Baru pada saat ini 775 jiwa. Batas wilayah Desa Pulau Baru dengan daerah lain di sekitarnya secara geografis adalah sebagai berikut:

1. Sebelah Utara : Batang Kuantan
2. Sebelah Selatan : Sungai Sorik
3. Sebelah Barat : Pelukahan
4. Sebelah Timur : Tanjung

sistem aparatur desa pulau baru telah beberapa kali bertukar tampuk kepemimpinan desa pulau baru seperti dibawah ini:

Tabel 4.1
Daftar Kepala Desa Pulau Baru

No	Nama	Mulai menjabat	Akhir menjabat	Sekdes	Keterangan
1	Buhari	1987	1998	Abdullah	Periode Pertama
2	Maspar	1998	2002	Hasan Basri	Periode Pertama
3	Nurdin	2002	2007	Busdiar	Periode Pertama
4	Martunus	2007	2012	Yarlis	Periode Pertama
5	Yarlis	2013	2018	Perianto	Periode Pertama
6	Marswandi	2019	sekarang	Rabatius	Kades yang sekarang

Sumber : Data Olahan, 2020

Tabel 4.2
Kelompok Penduduk Berdasarkan Mata Pencaharian

Status Pekerjaan	Jumlah
Petani	450 orang
Pedagang	8 orang
PNS	6 orang
Tukang	12 orang
Guru	13 orang
Bidan/perawat	1 orang
Pensiunan	1 orang

Sumber: Data Desa Pulau Baru, 2019.

Tabel 4.3
Keadaan Sosial

1	SD/ MI	87 orang
2	SLTP/ MTs	25 orang
3	SLTA/ MA	40 orang
4	SI/ Diploma	20 orang
5	Putus Sekolah	20 orang
6	Buta Huruf	43 orang

Sumber : Data Desa Pulau Baru, 2019.

4.1.2 Lembaga Pendidikan

- a. Gedung TK/ PAUD : 1 Buah/ Lokasi di Dusun II RT/RW 06/03
- b. PDTA : - Buah/ Lokasi Dusun -
- c. SD/MI : - Buah/ Lokasi di Dusun II
- d. SLTP/ MTs : - Buah/ Lokasi di Dusun -
- e. Lain-lain : - Buah/ Lokasi di Dusun-

4.1.3 Visi dan Misi Desa Pulau Baru

- a. Visi Desa Pulau Baru

Meningkatkan peran masyarakat dalam segala bidang untuk mewujudkan kehidupan masyarakat yang adil, makmur dan sejahtera.

- b. Misi Desa Pulau Baru

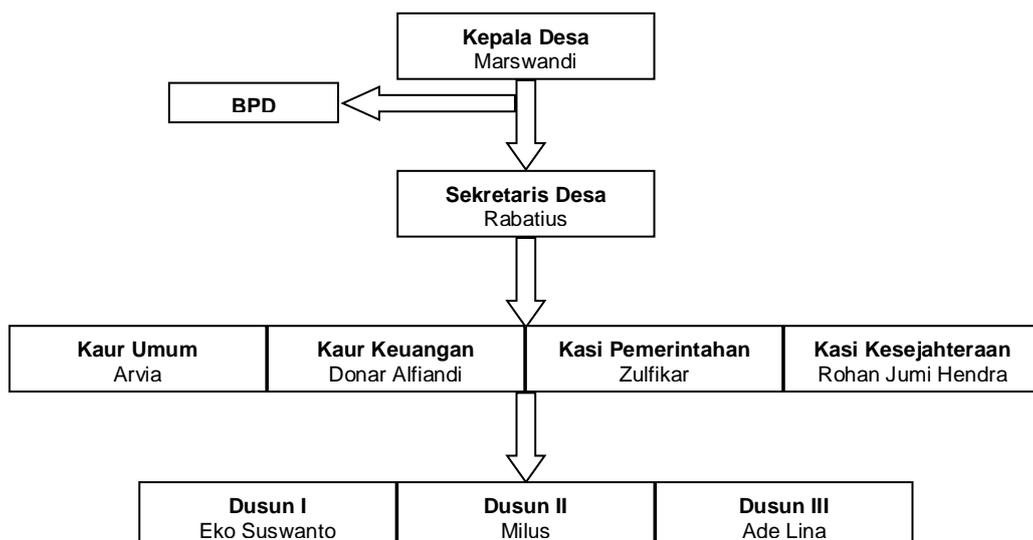
1. Meningkatkan Sumber Daya Manusia (SDM) dalam pembangunan desa yang berkelanjutan.

2. Mengembangkan pemberdayaan masyarakat dan kemitraan dalam membangun desa.
3. Menciptakan rasa aman dan tentram dalam suasana kehidupan yang demokratis dan agamis.
4. Meningkatkan tata kelola yang baik.
5. Meningkatkan pembangunan di bidang pertanian.
6. Mengupayakan pelestarian sumber daya alam untuk memenuhi kebutuhan guna meningkatkan perekonomian.

4.1.4 Struktur Organisasi Pemerintahan Desa Pulau Baru

Pemerintah Desa Kampung Baru Timur terdiri dari kepala desa, sekretaris desa, perangkat desa yang berjumlah tujuh orang, tiga kepala dusun, serta hubungan konsultatif dengan Badan Permusyawaratan Desa (BPD), Berikut struktur organisasi pemerintahan Desa Pulau Baru

Gambar 4.1
Struktur Organisasi Pemerintahan Desa Pulau Baru
Kecamatan Kuantan Hilir Seberang Kabupaten Kuantan Singingi



Sumber: Data Desa Pulau Baru, 2019

4.1.5 Tugas dan Fungsi Pemerintah Desa

Untuk masing-masing tugas dan fungsi perangkat desa, akan dijelaskan sebagai berikut:

1. Kepala desa

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud, kepala desa mempunyai wewenang:

- a. Memimpin penyelenggaraan pemerintahan desa berdasarkan kebijakan yang ditetapkan bersama Badan Permusyawaratan Desa (BPD).
- b. Mengajukan rancangan peraturan Desa (perdes).
- c. Menetapkan peraturan desa yang telah mendapat persetujuan bersama Badan Permusyawaratan Desa(BPD).
- d. Menyusun dan mengajukan rancangan peraturan desa mengenai Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa (APBDes) untuk dibahas dan ditetapkan bersama Badan Permusyawaratan Desa (BPD).
- e. Membina kehidupan masyarakat Desa.
- f. Membina perekonomian Desa.
- g. Mengkoordinasikan pembangunan desa secara partisipatif.
- h. Melaksanakan wewenang lain sesuai dengan peraturan perundang-undangan.

2. BPD

Badan Permusyawaratan Desa sebagai unsur penyelenggara pemerintahan desa dibentuk berdasarkan usulan masyarakat desa yang bersangkutan. Badan Permusyawaratan Desa (BPD) berfungsi menetapkan peraturan desa bersama kepala desa, menampung dan menyalurkan aspirasi

masyarakat. Badan Permusyawaratan Desa (BPD) mempunyai tugas dan wewenang:

- a. Membahas rancangan peraturan desa bersama kepala desa.
- b. Melaksanakan pengawasan terhadap pelaksanaan peraturan desa dan peraturan kepala desa.
- c. Mengusulkan pengangkatan dan pemberhentian kepala desa.
- d. Membentuk panitia pemilihan kepala desa.
- e. Memberi persetujuan pemberhentian-pemberhentian sementara perangkat desa.
- f. Menyusun tata tertib Badan Pendapatan Desa (BPD).

3. Sekretaris desa

Fungsi sekretaris desa dalam menjalankan tugasnya:

- a. Melaksanakan urusan ketatausahaan seperti tata naskah, administrasi surat menyurat, arsip, dan ekspedisi.
- b. Melaksanakan urusan umum seperti penataan administrasi perangkat desa, penyediaan prasarana perangkat desa dan kantor, penyiapan rapat, pengadministrasian asset, inventaris, perjalanan dinas, dan pelayanan umum.
- c. Melaksanakan urusan keuangan seperti pengurusan administrasi keuangan, administrasi sumber-sumber pendapatan dan pengeluaran, verifikasi administrasi keuangan, dan administrasi penghasilan kepala desa, perangkat desa, badan permusyawaratan desa (BPD), dan lembaga pemerintahan desa lainnya.
- d. Melaksanakan urusan perencanaan seperti menyusun rencana anggaran pendapatan dan belanja desa (APBDes), menginventarisir

data-data dalam rangka pembangunan, melakukan monitoring dan evaluasi program, serta penyusunan laporan.

4. Kasi Pemerintahan

Tugas pokok dan fungsi kasi pemerintahan sebagai berikut:

- a. Menyusun program dan menyiapkan bahan koordinasi pembinaan pemerintahan desa.
- b. Menyusun program dan menyiapkan bahan koordinasi pembinaan administrasi kependudukan dan catatan sipil.
- c. Menyusun program dan menyiapkan bahan koordinasi pembinaan kegiatan sosial politik ideologi negara dan kesatuan bangsa.
- d. Menyusun program dan menyiapkan bahan koordinasi pembinaan administrasi pemerintahan desa.
- e. Menyelenggarakan kegiatan yang terkait dengan bidang pertahanan dan kependudukan.
- f. Merumuskan upaya terciptanya ketentraman, ketertiban dan pembangunan kesatuan bangsa di desa.
- g. Menyelenggarakan kegiatan yang terkait dengan urusan organisasi sosial masyarakat dan adat istiadat.
- h. Melakukan kegiatan dan pemberdayaan dusun dan RT.

5. kasi kesejahteraan

Tugas kasi kesejahteraan:

- a. Melaksanakan anggaran kegiatan sesuai bidang tugasnya
- b. Melakukan tindakan yang mengakibatkan pengeluaran atas beban anggaran belanja sesuai bidang tugasnya
- c. Mengendalikan kegiatan sesuai bidang tugasnya

- d. Menyusun DPA (dokumen pelaksanaan anggaran), DPPA (dokumen perubahan pelaksanaan anggaran), dan DPAL (dokumen pelaksanaan anggaran lanjutan) sesuai bidang tugasnya.
- e. Menandatangani perjanjian kerja sama dengan penyedia atas pengadaan barang/jasa untuk kegiatan yang berada dalam bidang tugasnya
- f. Menyusun laporan pelaksanaan kegiatan sesuai bidang tugasnya untuk pertanggungjawaban pelaksanaan anggaran pendapatan dan belanja desa (APBDes).

Fungsi kasi kesejahteraan:

- a. Melaksanakan pembangunan sarana prasarana perdesaan
- b. Pembangunan bidang pendidikan dan kesehatan
- c. Sosialisasi serta motivasi masyarakat dibidang budaya, ekonomi, politik, lingkungan hidup, pemberdayaan keluarga, pemuda, olahraga, dan karang taruna.

6. Kepala Dusun

Tugas pokok kepala dusun:

- a. Membantu kepala desa dalam tugas pelayanan, pemberdayaan dan penyelenggaraan administrasi umum dan keuangan desa.
- b. Merampungkan, mengelola merumuskan dan mengevaluasi data yang terkait dengan penyelenggaraan administrasi umum dan keuangan desa.
- c. Melaksanakan tertib administrasi umum dan keuangan.
- d. Melaksanakan urusan perlengkapan dan inventaris desa.
- e. Melaksanakan penataan rapat dan upacara.

f. Mengumpulkan dan menyusun bahan laporan pemerintahan desa.

Berdasarkan struktur organisasi dan uraian tugas yang telah dijelaskan sebelumnya, dapat dilihat bahwa struktur organisasi telah menunjukkan garis wewenang dan tanggungjawab yang cukup jelas serta uraian tugas masing-masing jabatan. Secara keseluruhan struktur organisasi Desa Pulau Baru.

Dalam kegiatan pengendalian internal, hal yang harus dilakukan sebagai dasar dari adanya pelaksanaan prosedur adalah kepatuhan para personal terhadap tanggungjawab dan wewenang yang diamanahkan kepadanya. Para personal terlebih dahulu harus memahami dimana posisinya di struktur organisasi serta memahami uraian tugas sesuai dengan posisinya.

4.2 Hasil Penelitian

4.2.1 Deskriptif Variabel Penelitian

1. Belanja Desa Bidang Pembangunan Desa (Y)

pembangunan desa memiliki peran penting dalam projek pembangunan nasional. Pembangunan desa ditujukan untuk sebuah peningkatan kualitas hidup dan kehidupan masyarakat desa. Pelaksanaan pembangunan desa seharusnya mengacu pada pencapaian tujuan dari pembangunan yaitu mewujudkan kehidupan masyarakat pedesaan yang mandiri, maju, sejahtera, dan berkeadilan. Belanja Desa Bidang Pembangunan Desa Merupakan pengeluaran yang berasal dari suatu Anggaran Pada Pemerintah Daerah yang digunakan untuk Memperoleh Aset tetap atau Aset Lainnya yang dapat memberi Manfaat Lebih dari satu Periode akuntansi dan digunakan oleh pemerintah Desa dalam Menjalankan tugas *Public Service*.

2. Pendapatan Asli Desa (X_1)

pendapatan asli desa yaitu, pendapatan yang berasal dari kewenangan desa berdasarkan hak asal-usul dan kewenangan skala lokal desa. PADes merupakan pendapatan yang dihasilkan oleh usaha-usaha desa, hasil kekayaan desa, swadaya dan partisipasi, hasil gotong royong dan lain-lain pendapatan asli desa yang sah.

3. Dana Desa (X_2)

Dana Desa adalah sumber dana desa yang berasal dari anggaran dan belanja Negara di transfer melalui anggaran pendapatan dan belanja daerah kabupaten dan digunakan untuk menyelenggarakan pemerintahan, pembangunan desa, pembinaan, dan pemberdayaan masyarakat. Tujuan diberikannya DD adalah untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat desa dan kualitas hidup masyarakat desa serta penanggulangan kemiskinan desa melalui peningkatan pelayanan publik di desa, memajukan perekonomian desa, mengatasi kesenjangan pembangunan antar desa serta memperkuat masyarakat desa sebagai subyek dari pembangunan.

4. Alokasi Dana Desa (X_3)

alokasi dana desa selanjutnya disingkat ADD, adalah 10% dari dana perimbangan yang diterima kabupaten dalam APBD setelah dikurangi dana alokasi khusus. Tujuan pemberian transfer ADD untuk mendukung ketersediaan dana dalam memenuhi kebutuhan belanja desa dalam menjalankan fungsi yang telah didesentralisasikan.

5. Bagi Hasil Pajak dan Retribusi (X_4)

bagian hasil pajak dan retribusi (BHPR) dialokasikan sebesar 60% secara merata dan 40% secara proporsional dari realisasi pajak dan retribusi masing-

masing daerah. Pemerintah juga mengalokasikan BHPR kepada desa paling sedikit 10% untuk desa di wilayahnya, dengan memperhatikan aspek pemerataan dan potensi desa serta penggunaan ditetapkan sepenuhnya oleh desa penerima.

Tabel 4.4
Variabel yang Menunjukkan Variabel Independen (X) dan Variabel
Dependen (Y)

Tahun	Belanja Pembangunan Desa (Y)	PADes (X ₁)	DD (X ₂)	ADD (X ₃)	BHPR (X ₄)
2015	400.000.000	-	260.605.000	172.450.000	-
2016	990.393.000	1.000.000	590.393.000	117.673.000	26.283.000
2017	761.427.000	146.169	752.060.000	411.822.000	22.030.000
2018	656.684.000	-	681.684.000	410.456.000	40.532.000

Sumber: Data Laporan Realisasi Anggaran Desa Pulau Baru, 2020

Statistik deskriptif ditunjukkan untuk mengetahui berapa jumlah tertinggi, terendah rata-rata, standar deviasi dari masing masing variabel yaitu Pendapatan Asli Desa (PADes), Dana Desa, Alokasi Dana Desa, Bagi Hasil Pajak dan Retribusi dan Belanja Desa Bidang Pembangunan Desa. Hasil Uji statistik deskriptif sebagai berikut:

Tabel 4.5
Statistik Deskriptif Variabel Independen (X) dan Dependen (Y)
Sebelum Transpormasi

Descriptive Statistics

	N	Minimum	Maximum	Mean	Std. Deviation
PADES	4	.0	1000000	286542.250	480603.6248
DD	4	260605000	752060000	571185500.00	217374238.192
ADD	4	117673000	411822000	278100250.00	155240060.174
BHPR	4	0	40532000	22211250.00	16788900.170
BELANJA DESA	4	400000000	990393000	702126000.00	244921461.650
Valid N (listwise)	4				

Sumber : Data Olahan SPSS, 2020

Berdasarkan tabel 4.5 diatas dapat dijelaskan hasilnya sebagai berikut:

1. Variabel pendapatan asli desa memiliki nilai rata-rata sebesar 286542.250 dengan standar deviasi sebesar 480603.6248. Nilai minimum pendapatan asli desa sebesar 0 dan nilai pendapatan asli desa maksimum sebesar 1000000.
2. Variabel dana desa memiliki nilai rata-rata sebesar 571185500.00 dengan standar deviasi sebesar 217374238.192. Nilai minimum dana desa sebesar 260605000 dan nilai dana desa maksimum sebesar 752060000.
3. Variabel alokasi dana desa memiliki nilai rata-rata sebesar 278100250.00 dengan standar deviasi sebesar 155240060.174. Nilai minimum alokasi dana desa sebesar 117673000 dan nilai alokasi dana desa maksimum sebesar 411822000.
4. Variabel bagi hasil pajak dan retribusi memiliki nilai rata-rata sebesar 22211250.00 dengan standar deviasi sebesar 16788900.170. Nilai minimum bagi hasil pajak dan retribusi sebesar 0 dan nilai bagi hasil pajak dan retribusi maksimum sebesar 40532000.
5. Variabel belanja desa memiliki nilai rata-rata sebesar 702126000.00 dengan standar deviasi sebesar 244921461.650. Nilai minimum belanja desa sebesar 400000000 dan nilai belanja desa maksimum sebesar 990393000.

Tabel 4.6
Statistik Deskriptif Variabel Independen (X) dan Dependen (Y) Setelah
Transpormasi

Descriptive Statistics

	N	Minimum	Maximum	Mean	Std. Deviation
PADES	4	6.00	14.82	10.4270	3.78776
DD	4	19.38	20.80	20.2383	.60579
ADD	4	16.97	20.58	19.0545	1.56643
BHPR	4	14.00	17.88	16.6171	1.77572
BELANJADESA	4	19.81	20.71	20.3185	.38101
Valid N (listwise)	4				

Sumber : Data Olahan SPSS, 2020

Setelah dilakukan transformasi data maka dapat dijelaskan statistik sebagai berikut :

1. Variabel pendapatan asli desa memiliki nilai rata-rata sebesar 10.4270 dengan standar deviasi sebesar 3.78776. Nilai minimum pendapatan asli desa sebesar 6.00 dan nilai pendapatan asli desa maksimum sebesar 14.82.
2. Variabel dana desa memiliki nilai rata-rata sebesar 20.2383 dengan standar deviasi sebesar 60579. Nilai minimum dana desa sebesar 19.38 dan nilai dana desa maksimum sebesar 20.80.
3. Variabel alokasi dana desa memiliki nilai rata-rata sebesar 19.0545 dengan standar deviasi sebesar 1.56643. Nilai minimum alokasi dana desa sebesar 16.97 dan nilai alokasi dana desa maksimum sebesar 20.58.
4. Variabel bagi hasil pajak dan retribusi memiliki nilai rata-rata sebesar 16.6171 dengan standar deviasi sebesar 1.77572. Nilai minimum bagi hasil pajak dan retribusi sebesar 14.00 dan nilai bagi hasil pajak dan retribusi maksimum sebesar 17.88.
5. Variabel belanja desa memiliki nilai rata-rata sebesar 20.3185 dengan standar deviasi sebesar 38101. Nilai minimum belanja desa sebesar 19.81 dan nilai belanja desa maksimum sebesar 20.71.

4.3 Hasil Uji Asumsi Klasik

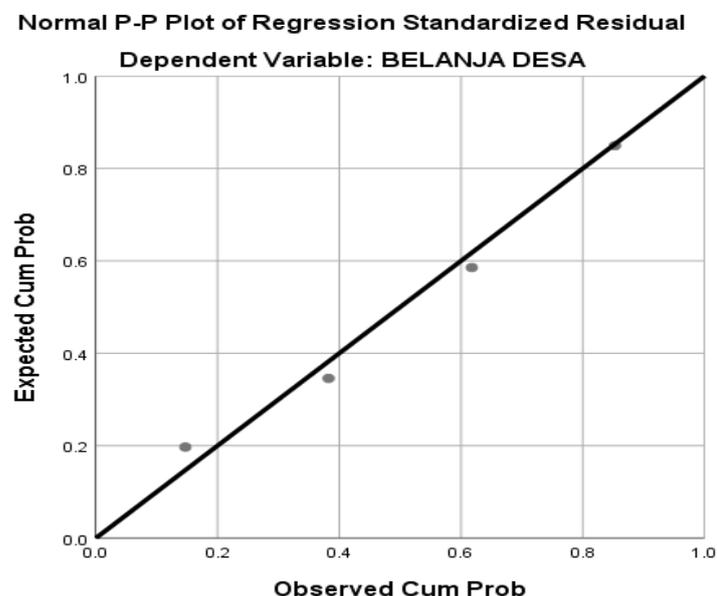
4.3.1 Hasil Uji Normalitas

Uji normalitas adalah sebuah uji yang dilakukan dengan tujuan untuk menilai sebaran data pada sebuah kelompok data atau variabel, apakah sebaran

data tersebut berdistribusi normal atau tidak. Kita dapat melihatnya dari *normal probability Plot* yang membentuk suatu garis lurus diagonal, dan plotting data yang akan dibandingkan dengan garis diagonalnya. Jika data menyebar disekitar garis diagonalnya dan mengikuti arah garis diagonalnya atau grafik histogram maka menunjukkan pola distribusi normal. Apabila data jauh dari garis dan tidak mengikuti arah garis diagonalnya maka menunjukkan pola distribusi tidak normal (Ghozali,2013 : 160). Dengan menggunakan normal *P-P Plot* dapat dilihat apabila data menyebar disekitar garis diagonal dan mengikuti arah garis diagonal, maka model regresi memenuhi asumsi normalitas. Berdasarkan analisis yang dilakukan, maka hasil pengujian tersebut dapat dilihat pada grafik dibawah ini :

Gambar 4.2

Grafik Normal probability plot



Sumber : Data Olahan SPSS, 2020

Dari grafik diatas dapat dilihat bahwa data tersebar disekitar garis diagonal (tidak terpecah dari garis diagonal). Dapat disimpulkan bahwa persyaratan untuk uji normalitas dapat terpenuhi.

4.3.2 Hasil Uji Multikolinearitas

Pengujian Multikolinearitas dilihat dari besaran *VIF* (*Variance Inflation Factor*) dan *tolerance*. Regresi yang terbebas dari problem multikolinearitas apabila nilai $VIF < 10$ dan $tolerance > 0,10$, maka data tersebut tidak ada multikolinearitas. Hasil pengujian model regresi diperoleh nilai-nilai *Tolerance* dan *VIF* sebagai berikut:

Tabel 4.7
Hasil Uji Multikolinearitas

Coefficients ^a				
Model		Collinearity Statistics		Kesimpulan
		Tolerance	VIF	
1	(Constant)			
	PADES	.745	1.342	BebasMultikoloneatitas
	DD	.659	1.516	BebasMultikoloneatitas
	ADD	.975	1.025	BebasMultikoloneatitas
	BHPR	.870	1.149	BebasMultikoloneatitas

a. Dependent Variable: BELANJA DESA BIDANG PEMBANGUNAN DESA

Sumber : Data Olahan SPSS, 2020

Berdasarkan tabel 4.7 di atas dapat dilihat bahwa hasil uji multikolinearitas tiap variabel memiliki nilai $VIF < 10$ dan $tolerance > 0,10$. Dari hasil pengujian tersebut dapat disimpulkan bahwa semua variabel independen tidak memiliki masalah multikolinearitas dan dapat digunakan dalam penelitian ini.

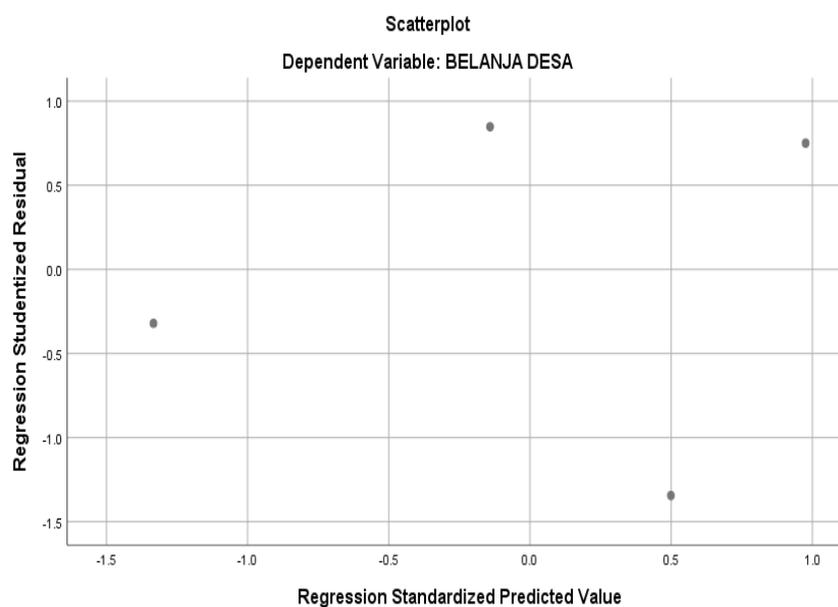
4.3.3 Hasil Uji Heteroskedastisitas

Uji heteroskedastisitas bertujuan untuk menguji apakah dalam sebuah model regresi terjadi ketidaksamaan varians dari residual satu pengamatan lain. Pengujian terhadap heteroskedastisitas dapat dilakukan melalui pengamatan terhadap pola *scatter plot* yang dihasilkan melalui olah data SPSS. Apabila pola *scatter plot* membentuk pola tertentu, maka model regresi memiliki gejala

heteroskedastisitas. Munculnya gejala heteroskedastisitas menunjukkan bahwa penaksir dalam model regresi tidak efisien dalam sampel besar maupun kecil.

Berdasarkan hasil olah data dengan program SPSS maka diperoleh *scatter plot* yang tidak membentuk pola tertentu pada kedua model regresi yang artinya model regresi tidak memiliki gejala heteroskedastisitas (Ghozali, 2012:101), seperti yang tampak pada gambar 4.3 :

Gambar 4.3
Hasil Uji Heteroskedastisitas



Sumber : Data Olahan SPSS, 2020

4.3.4 Hasil Uji Autokorelasi

Uji autokorelasi bertujuan untuk menguji apakah dalam model regresi linear ada korelasi antara kesalahan pengganggu pada periode t dengan kesalahan pengganggu pada periode $t-1$ (sebelumnya) (Ghozali, 2016:107). Untuk mendeteksi ada atau tidaknya autokorelasi digunakan Uji *Durbin-Watson* (DW *test*). Autokorelasi dideteksi dengan nilai *Durbin-Watson*. Batas tidak terjadinya autokorelasi adalah apabila angka yang ditunjukkan dari nilai *Durbin-*

Watson berada antara -2 sampai dengan +2, maka dapat dikatakan model regresi tidak terdapat autokorelasi.

Hasil pengujian Autokorelasi dari penelitian ini dapat dilihat dari tabel berikut:

Tabel 4.8
Hasil Uji Autokorelasi

Model Summary^b

Model	R	R Square	Adjusted R Square	Std. Error of the Estimate	Durbin-Watson
1	.973 ^a	.948	.922	.10672	1.826

a. Dependent Variable: BELANJA DESA BIDANG PEMBANGUNAN DESA

b. Predictors: (Constant), PADES, DD, ADD, BHPR

Sumber : Data Olahan SPSS, 2020

Dari tabel 4.8 hasil perhitungan analisis data diatas, angka DW sebesar **1,826** dapat disimpulkan bahwa persamaan regresi dari penelitian ini bebas dari autokorelasi, karena angka DW berada diantara -2 sampai +2.

4.4 Hasil Analisis Regresi Linier Berganda

Analisis regresi linier berganda digunakan untuk mengetahui pengaruh antara variabel independen terhadap variabel dependen. Hasil analisis regresi linier berganda dapat dilihat pada tabel berikut:

Tabel 4.9
Hasil Uji Persamaan Regresi Linier Berganda

Coefficients^a

Model	Unstandardized Coefficients		Standardized Coefficients	T	Sig.
	B	Std. Error	Beta		
1	(Constant)	19.297	.178	108.532	.000
	PADES	.098	.016	.973	.027
	DD	.622	.065	.989	.011
	ADD	.242	.019	.994	.006
	BHPR	.206	.042	.961	.039

a. Dependent Variable: BELANJA DESA BIDANG PEMBANGUNAN DESA

Sumber : Data Olahan SPSS, 2020

Berdasarkan tabel 4.9 di atas maka dapat dibuat suatu persamaan regresi sebagai berikut :

$$\text{Belanja Desa} = 19,297 + 0,098 \text{ PADES} + 0,622 \text{ DD} + 0,242 \text{ ADD} + 0,206 \text{ BHPR} + \varepsilon$$

Penjelasan persamaan regresi di atas adalah sebagai berikut:

1. Dari model di atas diketahui konstanta sebesar 19,297. Besaran konstanta ini menunjukkan bahwa jika variabel-variabel independen (Pendapatan Asli Desa, Dana Desa, Alokasi Dana Desa dan Bagi Hasil Pajak dan Retribusi) diasumsikan konstan, maka variabel dependen yaitu nilai perusahaan bernilai sebesar 19,297.
2. Koefisien regresi pada variabel pendapatan asli desa sebesar 0,098. Hal ini berarti jika variabel pendapatan asli desa bertambah satu satuan maka variabel belanja desa akan meningkat sebesar 0,098 satuan atau 9,8%, dengan catatan variabel lain dianggap konstan.
3. Koefisien regresi pada variabel dana desa sebesar 0,622. Hal ini berarti jika variabel dana desa bertambah satu satuan maka variabel belanja desa akan meningkat sebesar 0,622 satuan atau 62,2%, dengan catatan variabel lain dianggap konstan.
4. Koefisien regresi pada variabel alokasi dana desa sebesar 0,242. Hal ini berarti jika variabel alokasi dana desa bertambah satu satuan maka variabel belanja desa akan meningkat sebesar 0,242 satuan atau 24,2%, dengan catatan variabel lain dianggap konstan.
5. Koefisien regresi pada variabel bagi hasil pajak dan retribusi sebesar 0,098. Hal ini berarti jika variabel bagi hasil pajak dan retribusi bertambah

satu satuan maka variabel belanja desa akan meningkat sebesar 0,206 satuan atau 20,6%, dengan catatan variabel lain dianggap konstan.

6. Standar error (ε) merupakan variabel acak dan mempunyai distribusi probabilitas yang mewakili semua faktor yang mempunyai pengaruh terhadap Y tetapi tidak dimasukkan dalam persamaan.

4.5 Uji Hipotesis

Uji hipotesis digunakan untuk mengetahui signifikansi dari masing-masing variabel bebas terhadap variabel terikat yang terdapat dalam model penelitian.

4.5.1 Uji Simultan (Uji F)

Uji statistik F menunjukkan apakah semua variabel independen atau bebas yang dimasukkan dalam model mempunyai pengaruh secara bersama-sama terhadap variabel independen. Dari hasil pengujian F diperoleh sebagai berikut :

Tabel 4.10
Hasil Uji F

ANOVA^a

Model		Sum of Squares	Df	Mean Square	F	Sig.
1	Regression	.426	1	.426	93.039	.000 ^b
	Residual	.009	2	.005		
	Total	.435	3			

a. Dependent Variable: BELANJA DESA BIDANG PEMBANGUNAN DESA

b. Predictors: (Constant), PADES, DD, ADD BHPR

Sumber : Data Olahan SPSS, 2020

Berdasarkan tabel hasil uji F, diketahui F_{hitung} sebesar 93.039, sedangkan nilai F_{tabel} sebesar 6,39. Dengan tingkat keyakinan 95% ($\alpha = 5\%$), dapat dilihat bahwa nilai signifikansi sebesar 0,000^b lebih kecil dari pada nilai alpha 0,05. Dengan demikian diketahui F_{hitung} (93,039) > F_{tabel} (6,39) dengan Sig. (0,000) <

(0,05), yang berarti bahwa variabel independen (Pendapatan asli desa, dana desa, alokasi dana desa dan bagi hasil pajak dan retribusi) secara bersama-sama berpengaruh signifikan terhadap variabel dependen belanja desa bidang pembangunan desa pada Desa Pulau Baru Kecamatan Kuantan Hilir Seberang Kabupaten Kuantan Singingi.

Belanja desa bidang pembangunan digunakan untuk membiayai pelaksanaan program dan kegiatan pembangunan desa yang ditujukan untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat desa, peningkatan kualitas hidup manusia serta penanggulangan kemiskinan (Bastian, 2015). Semakin besar pengeluaran anggaran dalam belanja pembangunan maka akan menurun angka kemiskinan. Semakin besarnya alokasi belanja desa bidang pembangunan diharapkan mampu menekan angka kemiskinan sehingga angka kemiskinan akan menurun.

4.5.2 Uji Signifikansi Parameter Individual (Uji t)

Uji t digunakan untuk membuktikan signifikan tidaknya pengaruh variabel dependent terhadap variabel independent. *Level of Significance* sebesar 5% (Uji 2 sisi, 5% : 2 = 2,5% atau 0,025) dengan frekuensi 4. $df = n - 1 = 2,776$

Maka diperoleh $t_{tabel} = 2,776$

Hasil uji t dapat dilihat pada tabel dibawah ini:

Tabel 4.11
Uji t

Model		Unstandardized Coefficients		Standardized Coefficients	T	Sig.
		B	Std. Error	Beta		
1	(Constant)	19.297	.178		108.532	.000
	PADES	.098	.016	.973	6.020	.027
	DD	.622	.065	.989	9.646	.011
	ADD	.242	.019	.994	12.689	.006
	BHPR	.206	.042	.961	4.896	.039

a. Dependent Variable: BELANJA DESA BIDANG PEMBANGUNAN DESA

Sumber : Data Olahan SPSS, 2020

Berdasarkan hasil uji t pada tabel diatas dapat diketahui bahwa:

1. Hasil uji t untuk hipotesis pertama menunjukkan bahwa H_1 diterima dan H_0 ditolak, ini ditunjukkan oleh variabel pendapatan asli desa (X_1) memiliki nilai $t_{hitung} > t_{tabel}$ yaitu $6,020 > 2,776$ dan signifikansi $0,027 < 0,05$, yang berarti secara parsial variabel pendapatan asli desa berpengaruh terhadap belanja desa bidang pembangunan desa pada Desa Pulau Baru Kecamatan Kuantan Hilir Seberang Kabupaten Kuantan Singingi.
2. Hasil uji t untuk hipotesis kedua menunjukkan bahwa H_2 diterima dan H_0 ditolak, ini ditunjukkan oleh variabel dana desa (X_2) memiliki nilai $t_{hitung} > t_{tabel}$ yaitu $9,646 > 2,776$ dan signifikansi $0,011 < 0,05$, yang berarti secara parsial variabel dana desa berpengaruh terhadap belanja desa bidang pembangunan desa pada Desa Pulau Baru Kecamatan Kuantan Hilir Seberang Kabupaten Kuantan Singingi.
3. Hasil uji t untuk hipotesis ketiga menunjukkan bahwa H_3 diterima dan H_0 ditolak, ini ditunjukkan oleh variabel alokasi dana desa (X_3) memiliki nilai $t_{hitung} > t_{tabel}$ yaitu $12,689 > 2,776$ dan signifikansi $0,006 < 0,05$, yang berarti secara parsial variabel alokasi dana desa berpengaruh terhadap belanja desa bidang pembangunan desa pada Desa Pulau Baru Kecamatan Kuantan Hilir Seberang Kabupaten Kuantan Singingi.
4. Hasil uji t untuk hipotesis keempat menunjukkan bahwa H_4 diterima dan H_0 ditolak, ini ditunjukkan oleh variabel bagi hasil pajak dan retribusi (X_4) memiliki nilai $t_{hitung} > t_{tabel}$ yaitu $4,896 > 2,776$ dan signifikansi $0,039 < 0,05$, yang berarti secara parsial variabel bagi hasil pajak dan retribusi berpengaruh terhadap belanja desa bidang pembangunan desa pada

Desa Pulau Baru Kecamatan Kuantan Hilir Seberang Kabupaten Kuantan Singingi.

4.5.3 Hasil Pengujian Koefisien Determinasi (R^2)

Menurut Ghozali (2009:87) untuk menentukan seberapa besar variabel independen dapat menjelaskan variabel dependen, maka perlu diketahui nilai koefisien determinasi (R-Square). Adapun hasil uji koefisien determinasi (R^2) adalah sebagai berikut :

Tabel 4.12
Hasil Uji Koefisien Determinasi (R^2)

Model Summary^b

Model	R	R Square	Adjusted R Square	Std. Error of the Estimate	Durbin-Watson
1	.973 ^a	.948	.922	.10672	1.826

a. Dependent Variable: BELANJA DESA BIDANG PEMBANGUNAN DESA

b. Predictors: (Constant), PADES, DD, ADD BHPR

Sumber : Data Olahan SPSS, 2020

Hasil uji koefisien determinasi (R^2) pada tabel diatas menunjukkan bahwa nilai *R square* yang dihasilkan oleh variabel-variabel independen yaitu sebesar 0,948. Artinya adalah 94,8% variabel dependen (Pendapatan asli desa, dana desa, alokasi dana desa dan bagi hasil pajak dan retribusi) dan sisanya sebesar 5,2% dijelaskan oleh variabel lain diluar variabel independen yang digunakan. Semakin besar nilai *R Square*, maka akan semakin kuat hubungan antara variabel independen terhadap variabel dependennya.

4.6 Pembahasan

Untuk melakukan pengujian terhadap masing-masing hipotesis, maka akan digunakan uji regresi parsial (uji t) yang bertujuan untuk mengetahui pengaruh variabel independen secara individu atau parsial, apakah memiliki pengaruh yang signifikan terhadap variabel dependen. Nilai t_{tabel} dalam penelitian

ini ditunjukkan dengan $df = n - 4 = 2,776$ dengan taraf signifikansi 0,05 maka t_{tabel} yang didapat adalah 2,776. Berikut ini adalah hasil pengujian masing-masing hipotesis serta pembahasannya.

4.6.1 Pengaruh Pendapatan Asli Desa terhadap Belanja Desa Bidang Pembangunan Desa Secara Parsial

Berikut ini tabel yang berisi hasil pengujian hipotesis 1 :

Tabel 4.13
Hasil Uji Hipotesis 1

Variabel	t_{hitung}		t_{tabel}	Sig.		A
Pendapatan Asli Desa	6,020	>	2,776	0,027	<	0,05

Sumber : Data Olahan SPSS, 2020

Hipotesis pertama menguji secara parsial pengaruh pendapatan asli desa terhadap belanja desa. Berdasarkan Tabel 4.13 variabel pendapatan asli desa memiliki t_{hitung} sebesar $6,020 > t_{tabel} 2,776$, dengan nilai signifikansi sebesar $0,027 < 0,05$. Dengan demikian H_0 ditolak, maka terdapat pengaruh yang signifikan dari variabel pendapatan asli desa terhadap belanja desa bidang pembangunan desa pada Desa Pulau Baru Kecamatan Kuantan Hilir Seberang Kabupaten Kuantan Singingi. Dengan demikian **H_1 diterima.**

undang-undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang desa menjelaskan pendapatan asli desa (PADes) adalah pendapatan yang berasal dari kewenangan desa berdasarkan hak asal usul dan kewenangan skala lokal desa. PADes merupakan pendapatan yang dihasilkan oleh usaha-usaha desa, hasil kekayaan desa, hasil swadaya dan partisipasi, hasil gotong royong dan lain-lain pendapatan asli desa yang sah. Semakin besar PADes yang diperoleh memungkinkan desa dapat memenuhi kebutuhan belanja desanya sendiri

dengan tidak menunggu bantuan dari pemerintah pusat. Begitu pula sebaliknya semakin rendah PADes yang diperoleh suatu desa maka desa tidak dapat memenuhi seluruh belanja desanya yang akibatnya akan bergantung kepada pemerintah pusat.

Hasil ini di dukung oleh beberapa penelitian yaitu penelitian Harnita (2013) yang memperoleh hasil bahwa pendapatan asli desa berpengaruh secara parsial pada belanja desa bidang pembangunan desa pada Desa Pulau Baru Kecamatan Kuantan Hilir Seberang Kabupaten Kuantan Singingi.

4.6.2 Pengaruh Dana Desa terhadap Belanja Desa Bidang Pembangunan Desa Secara Parsial

Berikut ini tabel yang berisi hasil pengujian hipotesis 2 :

Tabel 4.14
Hasil Uji Hipotesis 2

Variabel	t_{hitung}		t_{tabel}	Sig.		α
DanaDesa	9,646	>	2,776	0,011	<	0,05

Sumber : Data Olahan SPSS, 2020

Hipotesis kedua menguji secara parsial pengaruh dana desa terhadap belanja desa. Berdasarkan Tabel 4.14 variabel dana desa memiliki t_{hitung} sebesar $9,646 > t_{tabel} 2,776$, dengan nilai signifikansi sebesar $0,011 < 0,05$. Dengan demikian H_0 ditolak, maka terdapat pengaruh yang signifikan dari variabel dana desa terhadap belanja desa bidang pembangunan desa pada Desa Pulau Baru Kecamatan Kuantan Hilir Seberang Kabupaten Kuantan Singingi. Dengan demikian **H_2 diterima.**

UU No. 6 Tahun 2014 menjelaskan desa akan mendapatkan DD yang diperoleh sebesar 10% dari APBN yang akan menambah penerimaan tiap

masing masing desa dengan jumlah yang berbeda-beda. Penggunaan DD diprioritaskan untuk membiayai pembangunan dan pemberdayaan masyarakat agar nantinya bisa meningkatkan kesejahteraan masyarakat desa. Tujuan diberikannya DD adalah meningkatkan kesejahteraan masyarakat desa dan kualitas hidup masyarakat desa serta penanggulangan kemiskinan desa melalui peningkatan pelayanan publik di desa, memajukan perekonomian desa, mengatasi kesenjangan pembangunan antar desa serta memperkuat masyarakat desa sebagai subyek dari pembangunan. Semakin besar DD yang diterima suatu desa maka tingkat ketergantungan dalam membiayai kewenangan desa semakin tinggi.

Hasil ini di dukung oleh beberapa penelitian yaitu penelitian Novemia Nanda Yuliawati (2019) yang memperoleh hasil bahwa dana desa berpengaruh pada belanja desa bidang pembangunan desa pada Desa Pulau Baru Kecamatan Kuantan Hilir Seberang Kabupaten Kuantan Singingi.

4.6.3 Pengaruh Alokasi Dana Desa terhadap Belanja Desa Bidang Pembangunan Desa Secara Parsial

Berikut ini tabel yang berisi hasil pengujian hipotesis 3 :

Tabel 4.15
Hasil Uji Hipotesis 3

Variabel	t_{hitung}		t_{tabel}	Sig.		α
Alokasi DanaDesa	12,689	>	2,776	0,006	<	0,05

Sumber : Data Olahan SPSS, 2020

Hipotesis ketiga menguji secara parsial pengaruh alokasi dana desa terhadap belanja desa. Berdasarkan Tabel 4.15 variabel alokasi dana desa memiliki t_{hitung} sebesar $12,689 > t_{tabel}$ 2,776, dengan nilai signifikansi sebesar

0,006 < 0,05. Dengan demikian H_0 ditolak, maka terdapat pengaruh yang signifikan dari variabel alokasi dana desa terhadap belanja desa bidang pembangunan desa pada Desa Pulau Baru Kecamatan Kuantan Hilir Seberang Kabupaten Kuantan Singingi. Dengan demikian **H_3 diterima.**

Wijaya (2018) menyatakan pemerintah daerah kabupaten atau kota sesuai dengan amanat Undang Undang wajib mengalokasikan ADD ke dalam APBD kabupaten/kota setiap tahun anggaran, ADD merupakan bagian dari dana perimbangan yang diterima oleh pemerintah daerah kabupaten/kota paling sedikit 10% setelah dikurangi dana alokasi khusus. ADD tersebut akan mendorong terlaksananya otonomi desa, sekaligus sebagai upaya pemberdayaan pemerintahan desa dan masyarakat desa. Pemerintahan provinsi dan pemerintahan kabupaten sebagai fasilitator, memfasilitasi masyarakat desa agar mampu menjalankan fungsi perencanaan, pelaksanaan, dan pengawasan terhadap penggunaan ADD yang diterimanya (Nurcholis, 2011). Semakin besar ADD yang diterima suatu desa maka tingkat ketergantungan dalam membiayai pengeluaran desa semakin tinggi.

Hasil ini di dukung oleh beberapa penelitian yaitu penelitian Novemia Nanda Yuliawati (2019) yang memperoleh hasil bahwa alokasi dana desa berpengaruh pada belanja desa bidang pembangunan desa pada Desa Pulau Baru Kecamatan Kuantan Hilir Seberang Kabupaten Kuantan Singingi.

4.6.4 Pengaruh Bagi Hasil Pajak dan Retribusi terhadap Belanja Desa Bidang Pembangunan Desa

Berikut ini tabel yang berisi hasil pengujian hipotesis 4 :

Tabel 4.16
Hasil Uji Hipotesis 4

Variabel	t_{hitung}		t_{tabel}	Sig.		A
Bagi Hasil Pajak dan Retribusi	4,896	>	2,776	0,039	<	0,05

Sumber : Data Olahan SPSS, 2020

Hipotesis keempat menguji secara parsial pengaruh bagi hasil pajak dan retribusi terhadap belanja desa. Berdasarkan Tabel 4.16 variabel bagi hasil pajak dan retribusi memiliki t_{hitung} sebesar $4,896 > t_{tabel} 2,776$, dengan nilai signifikansi sebesar $0,039 < 0,05$. Dengan demikian H_0 ditolak, maka terdapat pengaruh yang signifikan dari variabel bagi hasil pajak dan retribusi terhadap belanja desa bidang pembangunan desa pada Desa Pulau Baru Kecamatan Kuantan Hilir Seberang Kabupaten Kuantan Singingi. Dengan demikian **H_4 diterima**.

Berdasarkan Undang-Undang No. 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah memaparkan bagian hasil pajak dan retribusi (BHPR) dialokasikan sebesar 60% secara merata dan 40% secara proposional dari realisasi pajak dan retribusi masing-masing daerah. Pemerintah juga mengalokasikan BHPR kepada desa paling sedikit 10% untuk desa di wilayahnya, dengan memperhatikan aspek pemerataan dan potensi desa serta penggunaan ditetapkan sepenuhnya oleh desa penerima.

Hasil ini di dukung oleh beberapa penelitian yaitu penelitian Ummu habibah (2017) yang memperoleh hasil bahwa bagi hasil pajak dan retribusi berpengaruh pada belanja desa bidang pembangunan desa pada Desa Pulau Baru Kecamatan Kuantan Hilir Seberang Kabupaten Kuantan Singingi.

4.6.5 Pengaruh Pendapatan Asli Desa, Dana Desa, Alokasi Dana Desa, dan Bagi Hasil Pajak dan Retribusi terhadap Belanja Desa Bidang Pembangunan Desa Secara Simultan

Berikut ini tabel yang berisi hasil pengujian hipotesis 5 :

Tabel 4.17

Hasil Uji Hipotesis 5

Variabel	F_{hitung}	F_{tabel}	Sig.	α
1. Pendapatan Asli Desa	3,039	6,39	,000	<
2. Dana Desa				
3. Alokasi Dana Desa				
4. Bagi Hasil Pajak dan Retribusi				

Sumber : Data Olahan SPSS, 2020

Hipotesis kelima menguji secara simultan pengaruh seluruh variabel independen terhadap variabel dependen. Berdasarkan Tabel 4.17 Berdasarkan tabel hasil uji F, diketahui F_{hitung} sebesar 93.039, sedangkan nilai F_{tabel} sebesar 6,39. Dengan tingkat keyakinan 95% ($\alpha = 5\%$), dapat dilihat bahwa nilai signifikansi sebesar 0,000^b lebih kecil dari pada nilai alpha 0,05. Dengan demikian diketahui F_{hitung} (93,039) > F_{tabel} (6,39) dengan Sig. (0,000) < (0,05). Dengan demikian H_0 ditolak, maka terdapat pengaruh yang signifikan dari variabel independen terhadap variabel dependen. Variabel independen (Pendapatan asli desa, dana desa, alokasi dana desa dan bagi hasil pajak dan retribusi) secara simultan berpengaruh signifikan terhadap variabel dependen belanja desa bidang pembangunan desa pada Desa Pulau Baru Kecamatan Kuantan Hilir Seberang Kabupaten Kuantan Singingi. Dengan demikian **H_5 diterima**

(Bastian, 2015) Belanja desa bidang pembangunan digunakan untuk membiayai pelaksanaan program dan kegiatan pembangunan desa yang ditujukan untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat desa, peningkatan kualitas hidup manusia serta penanggulangan kemiskinan. Semakin besar pengeluaran anggaran dalam belanja pembangunan maka akan menurun angka kemiskinan. Semakin besarnya alokasi belanja desa bidang pembangunan diharapkan mampu menekan angka kemiskinan sehingga angka kemiskinan akan menurun.

Hasil ini di dukung oleh beberapa penelitian yaitu penelitian Ummu habibah (2017) yang memperoleh hasil bahwa pendapatan asli desa, dana desa, alokasi dana desa, dan bagi hasil pajak dan retribusi berpengaruh signifikan pada belanja desa bidang pembangunan desa pada Desa Pulau Baru Kecamatan Kuantan Hilir Seberang Kabupaten Kuantan Singingi.

BAB V

PENUTUP

5.1 Kesimpulan

Berdasarkan hasil analisis dan pembahasan yang telah dikemukakan pada bab sebelumnya, maka dapat diambil kesimpulan sebagai berikut:

1. Hasil pengujian hipotesis pertama membuktikan bahwa pendapatan asli desa secara parsial berpengaruh signifikan terhadap belanja desa bidang pembangunan Desa Pada Desa Pulau Baru Kecamatan Kuantan Hilir Seberang Kabupaten Kuantan Singingi.
2. Hasil pengujian hipotesis kedua membuktikan bahwa dana desa secara parsial berpengaruh signifikan terhadap belanja desa bidang pembangunan desa pada Desa Pulau Baru Kecamatan Kuantan Hilir Seberang Kabupaten Kuantan Singingi.
3. Hasil pengujian hipotesis ketiga membuktikan bahwa alokasi dana desa secara parsial berpengaruh signifikan terhadap belanja desa bidang pembangunan desa pada Desa Pulau Baru Kecamatan Kuantan Hilir Seberang Kabupaten Kuantan Singingi.
4. Hasil pengujian hipotesis keempat membuktikan bahwa bagi hasil pajak dan retribusi secara parsial berpengaruh signifikan terhadap belanja desa bidang pembangunan desa pada Desa Pulau Baru Kecamatan Kuantan Hilir Seberang Kabupaten Kuantan Singingi.
5. Hasil pengujian hipotesis ketiga membuktikan bahwa pendapatan asli desa, danadesa, alokasi dana desa dan bagi hasil pajak dan retribusi secara simultan berpengaruh signifikan terhadap belanja desa bidang pembangunan desa pada Desa Pulau Baru Kecamatan Kuantan Hilir Seberang Kabupaten Kuantan Singingi.

6. Besarnya pengaruh pendapatan asli desa, dana desa, alokasi dana desa, dan bagi hasil pajak dan retribusi secara simultan terhadap belanja desa bidang pembangunan desa sebesar 94,8%.

5.2 Saran

Berdasarkan kesimpulan diatas, adapun saran-saran yang ingin peneliti sampaikan adalah sebagai berikut:

1. Sebaiknya Pemerintah Desa Pulau Baru lebih bijak dalam mengelola Pendapatan Asli Desa bukan hanya mengandalkan pendapatan yang berasal dari Pendapatan Bunga/Jasa Giro saja, akan tetapi pemerintah desa pulau baru harus lebih giat dan handal dalam mengelola Badan Usaha MilikDesa (BUMDes) yang selama ini tidak terlaksana dengan baik agar dapat menambah Pendapatan Asli Desa Pulau Baru.
2. Menambah sampel penelitian di desa lain yang ada di Kabupaten Kuantan Singingi dalam mengukur pengaruh pendapatan asli desa, dana desa, alokasi dana desa dan bagi hasil pajak dan retribusi terhadap belanja desa bidang pembangunan desa pada Desa Pulau Baru Kecamatan Kuantan Hilir Seberang Kabupaten Kuantan Singingi.
3. Penelitian selanjutnya dapat menambahkan variabel lain yang dapat mempengaruhi terhadap belanja desa bidang pembangunan desa pada Desa Pulau Baru Kecamatan Kuantan Hilir Seberang Kabupaten Kuantan Singingi.
4. Penelitian selanjutnya dapat membandingkan data anggaran pendapatan dan belanja desa pada desa yang diteliti dengan desa-desa lain agar dapat membandingkan besarnya dana yang diterima pada setiapdesa.

5. Menjadikan hasil penelitian ini sebagai tambahan wacana penelitian empiris bagi akademis dan pertimbangan untuk melakukan penelitian-penelitian selanjutnya.

DAFTAR PUSTAKA

BUKU:

- A Saibani. 2014. *Pedoman Umum Penyelenggaraan Pemerintahan Desa*. Jakarta: Media Pusaka.
- Bastian, 2015. *Akuntansi Untuk Kecamatan dan Desa*. Erlangga : Jakarta.
- Ghozali. 2006. *Aplikasi Analisis Multivariat dengan program SPSS (Edisi Ke 4)*. Semarang: Badan Penerbit Universitas Diponegoro.
- , 2013. *Aplikasi Analisis Multivariat dengan program SPSS*. Semarang: Badan Penerbit Universitas Diponegoro
- , 2013. *Aplikasi Analisis Multivariat dengan program SPSS (Edisi Ke 7)*. Semarang: Badan Penerbit Universitas Diponegoro.
- Gujarati. 2003. *Ekonomi Dasar*. Terjemahan: Sumarno Zain, Jakarta: Erlangga.
- Indriantoro dan Supomo, 1999. *Metodologi Penelitian Bisnis Untuk Akuntansi dan Manajemen*. Yogyakarta : BPFE
- , 2002. *Metodologi Penelitian Bisnis Untuk Akuntansi dan Manajemen. Edisi pertama*. Yogyakarta : BPFE
- Kartohadikoesoemo, 2002. *Menyoal (Kembali) Otonomi Desa*. Yogyakarta.
- Moleong, 2014. *Metode Penelitian Kuantitatif, Edisi Revisi*. PT Remaja Rosdakarya, Bandung.
- Nurcholis, 2004. *Pemerintahan Desa*. Jakarta: Erlangga.
- , 2011. *Pertumbuhan dan Penyelenggaraan Pemerintahan Desa*. Jakarta : Penerbit Erlangga.
- Nurman, 2015. *Strategi Pembangunan Daerah*. Jakarta : Raja Grafindo Persada.
- Pasalog, 2012. *Teori Administrasi Publik*. Yogyakarta: Alfabeta.
- Priyatno, 2012. *Cara Belajar Analisis Data dengan SPSS 20*. Yogyakarta : Andi Offset.
- R. Bintaro, *Dalam Interaksi Desa – Kota Dan Permasalahannya*. Jakarta: Ghalia Indonesia, 1989.
- Raharjo, 2013. *Teori-Teori Pembangunan Ekonomi*. Yogyakarta : Graha Ilmu.

- Sahdan. 2004. *Buku Saku Pedoman Alokasi Dana Desa*. FPPD, Bandung.
- Santoso. 2002. *Riset Pemasaran : Konsep dan Aplikasinya dengan SPSS*, Jakarta : PT Elex Media Computindo Kelompok Gramedia.
- Sugiyono. 2013. *Metode Penelitian Kuantitatif Kualitatif Dan R&D*. Bandung: Alfabeta.
- . 2015. *Metode Penelitian Kuantitatif Kualitatif Dan R&D*. Bandung: Alfabeta.
- . 2018. *Metode Penelitian Kuantitatif Kualitatif Dan R&D*. Bandung: Alfabeta.
- Sunyoto, 2007. *Analisis Regresi dan Korelasi Bivariat Ringkasan dan Kasus*. Yogyakarta: Amara Books.
- Widjaja. 2005. *Penyelenggaraan Otonomi Daerah Di Indonesia Dalam Rangka Sosialisasi UU No 32 Tahun 2004 Tentang Pemerintahan Daerah*. Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada.
- Wijaya, 2018. *Hukum Jaminan Sosial Indonesia*. Jakarta, Sinar Grafika
- Wiyono, 2011. *Merancang Penelitian Bisnis dengan Alat Analisis SPSS 17.0 dan SmartPLS 2.0*. Yogyakarta : UPP STIM YKPN

JURNAL/SKRIPSI:

- Faidar. 2014. *Analisis Pendapatan Asli Desa Terhadap Pembangunan Pada Desa Sangkir Indah*. Universitas Pasir Pangaraian.
- Habibah. 2017. *Analisis Pengaruh Pendapatan Asli Desa (Pades), Dana Desa (DD), Alokasi Dana Desa (ADD), Dan Bagi Hasil Pajak Dan Retribusi Terhadap Belanja Desa Bidang Pendidikan*. Universitas Muhammadiyah Surakarta.
- Harnita. 2013. *Analisis Pendapatan Asli Daerah Terhadap Belanja Daerah Di Kabupaten Rokan Hulu*.
- Kaeng. 2015. *Analisis Pendapatan Asli Daerah Untuk Belanja Daerah Pada Pemerintah Kota Tomohon*. Jurnal EMBA, Volume 3, Nomor 2, Juni 2015. Hal. 958-965. ISSN 2303-1174.
- Marizka. 2010. *Analisis Kinerja Pengelolaan Anggaran Pendapatan Dan Belanja Daerah Pemerintah Kota Medan*. Universitas Sumatra Utara.
- Rizal. 2019. *Pengaruh Pendapatan Asli Daerah Terhadap Belanja Modal Di Kota Langsa*. Jurnal Ekonomika. Vol3, No 1, April 2019.

Safitri. 2019. *Pengaruh Kontribusi Pendapatan Asli Daerah Terhadap Anggaran Pendapatan Belanja Daerah (PAD) Di Kabupaten Trenggalek*. Universitas Islam Negeri Walisongo.

Suhairi. 2016. *Analisis Pendapatan Desa Terhadap Belanja Desa Pada Desa Kepayang Kecamatan Kepenuhan Hulu*. Universitas Pasir Pangraian.

Yanti. 2016. *Pengaruh Pendapatan Asli Daerah, Dana Perimbangan, Dan Lain-Lain Pendapatan Yang Sah Terhadap Belanja Daerah Di Kota Cimahi Tahun Anggaran 2005-2014*.

Yuliawati. 2019. *Pengaruh Alokasi Dana Desa (ADD), Dana Desa (DD), Pendapatan Asli Desa (Pades), Dan Bantuan Keuangan APBD Terhadap Belanja Desa Bidang Pembangunan Desa*. Universitas Muhammadiyah Surakarta.

PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN:

Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 113 Tahun 2014 Tentang Pengelolaan Keuangan Desa.

Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi Republik Indonesia Nomor 19 Tahun 2017 Tentang Penetapan Prioritas Penggunaan Dana Desa Tahun 2018.

Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi Nomor 3 Tahun 2015 Tentang Pendamping Desa.

Peraturan Menteri Keuangan Nomor 225 Tahun 2017 Tentang Pengelolaan Transfer Ke Daerah dan Dana Desa.

Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 Tentang Standar Akuntansi Pemerintahan (SAP).

Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 Tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah.

Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2016 Tentang Desa.

Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2014 Tentang Desa.

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Desa.

LAMPIRAN 1
Anggaran Pendapatan dan
Belanja Desa tahun 2015-2018

LAMPIRAN I : PERATURAN DESA PULAU BARU
 : NOMOR 02 TAHUN 2015
 : TANGGAL MARET 2015

ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DESA
 PULAU BARU
 TAHUN ANGGARAN 2015

KODE REKENING	URAIAN	ANGGARAN (Rp)	KETERANGAN
1	2	3	4
1 20 192 0 00 1	PENDAPATAN DESA		
1 20 192 0 00 1 1	PENDAPATAN ASLI DESA	Rp 1.083.655.000	
1 20 192 0 00 1 2	ALOKASI ANGGARAN DARI APBN	Rp -	
1 20 192 0 00 1 2 1	Dana Desa	Rp 260.605.000	
		Rp 260.605.000	
1 20 192 0 00 1 3	BAGI HASIL PAJAK DAN RETRIBUSI KABUPATEN		
1 20 192 0 00 1 4	BAGIAN DANA PERIMBANGAN PEMERINTAH PUSAT DAN DAERAH PUSAT DAN DAERAH	Rp -	
1 20 192 0 00 1 4 1	Alokasi Dana Desa	Rp 172.450.000	
		Rp 172.450.000	
1 20 192 0 00 1 5	BANTUAN KEUANGAN DARI PEMERINTAH PROVINSI DAN KABUPATEN		
1 20 192 0 00 1 5 1	Bantuan Keuangan Dari Pemerintah Provinsi	Rp 500.000.000	
1 20 192 0 00 1 6	HIBAH DAN SUMBANGAN DARI PIHAK KETIGA	Rp 500.000.000	
1 20 192 0 00 1 7	LAIN-LAIN PENDAPATAN DESA YANG SAH	Rp 150.600.000	
		Rp -	
	JUMLAH PENDAPATAN	Rp 1.083.655.000	
1 20 192 0 00 2	BELANJA		
1 20 192 0 00 2 1	BELANJA LANGSUNG		
1 20 192 1	Program Pelayanan Administrasi Dan Penyelenggaraan Desa	Rp 462.655.000	
1 20 192 1 13	Kegiatan Penunjang Operasional Administrasi Pemerintahan Desa (PKPD-ADD)	Rp 10.000.000	
		Rp -	
1 20 192 1 13 2 1 1	Belanja Pegawai		
1 20 192 1 13 2 1 2	Belanja Barang Dan Jasa	Rp -	
1 20 192 1 13 2 1 3	Belanja Modal	Rp 8.000.000	
		Rp 2.000.000	
1 20 192 1 14	PENUNJANG OPERASIONAL PEMERINTAH DESA DARI PROVINSI RIAU		
1 20 192 1 14 2 1 1	Belanja Pegawai	Rp 37.605.000	
1 20 192 1 14 2 1 2	Belanja Barang dan Jasa	Rp 1.000.000	
1 20 192 1 14 2 1 3	Belanja Modal	Rp 11.000.000	
		Rp 25.605.000	
1 20 192 7	PROGRAM PENINGKATAN DAN PENGEMBANGAN PENGELOLAAN KEUANGAN DESA		
1 20 192 7 02	KEGIATAN PENYUSUNAN RANCANGAN APBDes	Rp 3.050.000	
1 20 192 7 02 2 1	Belanja Pegawai	Rp 3.050.000	
1 20 192 7 02 2 2	Belanja Barang dan Jasa	Rp 300.000	
		Rp 2.750.000	
1 20 192 7 02	KEGIATAN PENYUSUNAN RANCANGAN PERATURAN DESA		
1 20 192 7 02 2 1	Belanja Pegawai		
1 20 192 7 02 2 2	Belanja Barang dan Jasa	Rp -	
		Rp -	
1 20 192 8	Program Pelayanan Administrasi Dan Penyelenggaraan Tugas Pokok Dan Fungsi BPD	Rp 12.000.000	
1 20 192 8 06	Kegiatan Penunjang Operasional Administrasi BPD		
1 20 192 8 06 2 1 1	Belanja Pegawai	Rp 12.000.000	
1 20 192 8 06 2 1 2	Belanja Barang dan Jasa	Rp -	
		Rp 12.000.000	
1 20 192 10	PROGRAM PEMBANGUNAN INFRASTRUKTUR DESA		
1 20 192 10 34	KEGIATAN PEMBANGUNAN JALAN DESA (SEMENISASI)		
1 20 192 10 34 2 1 3 1	Belanja Pegawai	Rp 89.250.000	
1 20 192 10 34 2 1 3 2	Belanja Barang dan Jasa	Rp 6.000.000	
		Rp 4.000.000	

KODE REKENING	URAIAN	ANGGARAN (Rp)	KETERANGAN
1	2	3	4
1 20 192 10 34 2 1 3 3	Belanja Modal	Rp 79.250.000	
1 20 192 11	PROGRAM PEMBANGUNAN INFRASTRUKTUR DESA	Rp 300.000.000	
1 20 192 11 01	KEGIATAN PEMBANGUNAN TURAP DAN SEMENISASI	Rp 300.000.000	
1 20 192 11 01 2 1 3 1	Belanja Pegawai	Rp 1.000.000	
1 20 192 10 01 2 1 3 2	Belanja Barang dan Jasa	Rp 375.000	
1 20 192 10 01 2 1 3 3	Belanja Modal	Rp 298.625.000	
1 20 192 11 12	KEGIATAN PEMBANGUNAN JALAN DESA (SEMENISASI)	Rp -	
1 20 192 11 12 2 1 3 1	Belanja Pegawai	Rp -	
1 20 192 10 12 2 1 3 2	Belanja Barang dan Jasa	Rp -	
1 20 192 10 12 2 1 3 3	Belanja Modal	Rp -	
1 20 192 19	PROGRAM PERENCANAAN PEMBANGUNAN DESA		
1 20 192 19 02 2	KEGIATAN PENYUSUNAN RPJM DESA DAN RKP DESA	Rp 10.750.000	
1 20 192 19 02 2 1 1	Belanja Pegawai	Rp 7.450.000	
1 20 192 19 02 2 1 2	Belanja Barang dan Jasa	Rp 3.300.000	
1 20 192 19 02 2 1 3	Belanja Modal	Rp -	
1 20 192 0 00 2 2	BELANJA TIDAK LANGSUNG	Rp 121.000.000	
1 20 192 0 00 2 2 1	Belanja Pegawai	Rp 105.000.000	
1 20 192 0 00 2 2 1 1	Penghasilan Tetap Kepala Desa dan Perangkat	Rp 74.400.000	
1 20 192 0 00 2 2 1 2	Tunjangan Pimpinan dan Anggota BPD	Rp 30.600.000	
1 20 192 0 00 2 2 1 3	Santunan/Tunjangan Kesehatan Perangkat Desa	Rp -	
	JUMLAH BELANJA	Rp 583.655.000	
	SURPLUS / (DEFISIT)	Rp 500.000.000	
1 20 192 0 00 3	PEMBIAYAAN		
1 20 192 0 00 3 1	PENERIMAAN PEMBIAYAAN		
1 20 192 0 00 3 1 1	Sisa Lebih Perhitungan Anggaran (SILPA) Tahun Sebelumnya		
1 20 192 0 00 3 2	PENGELUARAN PEMBIAYAAN		
1 20 192 0 00 3 2 1	Pembentukan Dana Cadangan		
	PEMBIAYAAN NETTO	Rp -	



LAMPIRAN PERDES NOMOR : 3 Tahun 2016
TANGGAL : 25 MEI 2016
TENTANG : ANGGARAN PENDAPATAN DAN
BELANJA DESA TAHUN 2016

ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DESA
PEMERINTAH DESA PULAU BARU
TAHUN ANGGARAN 2016

KODE REKENING	URAIAN	ANGGARAN (Rp)	KETERANGAN
1	2	3	4
1	PENDAPATAN		
1 1	<i>Pendapatan Asli Desa (PADes)</i>	747,349,000	
1 1 1	Hasil Usaha		
	- Hasil Badan Usaha Milik Desa		
	- Tanah Kas Desa		
1 1 2	Hasil Aset Desa :		
	- Pasar Desa		
	- Bangunan Desa		
	- Objek Wisata yang dikelola desa		
	- Pemandian Umum		
	- Tempat Pemancingan		
	- Hutan Desa		
	- Jaringan Irigasi Desa		
	- Lapangan Desa		
	- Lain-lain Kekayaan Desa yang sah		
1 1 3	Swadaya, Partisipasi dan Gotong Royong		
1 1 4	Lain-lain Pendapatan Asli Desa yang sah		
	- Pungutan Desa		
	- Jasa Giro /Pendapatan Bunga	1,000,000	
	- Penerimaan Komisi		
	- Penerimaan Hadiah		
	- Denda atas keterlambatan pelaksanaan pekerjaan		
	- Dst		
1 2	<i>Pendapatan Transfer</i>		
1 2 1	Dana Desa yang Bersumber Dari APBN	590,393,000	
1 2 2	Bagian dari hasil pajak & retribusi daerah kabupaten	26,283,000	
1 2 3	Alokasi Dana Desa dari APBD Kabupaten	117,673,000	
1 2 4	Bantuan Keuangan		
1 2 4 1	Bantuan Provinsi	12,000,000	
1 2 4 2	Bantuan Kabupaten		
1 3	<i>Pendapatan Lain Lain</i>		
1 3 1	Hibah dan Sumbangan dari pihak ke-3 yang tidak mengikat		
1 3 2	Lain-lain Pendapatan Desa yang sah		
	JUMLAH PENDAPATAN	747,349,000	
2	BELANJA	1,247,349,000	
2 1	BIDANG PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DESA	250,456,000	
2 1 1	Penghasilan tetap dan Tunjangan Kepala Desa dan Perangkat serta Tunjangan BPD	112,800,000	
2 1 1 1	Belanja Pegawai	112,800,000	
	Penghasilan tetap dan Tunjangan Kepala Desa dan Perangkat	74,400,000	
	- Penghasilan Tetap Kepala Desa	18,000,000	ADD
	- Penghasilan Tetap Sekretaris Desa	12,000,000	ADD
	- Penghasilan Tetap Kepala Urusan	8,400,000	ADD
	- Penghasilan Tetap Kepala Seksi	14,400,000	ADD
	- Penghasilan Tetap Kepala Dusun	21,600,000	ADD
	Tunjangan Kepala Desa dan Perangkat	7,800,000	
	- Tunjangan Pemegang Kekuasaan Pengelolaan Keuangan Desa (PKPKD)	3,600,000	ADD
	- Tunjangan Teknis Pengelolaan Keuangan Desa (PTPKD)	2,400,000	ADD
	- Tunjangan Bendahara Desa	1,800,000	ADD

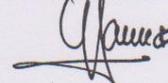
KODE REKENING	URAIAN	ANGGARAN (Rp)	KETERANGAN
1	2	3	4
	Tunjangan BPD	30,600,000	
	- Tunjangan Ketua BPD	7,200,000	ADD
	- Tunjangan Wakil Ketua BPD	6,600,000	ADD
	- Tunjangan Sekretaris BPD	6,000,000	ADD
	- Tunjangan Anggota BPD	10,800,000	ADD
2 1 2	Operasional Perkantoran	106,500,000	
2 1 2 2	Belanja Barang dan Jasa	106,500,000	
	- Honor Tim Pelaksana Kegiatan	1,530,000	ADD, Bunga Bank, BANKEU, SILPA
	- Belanja ATK	2,503,100	ADD, Bunga Bank, BANKEU, SILPA
	- Belanja Foto Kopi / Penggandaan	2,411,100	ADD, Bunga Bank, BANKEU, SILPA
	- Belanja Benda Pos / Materai	930,000	ADD, BANKEU, SILPA
	- Belanja Pakaian Dinas dan Atribut	18,169,700	SILPA
	- Belanja Modal	28,331,400	SILPA
	- Makan dan Minum Rapat	3,674,000	ADD, BANKEU, SILPA
	- Belanja Modal PEMDES	1,950,700	Bankeu
	- Biaya Perjalanan Dinas		
	- Perjalanan Dinas dalam Kecamatan	5,000,000	ADD, BANKEU, SILPA
	- Perjalanan Dinas Dalam Kabupaten	6,000,000	ADD, BANKEU, SILPA
	- Perjalanan Dinas Luar Kabupaten	16,000,000	ADD, BANKEU, SILPA
	- Perjalanan Dinas Luar Provinsi	20,000,000	ADD, BANKEU, SILPA
2 1 3	Operasional BPD		
2 1 3 2	Belanja Barang dan Jasa	23,500,000	
	- Honor Tim Pelaksana Kegiatan	408,000	ADD
	- Alat Tulis Kantor	1,573,100	ADD
	- Fotokopi dan Penggandaan	1,164,300	ADD
	- Benda Pos dan Materai	519,000	ADD
	- Belanja Jasa Kantor	1,620,000	
	- Biaya Makan dan Minum Rapat	3,083,600	ADD
	- Belanja Modal	5,522,700	
	- Biaya Perjalanan Dinas	9,609,300	ADD
2 1 4	Operasional RT/RW		
2 1 4 2	Belanja Barang dan Jasa	4,656,000	
	- Belanja ATK	1,155,000	ADD
	- Belanja Foto Kopi / Penggandaan	221,000	ADD
	- Belanja Benda Pos / Materai	180,000	ADD
	- Belanja Bahan Bakar	2,000,000	ADD
	- Makan dan Minum Rapat	1,100,000	
2 1 14	Penyusunan Rancangan Perdes APBDes	3,000,000	SILPA
2 1 14 2	Honor Tim Pelaksana Kegiatan		
	- Ketua	204,000	SILPA
	- Sekretaris	153,000	SILPA
	- Anggota	102,000	SILPA
	- Belanja Perjalanan Dinas		
	- Dalam Rangka Konsultasi dan Koordinasi (3org x 2 kali)	300,000	SILPA
	- Belanja Perjalanan Dinas dalam Kabupaten		
	- Dalam Rangka Penyampaian Dokumen (2 org x 1 Kali)	500,000	SILPA
	- Belanja Alat Tulis Kantor	474,900	SILPA
	- Belanja Cetak dan Penggandaan	507,100	SILPA
	- Belanja Makan dan Minum Rapat	759,000	SILPA
2 2	BIDANG PELAKSANAAN PEMBANGUNAN DESA	990,393,000	SILPA dan APBN
2 2 2	Pembangunan, Pemanfaatan dan Pemeliharaan Jalan Pemukiman	990,393,000	SILPA dan APBN
2 2 2 2	Belanja Barang dan Jasa	31,652,600	SILPA dan APBN
	- Honorarium Tim Pelaksana Kegiatan (TPK)	22,389,000	SILPA dan APBN
	- Ketua	8,619,000	SILPA dan APBN
	- Sekretaris	7,242,000	SILPA dan APBN
	- Anggota	6,528,000	SILPA dan APBN
	- Alat Tulis Kantor	1,493,200	SILPA dan APBN
	- Foto Copy dan Pengandaan Laporan	1,104,400	SILPA dan APBN
	- Kosumsi Rapat Kegiatan	495,000	SILPA dan APBN
	- Perencanaan	6,171,000	SILPA dan APBN

KODE REKENING				URAIAN	ANGGARAN (Rp)	KETERANGAN
1	2	3	4	2	3	4
2	2	2	3	Belanja Modal	958,741,700	SILPA dan APBN
				Upah Tenaga Kerja :	214,240,800	SILPA dan APBN
				- Pekerja	160,741,800	SILPA dan APBN
				- Tukang Kayu	7,344,000	SILPA dan APBN
				- Tukang Batu	26,112,000	SILPA dan APBN
				- Kepala tukang	5,049,000	SILPA dan APBN
				- Mandor	14,994,000	SILPA dan APBN
				Peralatan :	3,721,300	SILPA dan APBN
				- Gerobak dorong	2,063,700	SILPA dan APBN
				- Ember cor	785,200	SILPA dan APBN
				- Drum air	872,400	SILPA dan APBN
				Bahan Material semenisasi	740,779,600	SILPA dan APBN
				- Pasir urug	32,475,700	SILPA dan APBN
				- Pasir Beton	73,183,100	SILPA dan APBN
				- Kerikil	139,221,800	SILPA dan APBN
				- Semen Type PCC @ 50Kg	425,636,400	SILPA dan APBN
				- Kayu balok 5/7	2,219,800	SILPA dan APBN
				- Paku biasa 2" - 5"	2,890,700	SILPA dan APBN
				- Kayu papan 2/20	1,614,400	SILPA dan APBN
				- Kayu kelas III	19,136,200	SILPA dan APBN
				- Minyak bekisting	567,100	SILPA dan APBN
				- Balok kayu kelas II	7,870,700	SILPA dan APBN
				- Dolken kayu φ 8-10	7,716,800	SILPA dan APBN
				- Tarpal plastik	27,592,500	SILPA dan APBN
				- Papan nama kegiatan	654,400	SILPA dan APBN
2	3			BIDANG PEMBINAAN KEMASYARAKATAN	6,500,000	ADD
2	3	1		Pembinaan dan Operasional LPM	1,000,000	ADD
2	3	1	2	Belanja Barang dan Jasa	1,000,000	ADD
				- Biaya Operasional LPM	1,000,000	ADD
2	3	2		Pembinaan dan Operasional PKK	2,500,000	ADD
2	3	2	2	Belanja Barang dan Jasa	2,500,000	ADD
				- Belanja ATK	100,000	ADD
				- Bantuan Kegiatan PKK	1,000,000	ADD
				- Bantuan Transpor	1,400,000	ADD
2	3	3		Pembinaan dan Operasional Posyandu	2,000,000	ADD
2	3	3	2	Belanja Barang dan Jasa	2,000,000	ADD
				- Belanja ATK	55,000	ADD
				- Bahan-bahan PKK	1,945,000	ADD
2	3	4		Pembinaan dan Operasional Karang Taruna/Pemuda/Remaja	1,000,000	ADD
2	3	4	2	Belanja Barang dan Jasa	1,000,000	ADD
				- Hibah Perlengkapan Olahraga	1,000,000	ADD
2	4			BIDANG PEMBERDAYAAN MASYARAKAT	-	
2	4	2		Pengembangan Kapasitas Kepala Desa dan Perangkat Desa	-	
2	4	2	2	Belanja Barang dan Jasa	-	
				- Honor Tim Pelaksana Kegiatan		
				- Honorarium narasumber		
				- bantuan uang transpor		
				- Belanja ATK		
				- Belanja Foto Kopi / Penggandaan		
				- Belanja Makan dan Minum Rapat		
				- biaya perjalanan dinas		
2	4	6		Peningkatan kapasitas kelompok perempuan	-	
2	4	6	2	Belanja Barang dan Jasa	-	
				- Honor Tim Pelaksana Kegiatan		
				- Honorarium narasumber		
				- bantuan uang transpor		
				- Belanja ATK		
				- Belanja Foto Kopi / Penggandaan		
				- Belanja Makan dan Minum Rapat		

KODE REKENING	URAIAN	ANGGARAN (Rp)	KETERANGAN
1	2	3	4
2 4 6 3	Belanja Modal		
	bantuan perlengkapan menjahit		
	- bantuan perlengkapan menjahit		
	- bantuan mesin jahit		
2 4 12	Peningkatan kapasitas kelompok pemuda		
2 4 12 2	Belanja Barang dan Jasa		
	- Honor Tim Pelaksana Kegiatan		
	- Honorarium narasumber		
	- bantuan uang transpor		
	- Belanja ATK		
	- Belanja Foto Kopi / Penggandaan		
	- Belanja Makan dan Minum Rapat		
2 4 12 3	Belanja Modal		
	bantuan perlengkapan		
	- bantuan perlengkapan peralatan bengkel		
	- bantuan mesin compresor		
2 5	BIDANG TAK TERDUGA		
2 5 1	Kegiatan Kejadian Luar Biasa		
2 5 1 2	Belanja Barang dan Jasa		
	JUMLAH BELANJA	1,247,349,000	
	SURPLUS / DEFISIT (PENDAPATAN - BELANJA)	(500,000,000)	
3	PEMBIAYAAN		
3 1	Penerimaan Pembiayaan		
3 1 1	SILPA	500,000,000	
	- Silpa Kegiatan operasional perkantoran	500,000,000	
	- Silpa Kegiatan Pembangunan, Pemanfaatan dan Pemeliharaan Jalan Pemukiman	100,000,000	
	- Silpa Kegiatan Pembangunan drainase	400,000,000	
3 1 2	Pencairan Dana Cadangan		
3 1 3	Hasil Kekayaan Desa Yang dipisahkan		
3 1 4	Penerimaan Pinjaman		
	JUMLAH (RP)	500,000,000	
3 2	Pengeluaran Pembiayaan		
3 2 1	Pembentukan Dana Cadangan		
3 2 2	Penyertaan Modal Desa		
3 2 3	Pembayaran Hutang		
3 2 4	Pemberian Pinjaman Desa		
	JUMLAH (RP)	-	
	PEMBIAYAAN NETTO (PENERIMAAN PEMBIAYAAN - PENGELUARAN PEMBIAYAAN)	500,000,000	
	TAHUN BERJALAN (SELISIH ANTARA PEMBIAYAAN NETTO DENGAN HASIL SURPLUS/DEFISIT)	-	

Pulau Baru, 25 Mei 2016

KEPALA DESA PULAU BARU


YARLIS

LAMPIRAN PERDES NOMOR : Tahun 2017
TANGGAL : Maret 2017

ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DESA
PULAU BARU
TAHUN ANGGARAN 2017

KODE REKENING	URAIAN	ANGGARAN (Rp)	KETERANGAN
1	2	3	4
0 1	PENDAPATAN DESA	Rp 1.186.912.000	
1	Pendapatan Asli Desa (PADes)		
	Hasil Usaha:		
	- Hasil Badan Usaha Milik Desa		
	- Tanah Kas Desa		
2	Hasil Aset Desa:		
	- Pasar Desa		
	- Bangunan Desa		
	- Objek Wisata Yang Dikelola Desa		
	- Pemandian Umum		
	- Tempat Pemancingan		
	- Hutan Desa		
	- Jaringan Irigasi Desa		
	- Lapangan Desa		
	- Lain-Lain Kekayaan Desa Yang Sah		
3	Swadaya, Partisipasi dan Gotong Royong		
4	Lain-Lain Pendapatan Asli Desa Yang Sah		
	- Pungutan Desa		
	- Jasa Giro/Pendapatan Bunga	Rp 1.000.000	
	- Penerimaan Komisi		
	- Penerimaan Hibah		
	- Denda atas Keterlambatan Pelaksanaan Pekerjaan		
	- Dst		
2	Pendapatan Transfer		
	Dana Desa Yang Bersumber Dari APBN	Rp 752.060.000	
	Bagian Dari Hasil Pajak Dan Retribusi Daerah Kabupaten	Rp 22.030.000	
	Alokasi Dana desa Dari APBD Kabupaten	Rp 411.822.000	
	Bantuan Keuangan		
	Bantuan Provinsi		
	Bantuan Kabupaten		
3	Pendapatan Lain-Lain		
	Hibah Dan Sumbangan Dari Pihak Ke-3 Yang Tidak Mengikat		
	Lain-Lain Pendapatan Desa Yang Sah		
	JUMLAH PENDAPATAN	Rp 1.186.912.000	
0 2	BELANJA	Rp 1.186.912.000	
	BIDANG PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DESA	Rp 293.580.000	
0 1 0 1	Penghasilan Tetap Dan Tunjangan Kepala Desa Dan Perangkat	Rp 186.580.000	
	Belanja Pegawai	Rp 186.580.000	
	Penghasilan Tetap Dan Tunjangan Kepala Desa Dan Perangkat	Rp 123.200.000	
	- Penghasilan Tetap Kepala Desa	Rp 26.000.000	
	- Penghasilan Tetap sekretaris desa	Rp 18.200.000	
	- Penghasilan Tetap Kepala Urusan	Rp 13.300.000	
	- Penghasilan Tetap Kepala Seksi	Rp 26.400.000	
	- Penghasilan Tetap Kepala Dusun	Rp 39.300.000	

KODE REKENING	URAIAN	ANGGARAN (Rp)	KETERANGAN
1	2	3	4
	Tunjangan Kepala Desa dan Perangkat	Rp 22.040.000	
	- Tunjangan Pemegang Kekuasaan Pengelolaan Keuangan Desa (PKPKD)	Rp 6.000.000	
	- Tunjangan Teknis Pengelolaan Keuangan Desa (PTPKD)	Rp 3.600.000	
	- Tunjangan Bendahara Desa	Rp 3.000.000	
	- Tunjangan Kesehatan Kepala Desa	Rp 600.000	
	- Tunjangan Operator Desa	Rp 3.200.000	
	- Tunjangan Kinerja Kepala Desa (1 org x 2 bln)	Rp 1.200.000	
	- Tunjangan Kinerja Sekretaris Desa (1 org x 2 bln)	Rp 840.000	
	- Tunjangan Kinerja Kepala Urusan (1 org x 2 bln)	Rp 600.000	
	- Tunjangan Kinerja Kepala Seksi (1 org x 2 bln)	Rp 1.200.000	
	- Tunjangan Kinerja Kepala Dusun (1 org x 2 bln)	Rp 1.800.000	
	Tunjangan BPD	Rp 41.430.000	
	- Tunjangan Ketua BPD	Rp 10.400.000	
	- Tunjangan Wakil Ketua BPD	Rp 9.160.000	
	- Tunjangan Sekretaris BPD	Rp 8.420.000	
	- Tunjangan Anggota BPD	Rp 13.360.000	
0 1 0 2	Operasional Perkantoran	Rp 51.000.000	
	Belanja Barang dan Jasa	Rp 51.000.000	
	- Honor Tim Pelaksana Kegiatan	Rp 500.000	
	- Alat Tulis Kantor	Rp 4.690.000	
	- Fotocopy dan Penggandaan	Rp 604.000	
	- Benda Pos dan Materai	Rp 1.366.000	
	- Biaya Musyawarah	Rp 2.200.000	
	- Biaya Publikasi dan Dokumentasi	Rp 3.700.000	
	- Belanja Modal PEMDES	Rp 33.420.000	
	- Biaya Perjalanan Dinas	Rp 4.500.000	
	- Perjalanan Dinas Dalam Kecamatan	Rp 2.400.000	
	- Perjalanan Dinas Luar Kecamatan	Rp 2.100.000	
0 1 0 3	Operasional BPD		
	Belanja Barang dan Jasa	Rp 12.000.000	
	- Alat Tulis Kantor	Rp 2.790.000	
	- Fotocopy dan Penggandaan	Rp 580.000	
	- Benda Pos dan Materai	Rp 630.000	
	- Biaya Musyawarah	Rp 3.300.000	
	- Biaya Perjalanan Dinas	Rp 4.700.000	
	- Perjalanan Dinas Dalam Kecamatan	Rp 3.200.000	
	- Perjalanan Dinas Luar Kecamatan	Rp 1.500.000	
0 1 0 4	Operasional RT/RW		
	Belanja Barang dan Jasa	Rp 6.000.000	
	Insentif RT/RW	Rp 6.000.000	
	- Insentif RW (3 org x 1 thn)	Rp 2.100.000	
	- Insentif RT (6 org x 1 thn)	Rp 3.900.000	
	Transportasi		
0 1 0 6	Pendataan Desa (Profil dan Pembuatan Instrumen Lomba Desa)		
	Belanja Barang dan Jasa	Rp 4.000.000	
	- Alat Tulis Kantor	Rp 280.000	
	- Honor Tim Khusus Pendataan	Rp 2.400.000	
	- Biaya Musyawarah	Rp 1.320.000	
0 1 1 0	Pengelolaan Informasi Desa		
	Pengadaan Internet Dan Website Desa	Rp 20.000.000	
	- Internet	Rp 7.500.000	
	- Backhaul	Rp 3.750.000	
	- Internet 10 Mbps	Rp 3.750.000	
	- Biaya Instalasi Awal	Rp 3.000.000	
	- Pajak	Rp 2.000.000	

KODE REKENING	URAIAN	ANGGARAN (Rp)	KETERANGAN
1	2	3	4
0 1 1 3	Penyusunan Rancangan RKPDes		
	Belanja Barang dan Jasa	Rp 7.000.000	
	- Alat Tulis Kantor		
	- Biaya Pengandaan	Rp 400.000	
	- Honor Tim Khusus Penyusun	Rp 4.950.000	
	- Biaya Musyawarah	Rp 1.650.000	
0 1 1 4	Penyusunan Rancangan APBDes		
	Belanja Barang dan Jasa	Rp 4.000.000	
	- Alat Tulis Kantor	Rp 460.000	
	- Honor Tim Khusus Penyusun	Rp 2.550.000	
	- Biaya Musyawarah	Rp 990.000	
0 1 1 9	Evaluasi Tingkat Perkembangan Desa		
	Belanja Barang dan Jasa	Rp 3.000.000	
	- Alat Tulis Kantor	Rp 550.000	
	- Fotocopy dan Pengandaan	Rp 120.000	
	- Makan dan Minum Rapat	Rp 1.430.000	
	Belanja Modal PEMDES	Rp 900.000	
0 2	BIDANG PELAKSANAAN PEMBANGUNAN DESA	Rp 761.427.000	
0 2 0 2	Pembangunan, Pemanfaatan, dan Pemeliharaan Jalan Pemukiman	Rp 277.264.400	
	Belanja Barang dan Jasa	Rp 7.648.000	
	Honorarium Tim Pelaksana Kegiatan (TPK)	Rp 5.900.000	
	- Ketua	Rp 1.600.000	
	- Sekretaris	Rp 1.300.000	
	- Anggota	Rp 3.000.000	
	Alat Tulis Kantor	Rp 716.500	
	Fotocopy dan Pengandaan Laporan	Rp 152.000	
	Konsumsi Rapat Kegiatan	Rp 880.000	
	Belanja Modal	Rp 269.615.900	
	Upah Tenaga Kerja	Rp 65.500.000	
	- Pekerja	Rp 45.900.000	
	- Tukang Kayu	Rp 1.300.000	
	- Tukang batu	Rp 6.000.000	
	- Kepala Tukang	Rp 1.050.000	
	- Mandor	Rp 11.250.000	
	Peralatan:	Rp 928.300	
	- Gerobak Dorong	Rp 519.200	
	- Ember cor	Rp 166.000	
	- Drum air	Rp 243.100	
	Bahan Material Semenisasi	Rp 203.187.600	
	- Pasir Urug	Rp 496.400	
	- Pasir Beton	Rp 16.963.200	
	- Kerikil	Rp 35.456.800	
	- Semen Portland 50 Kg	Rp 97.684.800	
	- Kayu balok 5/7	Rp 18.261.300	
	- Paku Biasa 2" - 5"	Rp 997.200	
	- Kayu Papan 3/20	Rp 10.704.900	
	- Kayu Kelas III	Rp 6.560.400	
	- Minyak Bekisting	Rp 123.200	
	- Balok Kayu Kelas III	Rp 3.379.600	
	- Dolken Kayu 8-10	Rp 1.809.300	
	- Tarpal Pelastik	Rp 10.600.500	
	- Plang Kegiatan	Rp 150.000	
0 2 0 4	Pembangunan Jembatan Desa (Box Culvert)	Rp 58.815.800	
	Belanja Barang dan Jasa	Rp 2.787.000	
	Honorarium Tim Pelaksana Kegiatan (TPK)	Rp 1.600.000	
	- Ketua	Rp 500.000	

KODE REKENING	URAIAN	ANGGARAN (Rp)	KETERANGAN
1	2	3	4
	- Sekretaris	Rp 350.000	
	- Anggota	Rp 750.000	
	Alat Tulis Kantor	Rp 406.000	
	Fotocopy dan Penggandaan Laporan	Rp 121.000	
	Konsumsi Rapat Kegiatan	Rp 660.000	
	Belanja Modal	Rp 56.028.800	
	Upah Tenaga Kerja	Rp 15.675.000	
	- Pekerja	Rp 9.775.000	
	- Tukang Kayu	Rp 2.300.000	
	- Tukang Batu	Rp 1.100.000	
	- Tukang Besi	Rp 1.000.000	
	- Tukang Keramik	Rp -	
	- Tukang Atap	Rp -	
	- Tukang Triplek	Rp -	
	- Tukang Cat	Rp -	
	- Kepala Tukang	Rp 600.000	
	- Mandor	Rp 900.000	
	Peralatan:	Rp 1.806.600	
	- Gerobak Dorong	Rp 1.557.600	
	- Ember Cor	Rp 249.000	
	Bahan Material	Rp 38.547.200	
	- Pasir Cor	Rp 1.778.400	
	- Kerikil	Rp 4.107.800	
	- Tanah Urug	Rp 2.059.200	
	- Semen Tipe PPC @50 Kg	Rp 13.761.600	
	- Paku	Rp 747.900	
	- Kayu Kelas II, 5/7	Rp 209.900	
	- Papan Kayu Kelas III, 2/20	Rp 198.800	
	- Balok Kayu Kelas II	Rp 2.728.700	
	- Kayu Kelas III	Rp 4.572.400	
	- Minyak Bekisting	Rp 72.800	
	- Dolken Kayu 8-10	Rp 1.332.000	
	- Besi Polos 12 MM Pj. 12	Rp 1.936.800	
	- Besi Polos 12 MM Pj. 12	Rp 4.331.600	
	- Kawat Ikat	Rp 609.400	
	- Terpal	Rp 99.900	
	- Papan Nama Kegiatan	Rp -	
0 2 1 8	Pembangunan Sarana dan Prasarana PAUD Desa	Rp 425.346.800	
	Belanja Barang dan Jasa	Rp 12.440.100	
	Honorarium Tim Pelaksana Kegiatan (TPK)	Rp 10.100.000	
	- Ketua	Rp 2.750.000	
	- Sekretaris	Rp 2.300.000	
	- Anggota	Rp 5.050.000	
	Alat Tulis Kantor	Rp 1.304.300	
	Fotocopy dan Penggandaan Laporan	Rp 375.800	
	Konsumsi Rapat Kegiatan	Rp 660.000	
	Belanja Modal	Rp 412.906.700	
	Upah Tenaga Kerja	Rp 77.515.000	
	- Pekerja	Rp 43.265.000	
	- Tukang Kayu	Rp 9.700.000	
	- Tukang Batu	Rp 10.300.000	
	- Tukang Besi	Rp 1.400.000	
	- Tukang Keramik	Rp 800.000	
	- Tukang Atap	Rp 500.000	
	- Tukang Triplek	Rp -	
	- Tukang Cat	Rp 3.300.000	
	- Kepala Tukang	Rp 3.600.000	
	- Mandor	Rp 4.300.000	

KODE REKENING	URAIAN	ANGGARAN (Rp)	KETERANGAN
1	2	3	4
	Peralatan:	Rp 986.900	
	- Gerobak Dorong	Rp 594.200	
	- Ember Cor	Rp 166.000	
	- Kuas	Rp 26.700	
	- Terpal Plastik Penutup Coran	Rp 200.000	
	Bahan Material	Rp 334.404.800	
	- Pasir Urug	Rp 808.700	
	- Pasir Beton	Rp 5.882.400	
	- Pasir Pasang	Rp 3.705.000	
	- Kerikil	Rp 12.755.800	
	- Tanah Urug	Rp 18.057.600	
	- Semen Tipe PPC @50 Kg	Rp 51.476.500	
	- Paku	Rp 2.077.500	
	- Kayu Kelas II, 5/10	Rp 4.617.800	
	- Kayu Kelas II, 5/7	Rp 2.099.000	
	- Papan Kayu Kelas II, 2/25 (Diketam)	Rp 745.800	
	- Balok Kayu Kelas II	Rp 5.457.400	
	- Papan Kayu Kelas III	Rp 209.900	
	- Kayu Kelas III	Rp 13.701.200	
	- Minyak Bekisting	Rp 162.400	
	- Dolken Kayu 8-10	Rp 3.196.800	
	- Besi Polos 10 MM Pj. 12	Rp 16.059.300	
	- Besi Polos 8 MM Pj. 12	Rp 4.863.800	
	- Besi Polos 6 MM Pj. 12	Rp 8.177.000	
	- Kawat Ikat	Rp 692.500	
	- Batako	Rp 24.729.600	
	- Seng Gel 3" x 6" (Warna)	Rp 11.057.200	
	- Perabung Seng	Rp 198.900	
	- Paku Biasa 1/2" - 1	Rp 138.500	
	- Plafoun Gypsum	Rp 17.017.000	
	- Plafoun PVC	Rp 10.073.800	
	- Keramik 40x40	Rp 10.166.000	
	- Semen Warna	Rp 3.646.500	
	- Kusen Pintu Utama	Rp 1.767.400	
	- Kusen Pintu WC	Rp 1.767.400	
	- Kusen Jendela Gd. 2	Rp 662.800	
	- Kusen Jendela Gd. 3	Rp 3.755.600	
	- Kusen Ventilasi WC	Rp 662.800	
	- Ventilasi Beton	Rp 1.880.200	
	- Daun Pintu	Rp 1.767.400	
	- Jendela Kaca Bingkai	Rp 5.412.400	
	- Kunci Tanam	Rp 331.400	
	- Engsel Pintu	Rp 132.600	
	- Engsel Jendela	Rp 310.800	
	- Grendel Jendela	Rp 310.800	
	- Handel Jendela	Rp 155.400	
	- Pintu Fiber	Rp 833.800	
	- Engsel Plastik	Rp 66.600	
	- Grendel Plastik	Rp 22.200	
	- Henadel Plastik	Rp 22.200	
	- Kait Angin	Rp 310.800	
	- Plamur Dinding	Rp 1.054.500	
	- Cat Tembok	Rp 2.099.500	

KODE REKENING	URAIAN	ANGGARAN (Rp)	KETERANGAN
1	2	3	4
	- Dempul Kayu	Rp 166.200	
	- Cat Minyak	Rp 1.625.400	
	- Minyak Cat	Rp 11.100	
	- Amplas	Rp 56.000	
	- Pipa Hawa	Rp 110.500	
	- Closet Duduk	Rp 773.200	
	- Bak Air Fiber	Rp 773.200	
	- Tangki Air 500 Liter	Rp 773.200	
	- Pipa PVC Dia. 4 Inc	Rp 1.325.600	
	- Elbow L Dia. 4 Inc	Rp 110.500	
	- Elbow T Dia. 4 Inc	Rp 66.400	
	- Pipa PVC Dia. 3/4 Inc	Rp 88.400	
	- Elbow L Dia. 3/4 Inc	Rp 16.800	
	- Elbow T Dia. 3/4 Inc	Rp 16.800	
	- Keran Air	Rp 44.200	
	- Instalasi Listrik dan Jaringan	Rp 7.763.700	
	- Meja 1/2 Biro	Rp 3.092.800	
	- Kursi Guru	Rp 1.767.600	
	- Lemari	Rp 4.970.700	
	- Meja Murid	Rp 8.286.000	
	- Kursi Murid	Rp 4.971.000	
	- Papan Tulis	Rp 386.600	
	- Ayunan Rantai	Rp 2.761.400	
	- Bola Dunia	Rp 3.866.000	
	- Mangkuk Putar	Rp 3.313.700	
	- Tangga Pelangi	Rp 2.761.400	
	- Luncuran	Rp 4.970.500	
	- Papan Nama Kegiatan	Rp 150.000	
	- Terali Pagar	Rp 8.947.800	
	- Terali Pintu Pagar	Rp 2.485.500	
	- Terali Jendela	Rp 4.473.900	
	- Sumur Bor	Rp 8.318.200	
0 3	BIDANG PEMBINAAN KEMASYARAKATAN	Rp 80.905.000	
0 3 0 1	Pembinaan dan Operasional LPM	Rp 1.000.000	
	Belanja Barang dan Jasa	Rp 1.000.000	
	- Alat Tulis Kantor	Rp 340.000	
	- Biaya Musyawarah	Rp 660.000	
0 4 0 2	Pengembangan Kapasitas Kepala Desa dan Perangkat Desa	Rp 23.000.000	
	Belanja Barang dan Jasa	Rp 23.000.000	
	Akselerasi Kepala Desa dan Sekretaris Desa Keluar Provinsi	Rp 23.000.000	
	- Uang Harian	Rp 5.000.000	
	- Uang Kontribusi Kepala Desa dan Sekdes	Rp 11.325.000	
	- Transportasi Dalam Provinsi	Rp 600.000	
	- Perkiraan Biaya Transportasi Udara	Rp 6.075.000	
	Peningkatan Kapasitas Kepala Desa dan Perangkat		
	- Honor Tim Pelaksana Kegiatan		
	- Honor Instruktur		
	- Alat Tulis Kantor		
	- Fotocopy dan Penggandaan		
	- Benda Pos dan Materai		
	- Bahan Pelatihan		
	- Ruang		
	- Bantuan Transportasi Peserta		
	- Konsumsi dan Akomodasi		

**ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DESA
PULAU BARU
TAHUN ANGGARAN 2018**

KODE REK	URAIAN	ANGGARAN (Rp)	KETERANGAN
1	2	3	4
1.	PENDAPATAN		
1.2.	Pendapatan Transfer	1.232.672.000,00	
1.2.1.	Dana Desa	681.684.000,00	
1.2.2.	Bagi Hasil Pajak dan Retribusi	40.532.000,00	
1.2.3.	Alokasi Dana Desa	410.456.000,00	
1.2.4.	Bantuan Keuangan Provinsi	100.000.000,00	
	JUMLAH PENDAPATAN	1.232.672.000,00	
2.	BELANJA		
2.1	Bidang Penyelenggaraan Pemerintah Desa	401.588.000,00	
2.1.1	Kegiatan Penghasilan Tetap dan Tunjangan Kepala Desa dan	276.120.000,00	
2.1.1.1.	Belanja Pegawai	276.120.000,00	
2.1.1.1.1.	Penghasilan Tetap Kepala Desa dan Perangkat Desa	169.200.000,00	
2.1.1.1.6.	Tunjangan BPD dan Anggotanya	59.040.000,00	
2.1.1.1.10.	Tunjangan Pengelola Aset dan Keuangan Desa	12.600.000,00	
2.1.1.1.12.	Tunjangan Beban Kerja Kepala Desa dan Perangkat Desa	35.280.000,00	
2.1.2	Kegiatan Operasional Perkantoran	72.618.000,00	
2.1.2.2.	Belanja Barang dan Jasa	72.618.000,00	
2.1.2.2.2.	Belanja Alat Tulis Kantor	5.930.000,00	
2.1.2.2.4.	Belanja Benda Pos dan Materai	990.000,00	
2.1.2.2.6.	Belanja Fotocopy, Cetak dan Penggandaan	616.000,00	
2.1.2.2.7.	Belanja Makanan dan Minuman Rapat	3.630.000,00	
2.1.2.2.8.	Belanja Pakaian Dinas dan Atributnya	13.932.000,00	
2.1.2.2.12.	Belanja Perawatan Kendaraan Bermotor	2.320.000,00	
2.1.2.2.14.	Belanja Honorarium Tim Panitia	36.500.000,00	
2.1.2.2.16.	Belanja Perjalanan Dinas	4.250.000,00	
2.1.2.2.17.	Belanja Dekorasi dan Dokumentasi	4.450.000,00	
2.1.3	Kegiatan Operasional BPD	10.000.000,00	
2.1.3.2.	Belanja Barang dan Jasa	10.000.000,00	
2.1.3.2.2.	Belanja Alat Tulis Kantor	2.600.000,00	
2.1.3.2.4.	Belanja Benda Pos dan Materai	750.000,00	
2.1.3.2.6.	Belanja Fotocopy, Cetak dan Penggandaan	550.000,00	
2.1.3.2.7.	Belanja Makanan dan Minuman Rapat	3.300.000,00	
2.1.3.2.16.	Belanja Perjalanan Dinas	2.800.000,00	
2.1.4	Kegiatan Operasional RT/RW	5.400.000,00	

KODE REK	URAIAN	ANGGARAN (Rp)	KI TERANGAN
1	2	3	4
2.1.4.1.	Belanja Pegawai	5.400.000,00	
2.1.4.1.8.	Insentif RT/RW	5.400.000,00	
2.1.5	Kegiatan Penetapan dan Penegasan Batas Desa	8.000.000,00	
2.1.5.2.	Belanja Barang dan Jasa	8.000.000,00	
2.1.5.2.2.	Belanja Alat Tulis Kantor	3.940.000,00	
2.1.5.2.7.	Belanja Makanan dan Minuman Rapat	1.760.000,00	
2.1.5.2.14.	Belanja Honorarium Tim Panitia	2.300.000,00	
2.1.7	Kegiatan Penyusunan Tata Ruang dan Peta Sosial Desa	4.000.000,00	
2.1.7.2.	Belanja Barang dan Jasa	4.000.000,00	
2.1.7.2.2.	Belanja Alat Tulis Kantor	560.000,00	
2.1.7.2.7.	Belanja Makanan dan Minuman Rapat	1.480.000,00	
2.1.7.2.14.	Belanja Honorarium Tim Panitia	1.950.000,00	
2.1.13	Kegiatan Penyusunan Rancangan Peraturan Desa RKPDesa	3.000.000,00	
2.1.13.2.	Belanja Barang dan Jasa	3.000.000,00	
2.1.13.2.2.	Belanja Alat Tulis Kantor	610.000,00	
2.1.13.2.6.	Belanja Fotocopy, Cetak dan Penggandaan	160.000,00	
2.1.13.2.7.	Belanja Makanan dan Minuman Rapat	880.000,00	
2.1.13.2.14.	Belanja Honorarium Tim Panitia	1.350.000,00	
2.1.14	Kegiatan Penyusunan Rancangan Peraturan Desa APBDesa	4.000.000,00	
2.1.14.2.	Belanja Barang dan Jasa	4.000.000,00	
2.1.14.2.2.	Belanja Alat Tulis Kantor	660.000,00	
2.1.14.2.6.	Belanja Fotocopy, Cetak dan Penggandaan	200.000,00	
2.1.14.2.7.	Belanja Makanan dan Minuman Rapat	880.000,00	
2.1.14.2.14.	Belanja Honorarium Tim Panitia	2.250.000,00	
2.1.15	Kegiatan Penyusunan Rancangan Perdes Laporan Realisas	2.500.000,00	
2.1.15.2.	Belanja Barang dan Jasa	2.500.000,00	
2.1.15.2.2.	Belanja Alat Tulis Kantor	200.000,00	
2.1.15.2.6.	Belanja Fotocopy, Cetak dan Penggandaan	90.000,00	
2.1.15.2.7.	Belanja Makanan dan Minuman Rapat	660.000,00	
2.1.15.2.14.	Belanja Honorarium Tim Panitia	1.550.000,00	
2.1.16	Kegiatan Penyusunan LKPDesa / LPPDesa	8.000.000,00	
2.1.16.2.	Belanja Barang dan Jasa	8.000.000,00	
2.1.16.2.2.	Belanja Alat Tulis Kantor	1.830.000,00	
2.1.16.2.6.	Belanja Fotocopy, Cetak dan Penggandaan	240.000,00	
2.1.16.2.7.	Belanja Makanan dan Minuman Rapat	3.630.000,00	
2.1.16.2.14.	Belanja Honorarium Tim Panitia	2.300.000,00	
2.1.19	Kegiatan Evaluasi Tingkat Perkembangan Desa	3.000.000,00	
2.1.19.2.	Belanja Barang dan Jasa	3.000.000,00	
2.1.19.2.2.	Belanja Alat Tulis Kantor	260.000,00	
2.1.19.2.7.	Belanja Makanan dan Minuman Rapat	440.000,00	

KODE REK	URAIAN	ANGGARAN (Rp)	KETERANGAN
1	2	3	4
2.1.19.2.14	Belanja Honorarium Tim Panitia	2.300.000,00	
2.1.21	Kegiatan Pembangunan /Pemeliharaan Sarana dan Prasarana	4.950.000,00	
2.1.21.2.	<i>Belanja Barang dan Jasa</i>	4.950.000,00	
2.1.21.2.10	Belanja Jasa Upah Tenaga Kerja	4.950.100,00	
2.2	Bidang Pelaksanaan Pembangunan Desa	656.684.100,00	
2.2.2	Kegiatan Pembangunan, Pemanfaatan dan Pemeliharaan Jasa	416.086.100,00	
2.2.2.2.	<i>Belanja Barang dan Jasa</i>	12.114.700,00	
2.2.2.2.2.	Belanja Alat Tulis Kantor	225.100,00	
2.2.2.2.4.	Belanja Benda Pos dan Materai	405.000,00	
2.2.2.2.6.	Belanja Fotocopy, Cetak dan Penggandaan	287.700,00	
2.2.2.2.14.	Belanja Honorarium Tim Panitia	11.200.000,00	
2.2.2.3.	<i>Belanja Modal</i>	403.972.200,00	
2.2.2.3.27.	Belanja Modal Pengadaan Jalan Desa	403.972.200,00	
2.2.4	Kegiatan Pembangunan / Pemeliharaan Jembatan Desa (Jem)	240.567.100,00	
2.2.4.2.	<i>Belanja Barang dan Jasa</i>	7.411.000,00	
2.2.4.2.2.	Belanja Alat Tulis Kantor	250.700,00	
2.2.4.2.4.	Belanja Benda Pos dan Materai	345.000,00	
2.2.4.2.6.	Belanja Fotocopy, Cetak dan Penggandaan	420.000,00	
2.2.4.2.14.	Belanja Honorarium Tim Panitia	6.400.000,00	
2.2.4.3.	<i>Belanja Modal</i>	233.182.100,00	
2.2.4.3.28.	Belanja Modal Pengadaan Jembatan Desa	233.182.100,00	
2.3	Bidang Pembinaan Kemasayarakatan	101.900.000,00	
2.3.1	Kegiatan Pembinaan dan Operasional LPM	1.500.000,00	
2.3.1.2.	<i>Belanja Barang dan Jasa</i>	1.500.000,00	
2.3.1.2.9.	Belanja Bahan Praktek dan Pelatihan	1.500.000,00	
2.3.2	Kegiatan Pembinaan dan Operasional PKK	6.500.000,00	
2.3.2.2.	<i>Belanja Barang dan Jasa</i>	6.500.000,00	
2.3.2.2.7.	Belanja Makanan dan Minuman Rapat	550.000,00	
2.3.2.2.9.	Belanja Bahan Praktek dan Pelatihan	3.250.000,00	
2.3.2.2.15.	Belanja Honorarium Instruktur/Pelatih/Narasumber	1.500.000,00	
2.3.2.2.16.	Belanja Perjalanan Dinas	1.200.000,00	
2.3.3	Kegiatan Pembinaan dan Operasional Posyandu	6.000.000,00	
2.3.3.2.	<i>Belanja Barang dan Jasa</i>	6.000.000,00	
2.3.3.2.9.	Belanja Bahan Praktek dan Pelatihan	2.500.000,00	
2.3.3.2.15.	Belanja Honorarium Instruktur/Pelatih/Narasumber	3.000.000,00	
2.3.3.2.16.	Belanja Perjalanan Dinas	500.000,00	
2.3.4	Kegiatan Pembinaan dan Operasional Karang Taruna/Pemu	3.500.000,00	
2.3.4.2.	<i>Belanja Barang dan Jasa</i>	3.500.000,00	
2.3.4.2.9.	Belanja Bahan Praktek dan Pelatihan	3.000.000,00	
2.3.4.2.15.	Belanja Honorarium Instruktur/Pelatih/Narasumber	500.000,00	

KODE REK	URAIAN	ANGGARAN (Rp)	KETERANGAN
1	2	3	4
2.3.5	Kegiatan Pembinaan dan Operasional PAUD/TK/RA Desa	13.010.000,00	
2.3.5.2.	Belanja Barang dan Jasa	13.010.000,00	
2.3.5.2.2.	Belanja Alat Tulis Kantor	800.000,00	
2.3.5.2.6.	Belanja Fotocopy, Cetak dan Penggandaan	200.000,00	
2.3.5.2.15.	Belanja Honorarium Instruktur/Pelatih/Narasumber	10.800.000,00	
2.3.5.2.16.	Belanja Perjalanan Dinas	1.200.000,00	
2.3.6	Kegiatan Pembinaan dan Operasional PDTA/TPA	22.200.000,00	
2.3.6.2.	Belanja Barang dan Jasa	22.200.000,00	
2.3.6.2.2.	Belanja Alat Tulis Kantor	4.030.000,00	
2.3.6.2.6.	Belanja Fotocopy, Cetak dan Penggandaan	770.000,00	
2.3.6.2.15.	Belanja Honorarium Instruktur/Pelatih/Narasumber	16.200.000,00	
2.3.6.2.16.	Belanja Perjalanan Dinas	1.200.000,00	
2.3.7	Kegiatan Pembinaan dan Operasional Masjid	33.600.000,00	
2.3.7.2.	Belanja Barang dan Jasa	33.600.000,00	
2.3.7.2.15.	Belanja Honorarium Instruktur/Pelatih/Narasumber	33.600.000,00	
2.3.9	Kegiatan Pembinaan Ketentraman dan Ketertiban Masyarakat	600.000,00	
2.3.9.2.	Belanja Barang dan Jasa	600.000,00	
2.3.9.2.15.	Belanja Honorarium Instruktur/Pelatih/Narasumber	600.000,00	
2.3.10	Kegiatan Penanggulangan Penyakit Masyarakat	3.600.000,00	
2.3.10.2.	Belanja Barang dan Jasa	3.600.000,00	
2.3.10.2.7.	Belanja Makanan dan Minuman Rapat	2.310.000,00	
2.3.10.2.14.	Belanja Honorarium Tim Panitia	500.000,00	
2.3.10.2.15.	Belanja Honorarium Instruktur/Pelatih/Narasumber	790.000,00	
2.3.15	Kegiatan Pembinaan Olah Raga dan Kepemudaan	6.000.000,00	
2.3.15.2.	Belanja Barang dan Jasa	6.000.000,00	
2.3.15.2.8.	Belanja Pakaian Dinas dan Atributnya	6.000.000,00	
2.3.16	Kegiatan Pembinaan dan Pengembangan Lembaga Adat	5.400.000,00	
2.3.16.2.	Belanja Barang dan Jasa	5.400.000,00	
2.3.16.2.8.	Belanja Pakaian Dinas dan Atributnya	3.000.000,00	
2.3.16.2.15.	Belanja Honorarium Instruktur/Pelatih/Narasumber	2.400.000,00	
2.4	Bidang Pemberdayaan Masyarakat	47.500.000,00	
2.4.2	Kegiatan Pengembangan Kapasitas Kepala Desa dan Peran	23.000.000,00	
2.4.2.2.	Belanja Barang dan Jasa	23.000.000,00	
2.4.2.2.14.	Belanja Honorarium Tim Panitia	2.500.000,00	
2.4.2.2.16.	Belanja Perjalanan Dinas	20.500.000,00	
2.4.3	Kegiatan Pengembangan Kapasitas Badan Permusyawaratan	14.000.000,00	
2.4.3.2.	Belanja Barang dan Jasa	14.000.000,00	
2.4.3.2.16.	Belanja Perjalanan Dinas	14.000.000,00	
2.4.6	Kegiatan Peningkatan Kapasitas Kelompok Perempuan	8.000.000,00	
2.4.6.2.	Belanja Barang dan Jasa	8.000.000,00	
2.4.6.2.16.	Belanja Perjalanan Dinas	8.000.000,00	

KODE REK	URAIAN	ANGGARAN (Rp)	KETERANGAN
1	2	3	4
2.4.13	Peningkatan Kapasitas Kelompok Masyarakat Lainnya	2.500.000,00	
2.4.13.2.	<i>Belanja Barang dan Jasa</i>	2.500.000,00	
2.4.13.2.7.	Belanja Makanan dan Minuman Rapat	550.000,00	
2.4.13.2.9.	Belanja Bahan Praktek dan Pelatihan	1.400.000,00	
2.4.13.2.15	Belanja Honorarium Instruktur/Pelatih/Narasumber	500.000,00	
	JUMLAH BELANJA	1.207.672.000,00	
	SURPLUS / (DEFISIT)	25.000.000,00	
	SISA LEBIH / (KURANG) PERHITUNGAN ANGGARAN	25.000.000,00	



LAMPIRAN 2
Tabulasi Data Sebelum Dan
Sesudah Transpormasi

Lampiran 2: Tabulasi Data Sebelum Dan Sesudah
Transpormasi

TABULASI DATA SEBELUM TRANSPORMASI

Descriptive Statistics

	N	Minimum	Maximum	Mean	Std. Deviation
PADES	4	.0	1000000.0	286542.250	480603.6248
DD	4	260605000	752060000	571185500.00	217374238.192
ADD	4	117673000	411822000	278100250.00	155240060.174
BHPR	4	0	40532000	22211250.00	16788900.170
BELANJA DESA	4	400000000	990393000	702126000.00	244921461.650
Valid N (listwise)	4				

TABULASI DATA SESUDAH TRANSPORMASI

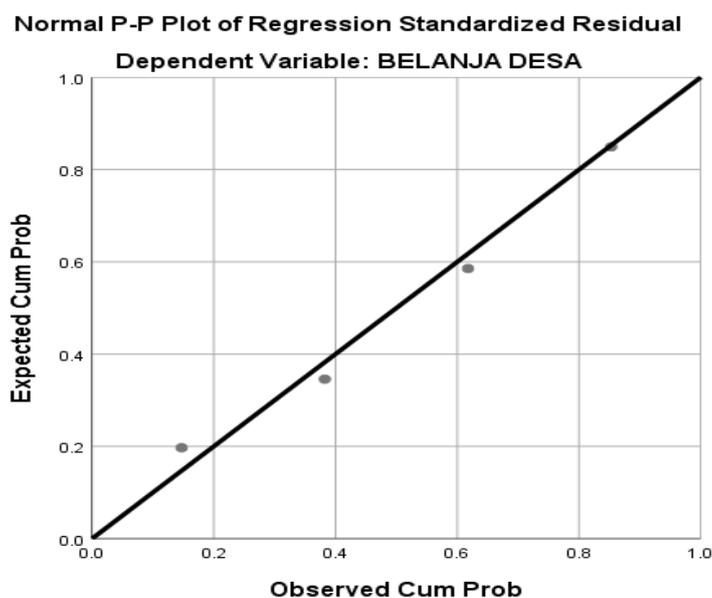
Descriptive Statistics

	N	Minimum	Maximum	Mean	Std. Deviation
PADES	4	6.00	14.82	10.4270	3.78776
DD	4	19.38	20.80	20.2383	.60579
ADD	4	16.97	20.58	19.0545	1.56643
BHPR	4	14.00	17.88	16.6171	1.77572
BELANJADESA	4	19.81	20.71	20.3185	.38101
Valid N (listwise)	4				

LAMPIRAN 3
Tabel Uji Normalitas, Uji
Multikolinearitas, Uji
Autokorelasi, Uji
Heterokedastisitas

Lampiran 3: Uji Normalitas, Uji Multikolinearitas, Uji Autokorelasi,
Uji Heterokedastisitas

UJI NORMALITAS



UJI MULTIKOLINEARITAS

Coefficients^a

Model	Collinearity Statistics	Kesimpulan	
		Tolerance	VIF
1 (Constant)			
1 PADES	.745	1.342	BebasMultikoloneatitas
1 DD	.659	1.516	BebasMultikoloneatitas
1 ADD	.975	1.025	BebasMultikoloneatitas
1 BHPR	.870	1.149	BebasMultikoloneatitas

a. Dependent Variable: BELANJA DESA

UJI AUTOKORELASI

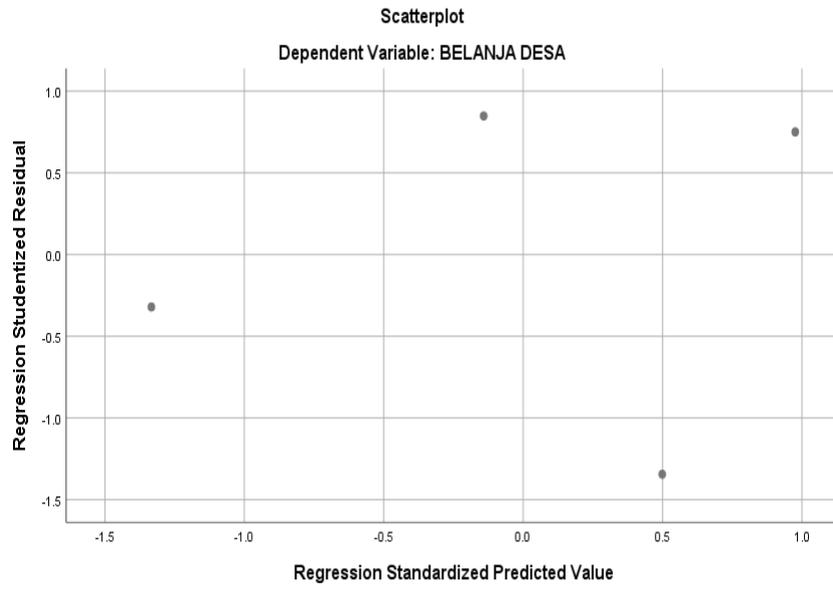
Model Summary^b

Model	R	R Square	Adjusted R Square	Std. Error of the Estimate	Durbin-Watson
1	.973 ^a	.948	.922	.10672	1.826

a. Dependent Variable: BELANJA DESA

b. Predictors: (Constant), PADES, DD, ADD BHPR

UJI HETEROKEDASTISITAS



LAMPIRAN 4
Tabel Uji Regresi Linier
Berganda

Lampiran 4: Tabel Uji Regresi Linier Berganda
UJI REGRESI LINIER BERGANDA

Coefficients^a

Model		Unstandardized Coefficients		Standardized Coefficients	t	Sig.
		B	Std. Error	Beta		
1	(Constant)	19.297	.178		108.532	.000
	PADES	.098	.016	.973	6.020	.027
	DD	.622	.065	.989	9.646	.011
	ADD	.242	.019	.994	12.689	.006
	BHPR	.206	.042	.961	4.896	.039

a. Dependent Variable: BELANJA DESA

LAMPIRAN 5
Uji Signifikansi Parameter
Individual (Uji t), Tabel Uji
Simultan Uji (F), Uji Koefisien
Determinasi (R^2)

Lampiran 5: Uji Signifikansi Parameter Individual (Uji t),
Tabel Uji Simultan
Uji (F), Uji Koefisien Determinasi (R^2)

**Uji t
Coefficients^a**

Model		Unstandardized Coefficients		Standardized Coefficients	T	Sig.
		B	Std. Error	Beta		
1	(Constant)	19.297	.178		108.532	.000
	PADES	.098	.016	.973	6.020	.027
	DD	.622	.065	.989	9.646	.011
	ADD	.242	.019	.994	12.689	.006
	BHPR	.206	.042	.961	4.896	.039

a. Dependent Variable: BELANJA DESA BIDANG PEMBANGUNAN DESA

UJI SIMULTAN (UJI F)

ANOVA^a

Model		Sum of Squares	df	Mean Square	F	Sig.
1	Regression	.426	1	.426	93.039	.000 ^b
	Residual	.009	2	.005		
	Total	.435	3			

a. Dependent Variable: BELANJA DESA

b. Predictors: (Constant), PADES, DD, ADD BHPR

UJI KOEFISIEN DETERMINASI (R^2)

Model Summary^b

Model	R	R Square	Adjusted R Square	Std. Error of the Estimate	Durbin-Watson
1	.973 ^a	.948	.922	.10672	1.826

a. Dependent Variable: BELANJA DESA

b. Predictors: (Constant), PADES, DD, ADD BHPR

LAMPIRAN 6
Tabel t

Titik Persentase Distribusi t (df = 1 - 40)

Pr	0.25	0.10	0.05	0.025	0.01	0.005	0.001
df	0.50	0.20	0.10	0.050	0.02	0.010	0.002
1	1.00000	3.07768	6.31375	12.70620	31.82052	63.65674	318.30884
2	0.81650	1.88562	2.91999	4.30265	6.96456	9.92484	22.32712
3	0.76489	1.63774	2.35336	3.18245	4.54070	5.84091	10.21453
4	0.74070	1.53321	2.13185	2.77645	3.74695	4.60409	7.17318
5	0.72669	1.47588	2.01505	2.57058	3.36493	4.03214	5.89343
6	0.71756	1.43976	1.94318	2.44691	3.14267	3.70743	5.20763
7	0.71114	1.41492	1.89458	2.36462	2.99795	3.49948	4.78529
8	0.70639	1.39682	1.85955	2.30600	2.89646	3.35539	4.50079
9	0.70272	1.38303	1.83311	2.26216	2.82144	3.24984	4.29681
10	0.69981	1.37218	1.81246	2.22814	2.76377	3.16927	4.14370
11	0.69745	1.36343	1.79588	2.20099	2.71808	3.10581	4.02470
12	0.69548	1.35622	1.78229	2.17881	2.68100	3.05454	3.92963
13	0.69383	1.35017	1.77093	2.16037	2.65031	3.01228	3.85198
14	0.69242	1.34503	1.76131	2.14479	2.62449	2.97684	3.78739
15	0.69120	1.34061	1.75305	2.13145	2.60248	2.94671	3.73283
16	0.69013	1.33676	1.74588	2.11991	2.58349	2.92078	3.68615
17	0.68920	1.33338	1.73961	2.10982	2.56693	2.89823	3.64577
18	0.68836	1.33039	1.73406	2.10092	2.55238	2.87844	3.61048
19	0.68762	1.32773	1.72913	2.09302	2.53948	2.86093	3.57940
20	0.68695	1.32534	1.72472	2.08596	2.52798	2.84534	3.55181
21	0.68635	1.32319	1.72074	2.07961	2.51765	2.83136	3.52715
22	0.68581	1.32124	1.71714	2.07387	2.50832	2.81876	3.50499
23	0.68531	1.31946	1.71387	2.06866	2.49987	2.80734	3.48496
24	0.68485	1.31784	1.71088	2.06390	2.49216	2.79694	3.46678
25	0.68443	1.31635	1.70814	2.05954	2.48511	2.78744	3.45019
26	0.68404	1.31497	1.70562	2.05553	2.47863	2.77871	3.43500
27	0.68368	1.31370	1.70329	2.05183	2.47266	2.77068	3.42103
28	0.68335	1.31253	1.70113	2.04841	2.46714	2.76326	3.40816
29	0.68304	1.31143	1.69913	2.04523	2.46202	2.75639	3.39624
30	0.68276	1.31042	1.69726	2.04227	2.45726	2.75000	3.38518
31	0.68249	1.30946	1.69552	2.03951	2.45282	2.74404	3.37490
32	0.68223	1.30857	1.69389	2.03693	2.44868	2.73848	3.36531
33	0.68200	1.30774	1.69236	2.03452	2.44479	2.73328	3.35634
34	0.68177	1.30695	1.69092	2.03224	2.44115	2.72839	3.34793
35	0.68156	1.30621	1.68957	2.03011	2.43772	2.72381	3.34005
36	0.68137	1.30551	1.68830	2.02809	2.43449	2.71948	3.33262
37	0.68118	1.30485	1.68709	2.02619	2.43145	2.71541	3.32563
38	0.68100	1.30423	1.68595	2.02439	2.42857	2.71156	3.31903
39	0.68083	1.30364	1.68488	2.02269	2.42584	2.70791	3.31279
40	0.68067	1.30308	1.68385	2.02108	2.42326	2.70446	3.30688

Titik Persentase Distribusi t (df = 41 - 80)

df	Pr	0.25	0.10	0.05	0.025	0.01	0.005	0.001
		0.50	0.20	0.10	0.050	0.02	0.010	0.002
41		0.68052	1.30254	1.68288	2.01954	2.42080	2.70118	3.30127
42		0.68038	1.30204	1.68195	2.01808	2.41847	2.69807	3.29595
43		0.68024	1.30155	1.68107	2.01669	2.41625	2.69510	3.29089
44		0.68011	1.30109	1.68023	2.01537	2.41413	2.69228	3.28607
45		0.67998	1.30065	1.67943	2.01410	2.41212	2.68959	3.28148
46		0.67986	1.30023	1.67866	2.01290	2.41019	2.68701	3.27710
47		0.67975	1.29982	1.67793	2.01174	2.40835	2.68456	3.27291
48		0.67964	1.29944	1.67722	2.01063	2.40658	2.68220	3.26891
49		0.67953	1.29907	1.67655	2.00958	2.40489	2.67995	3.26508
50		0.67943	1.29871	1.67591	2.00856	2.40327	2.67779	3.26141
51		0.67933	1.29837	1.67528	2.00758	2.40172	2.67572	3.25789
52		0.67924	1.29805	1.67469	2.00665	2.40022	2.67373	3.25451
53		0.67915	1.29773	1.67412	2.00575	2.39879	2.67182	3.25127
54		0.67906	1.29743	1.67356	2.00488	2.39741	2.66998	3.24815
55		0.67898	1.29713	1.67303	2.00404	2.39608	2.66822	3.24515
56		0.67890	1.29685	1.67252	2.00324	2.39480	2.66651	3.24226
57		0.67882	1.29658	1.67203	2.00247	2.39357	2.66487	3.23948
58		0.67874	1.29632	1.67155	2.00172	2.39238	2.66329	3.23680
59		0.67867	1.29607	1.67109	2.00100	2.39123	2.66176	3.23421
60		0.67860	1.29582	1.67065	2.00030	2.39012	2.66028	3.23171
61		0.67853	1.29558	1.67022	1.99962	2.38905	2.65886	3.22930
62		0.67847	1.29536	1.66980	1.99897	2.38801	2.65748	3.22696
63		0.67840	1.29513	1.66940	1.99834	2.38701	2.65615	3.22471
64		0.67834	1.29492	1.66901	1.99773	2.38604	2.65485	3.22253
65		0.67828	1.29471	1.66864	1.99714	2.38510	2.65360	3.22041
66		0.67823	1.29451	1.66827	1.99656	2.38419	2.65239	3.21837
67		0.67817	1.29432	1.66792	1.99601	2.38330	2.65122	3.21639
68		0.67811	1.29413	1.66757	1.99547	2.38245	2.65008	3.21446
69		0.67806	1.29394	1.66724	1.99495	2.38161	2.64898	3.21260
70		0.67801	1.29376	1.66691	1.99444	2.38081	2.64790	3.21079
71		0.67796	1.29359	1.66660	1.99394	2.38002	2.64686	3.20903
72		0.67791	1.29342	1.66629	1.99346	2.37926	2.64585	3.20733
73		0.67787	1.29326	1.66600	1.99300	2.37852	2.64487	3.20567
74		0.67782	1.29310	1.66571	1.99254	2.37780	2.64391	3.20406
75		0.67778	1.29294	1.66543	1.99210	2.37710	2.64298	3.20249
76		0.67773	1.29279	1.66515	1.99167	2.37642	2.64208	3.20096
77		0.67769	1.29264	1.66488	1.99125	2.37576	2.64120	3.19948
78		0.67765	1.29250	1.66462	1.99085	2.37511	2.64034	3.19804
79		0.67761	1.29236	1.66437	1.99045	2.37448	2.63950	3.19663
80		0.67757	1.29222	1.66412	1.99006	2.37387	2.63869	3.19526

Titik Persentase Distribusi t (df = 81 -120)

df	Pr	0.25	0.10	0.05	0.025	0.01	0.005	0.001
		0.50	0.20	0.10	0.050	0.02	0.010	0.002
81		0.67753	1.29209	1.66388	1.98969	2.37327	2.63790	3.19392
82		0.67749	1.29196	1.66365	1.98932	2.37269	2.63712	3.19262
83		0.67746	1.29183	1.66342	1.98896	2.37212	2.63637	3.19135
84		0.67742	1.29171	1.66320	1.98861	2.37156	2.63563	3.19011
85		0.67739	1.29159	1.66298	1.98827	2.37102	2.63491	3.18890
86		0.67735	1.29147	1.66277	1.98793	2.37049	2.63421	3.18772
87		0.67732	1.29136	1.66256	1.98761	2.36998	2.63353	3.18657
88		0.67729	1.29125	1.66235	1.98729	2.36947	2.63286	3.18544
89		0.67726	1.29114	1.66216	1.98698	2.36898	2.63220	3.18434
90		0.67723	1.29103	1.66196	1.98667	2.36850	2.63157	3.18327
91		0.67720	1.29092	1.66177	1.98638	2.36803	2.63094	3.18222
92		0.67717	1.29082	1.66159	1.98609	2.36757	2.63033	3.18119
93		0.67714	1.29072	1.66140	1.98580	2.36712	2.62973	3.18019
94		0.67711	1.29062	1.66123	1.98552	2.36667	2.62915	3.17921
95		0.67708	1.29053	1.66105	1.98525	2.36624	2.62858	3.17825
96		0.67705	1.29043	1.66088	1.98498	2.36582	2.62802	3.17731
97		0.67703	1.29034	1.66071	1.98472	2.36541	2.62747	3.17639
98		0.67700	1.29025	1.66055	1.98447	2.36500	2.62693	3.17549
99		0.67698	1.29016	1.66039	1.98422	2.36461	2.62641	3.17460
100		0.67695	1.29007	1.66023	1.98397	2.36422	2.62589	3.17374
101		0.67693	1.28999	1.66008	1.98373	2.36384	2.62539	3.17289
102		0.67690	1.28991	1.65993	1.98350	2.36346	2.62489	3.17206
103		0.67688	1.28982	1.65978	1.98326	2.36310	2.62441	3.17125
104		0.67686	1.28974	1.65964	1.98304	2.36274	2.62393	3.17045
105		0.67683	1.28967	1.65950	1.98282	2.36239	2.62347	3.16967
106		0.67681	1.28959	1.65936	1.98260	2.36204	2.62301	3.16890
107		0.67679	1.28951	1.65922	1.98238	2.36170	2.62256	3.16815
108		0.67677	1.28944	1.65909	1.98217	2.36137	2.62212	3.16741
109		0.67675	1.28937	1.65895	1.98197	2.36105	2.62169	3.16669
110		0.67673	1.28930	1.65882	1.98177	2.36073	2.62126	3.16598
111		0.67671	1.28922	1.65870	1.98157	2.36041	2.62085	3.16528
112		0.67669	1.28916	1.65857	1.98137	2.36010	2.62044	3.16460
113		0.67667	1.28909	1.65845	1.98118	2.35980	2.62004	3.16392
114		0.67665	1.28902	1.65833	1.98099	2.35950	2.61964	3.16326
115		0.67663	1.28896	1.65821	1.98081	2.35921	2.61926	3.16262
116		0.67661	1.28889	1.65810	1.98063	2.35892	2.61888	3.16198
117		0.67659	1.28883	1.65798	1.98045	2.35864	2.61850	3.16135
118		0.67657	1.28877	1.65787	1.98027	2.35837	2.61814	3.16074
119		0.67656	1.28871	1.65776	1.98010	2.35809	2.61778	3.16013
120		0.67654	1.28865	1.65765	1.97993	2.35782	2.61742	3.15954

Titik Persentase Distribusi t (df = 121 -160)

df	Pr	0.25	0.10	0.05	0.025	0.01	0.005	0.001
		0.50	0.20	0.10	0.050	0.02	0.010	0.002
121		0.67652	1.28859	1.65754	1.97976	2.35756	2.61707	3.15895
122		0.67651	1.28853	1.65744	1.97960	2.35730	2.61673	3.15838
123		0.67649	1.28847	1.65734	1.97944	2.35705	2.61639	3.15781
124		0.67647	1.28842	1.65723	1.97928	2.35680	2.61606	3.15726
125		0.67646	1.28836	1.65714	1.97912	2.35655	2.61573	3.15671
126		0.67644	1.28831	1.65704	1.97897	2.35631	2.61541	3.15617
127		0.67643	1.28825	1.65694	1.97882	2.35607	2.61510	3.15565
128		0.67641	1.28820	1.65685	1.97867	2.35583	2.61478	3.15512
129		0.67640	1.28815	1.65675	1.97852	2.35560	2.61448	3.15461
130		0.67638	1.28810	1.65666	1.97838	2.35537	2.61418	3.15411
131		0.67637	1.28805	1.65657	1.97824	2.35515	2.61388	3.15361
132		0.67635	1.28800	1.65648	1.97810	2.35493	2.61359	3.15312
133		0.67634	1.28795	1.65639	1.97796	2.35471	2.61330	3.15264
134		0.67633	1.28790	1.65630	1.97783	2.35450	2.61302	3.15217
135		0.67631	1.28785	1.65622	1.97769	2.35429	2.61274	3.15170
136		0.67630	1.28781	1.65613	1.97756	2.35408	2.61246	3.15124
137		0.67628	1.28776	1.65605	1.97743	2.35387	2.61219	3.15079
138		0.67627	1.28772	1.65597	1.97730	2.35367	2.61193	3.15034
139		0.67626	1.28767	1.65589	1.97718	2.35347	2.61166	3.14990
140		0.67625	1.28763	1.65581	1.97705	2.35328	2.61140	3.14947
141		0.67623	1.28758	1.65573	1.97693	2.35309	2.61115	3.14904
142		0.67622	1.28754	1.65566	1.97681	2.35289	2.61090	3.14862
143		0.67621	1.28750	1.65558	1.97669	2.35271	2.61065	3.14820
144		0.67620	1.28746	1.65550	1.97658	2.35252	2.61040	3.14779
145		0.67619	1.28742	1.65543	1.97646	2.35234	2.61016	3.14739
146		0.67617	1.28738	1.65536	1.97635	2.35216	2.60992	3.14699
147		0.67616	1.28734	1.65529	1.97623	2.35198	2.60969	3.14660
148		0.67615	1.28730	1.65521	1.97612	2.35181	2.60946	3.14621
149		0.67614	1.28726	1.65514	1.97601	2.35163	2.60923	3.14583
150		0.67613	1.28722	1.65508	1.97591	2.35146	2.60900	3.14545
151		0.67612	1.28718	1.65501	1.97580	2.35130	2.60878	3.14508
152		0.67611	1.28715	1.65494	1.97569	2.35113	2.60856	3.14471
153		0.67610	1.28711	1.65487	1.97559	2.35097	2.60834	3.14435
154		0.67609	1.28707	1.65481	1.97549	2.35081	2.60813	3.14400
155		0.67608	1.28704	1.65474	1.97539	2.35065	2.60792	3.14364
156		0.67607	1.28700	1.65468	1.97529	2.35049	2.60771	3.14330
157		0.67606	1.28697	1.65462	1.97519	2.35033	2.60751	3.14295
158		0.67605	1.28693	1.65455	1.97509	2.35018	2.60730	3.14261
159		0.67604	1.28690	1.65449	1.97500	2.35003	2.60710	3.14228
160		0.67603	1.28687	1.65443	1.97490	2.34988	2.60691	3.14195

Titik Persentase Distribusi t (df = 161 -200)

df \ Pr	0.25	0.10	0.05	0.025	0.01	0.005	0.001
	0.50	0.20	0.10	0.050	0.02	0.010	0.002
161	0.67602	1.28683	1.65437	1.97481	2.34973	2.60671	3.14162
162	0.67601	1.28680	1.65431	1.97472	2.34959	2.60652	3.14130
163	0.67600	1.28677	1.65426	1.97462	2.34944	2.60633	3.14098
164	0.67599	1.28673	1.65420	1.97453	2.34930	2.60614	3.14067
165	0.67598	1.28670	1.65414	1.97445	2.34916	2.60595	3.14036
166	0.67597	1.28667	1.65408	1.97436	2.34902	2.60577	3.14005
167	0.67596	1.28664	1.65403	1.97427	2.34888	2.60559	3.13975
168	0.67595	1.28661	1.65397	1.97419	2.34875	2.60541	3.13945
169	0.67594	1.28658	1.65392	1.97410	2.34862	2.60523	3.13915
170	0.67594	1.28655	1.65387	1.97402	2.34848	2.60506	3.13886
171	0.67593	1.28652	1.65381	1.97393	2.34835	2.60489	3.13857
172	0.67592	1.28649	1.65376	1.97385	2.34822	2.60471	3.13829
173	0.67591	1.28646	1.65371	1.97377	2.34810	2.60455	3.13801
174	0.67590	1.28644	1.65366	1.97369	2.34797	2.60438	3.13773
175	0.67589	1.28641	1.65361	1.97361	2.34784	2.60421	3.13745
176	0.67589	1.28638	1.65356	1.97353	2.34772	2.60405	3.13718
177	0.67588	1.28635	1.65351	1.97346	2.34760	2.60389	3.13691
178	0.67587	1.28633	1.65346	1.97338	2.34748	2.60373	3.13665
179	0.67586	1.28630	1.65341	1.97331	2.34736	2.60357	3.13638
180	0.67586	1.28627	1.65336	1.97323	2.34724	2.60342	3.13612
181	0.67585	1.28625	1.65332	1.97316	2.34713	2.60326	3.13587
182	0.67584	1.28622	1.65327	1.97308	2.34701	2.60311	3.13561
183	0.67583	1.28619	1.65322	1.97301	2.34690	2.60296	3.13536
184	0.67583	1.28617	1.65318	1.97294	2.34678	2.60281	3.13511
185	0.67582	1.28614	1.65313	1.97287	2.34667	2.60267	3.13487
186	0.67581	1.28612	1.65309	1.97280	2.34656	2.60252	3.13463
187	0.67580	1.28610	1.65304	1.97273	2.34645	2.60238	3.13438
188	0.67580	1.28607	1.65300	1.97266	2.34635	2.60223	3.13415
189	0.67579	1.28605	1.65296	1.97260	2.34624	2.60209	3.13391
190	0.67578	1.28602	1.65291	1.97253	2.34613	2.60195	3.13368
191	0.67578	1.28600	1.65287	1.97246	2.34603	2.60181	3.13345
192	0.67577	1.28598	1.65283	1.97240	2.34593	2.60168	3.13322
193	0.67576	1.28595	1.65279	1.97233	2.34582	2.60154	3.13299
194	0.67576	1.28593	1.65275	1.97227	2.34572	2.60141	3.13277
195	0.67575	1.28591	1.65271	1.97220	2.34562	2.60128	3.13255
196	0.67574	1.28589	1.65267	1.97214	2.34552	2.60115	3.13233
197	0.67574	1.28586	1.65263	1.97208	2.34543	2.60102	3.13212
198	0.67573	1.28584	1.65259	1.97202	2.34533	2.60089	3.13190
199	0.67572	1.28582	1.65255	1.97196	2.34523	2.60076	3.13169
200	0.67572	1.28580	1.65251	1.97190	2.34514	2.60063	3.13148

Catatan: Probabilita yang lebih kecil yang ditunjukkan pada judul tiap kolom adalah luas daerah dalam satu ujung, sedangkan probabilitas yang lebih besar adalah luas daerah dalam kedua ujung

LAMPIRAN 7
Tabel F

Titik Persentase Distribusi F untuk Probabilita = 0,05

df untuk penyebut (N2)	df untuk pembilang (N1)														
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
1	161	199	216	225	230	234	237	239	241	242	243	244	245	245	246
2	18.51	19.00	19.16	19.25	19.30	19.33	19.35	19.37	19.38	19.40	19.40	19.41	19.42	19.42	19.43
3	10.13	9.55	9.28	9.12	9.01	8.94	8.89	8.85	8.81	8.79	8.76	8.74	8.73	8.71	8.70
4	7.71	6.94	6.59	6.39	6.26	6.16	6.09	6.04	6.00	5.96	5.94	5.91	5.89	5.87	5.86
5	6.61	5.79	5.41	5.19	5.05	4.95	4.88	4.82	4.77	4.74	4.70	4.68	4.66	4.64	4.62
6	5.99	5.14	4.76	4.53	4.39	4.28	4.21	4.15	4.10	4.06	4.03	4.00	3.98	3.96	3.94
7	5.59	4.74	4.35	4.12	3.97	3.87	3.79	3.73	3.68	3.64	3.60	3.57	3.55	3.53	3.51
8	5.32	4.46	4.07	3.84	3.69	3.58	3.50	3.44	3.39	3.35	3.31	3.28	3.26	3.24	3.22
9	5.12	4.26	3.86	3.63	3.48	3.37	3.29	3.23	3.18	3.14	3.10	3.07	3.05	3.03	3.01
10	4.96	4.10	3.71	3.48	3.33	3.22	3.14	3.07	3.02	2.98	2.94	2.91	2.89	2.86	2.85
11	4.84	3.98	3.59	3.36	3.20	3.09	3.01	2.95	2.90	2.85	2.82	2.79	2.76	2.74	2.72
12	4.75	3.89	3.49	3.26	3.11	3.00	2.91	2.85	2.80	2.75	2.72	2.69	2.66	2.64	2.62
13	4.67	3.81	3.41	3.18	3.03	2.92	2.83	2.77	2.71	2.67	2.63	2.60	2.58	2.55	2.53
14	4.60	3.74	3.34	3.11	2.96	2.85	2.76	2.70	2.65	2.60	2.57	2.53	2.51	2.48	2.46
15	4.54	3.68	3.29	3.06	2.90	2.79	2.71	2.64	2.59	2.54	2.51	2.48	2.45	2.42	2.40
16	4.49	3.63	3.24	3.01	2.85	2.74	2.66	2.59	2.54	2.49	2.46	2.42	2.40	2.37	2.35
17	4.45	3.59	3.20	2.96	2.81	2.70	2.61	2.55	2.49	2.45	2.41	2.38	2.35	2.33	2.31
18	4.41	3.55	3.16	2.93	2.77	2.66	2.58	2.51	2.46	2.41	2.37	2.34	2.31	2.29	2.27
19	4.38	3.52	3.13	2.90	2.74	2.63	2.54	2.48	2.42	2.38	2.34	2.31	2.28	2.26	2.23
20	4.35	3.49	3.10	2.87	2.71	2.60	2.51	2.45	2.39	2.35	2.31	2.28	2.25	2.22	2.20
21	4.32	3.47	3.07	2.84	2.68	2.57	2.49	2.42	2.37	2.32	2.28	2.25	2.22	2.20	2.18
22	4.30	3.44	3.05	2.82	2.66	2.55	2.46	2.40	2.34	2.30	2.26	2.23	2.20	2.17	2.15
23	4.28	3.42	3.03	2.80	2.64	2.53	2.44	2.37	2.32	2.27	2.24	2.20	2.18	2.15	2.13
24	4.26	3.40	3.01	2.78	2.62	2.51	2.42	2.36	2.30	2.25	2.22	2.18	2.15	2.13	2.11
25	4.24	3.39	2.99	2.76	2.60	2.49	2.40	2.34	2.28	2.24	2.20	2.16	2.14	2.11	2.09
26	4.23	3.37	2.98	2.74	2.59	2.47	2.39	2.32	2.27	2.22	2.18	2.15	2.12	2.09	2.07
27	4.21	3.35	2.96	2.73	2.57	2.46	2.37	2.31	2.25	2.20	2.17	2.13	2.10	2.08	2.06
28	4.20	3.34	2.95	2.71	2.56	2.45	2.36	2.29	2.24	2.19	2.15	2.12	2.09	2.06	2.04
29	4.18	3.33	2.93	2.70	2.55	2.43	2.35	2.28	2.22	2.18	2.14	2.10	2.08	2.05	2.03
30	4.17	3.32	2.92	2.69	2.53	2.42	2.33	2.27	2.21	2.16	2.13	2.09	2.06	2.04	2.01
31	4.16	3.30	2.91	2.68	2.52	2.41	2.32	2.25	2.20	2.15	2.11	2.08	2.05	2.03	2.00
32	4.15	3.29	2.90	2.67	2.51	2.40	2.31	2.24	2.19	2.14	2.10	2.07	2.04	2.01	1.99
33	4.14	3.28	2.89	2.66	2.50	2.39	2.30	2.23	2.18	2.13	2.09	2.06	2.03	2.00	1.98
34	4.13	3.28	2.88	2.65	2.49	2.38	2.29	2.23	2.17	2.12	2.08	2.05	2.02	1.99	1.97
35	4.12	3.27	2.87	2.64	2.49	2.37	2.29	2.22	2.16	2.11	2.07	2.04	2.01	1.99	1.96
36	4.11	3.26	2.87	2.63	2.48	2.36	2.28	2.21	2.15	2.11	2.07	2.03	2.00	1.98	1.95
37	4.11	3.25	2.86	2.63	2.47	2.36	2.27	2.20	2.14	2.10	2.06	2.02	2.00	1.97	1.95
38	4.10	3.24	2.85	2.62	2.46	2.35	2.26	2.19	2.14	2.09	2.05	2.02	1.99	1.96	1.94
39	4.09	3.24	2.85	2.61	2.46	2.34	2.26	2.19	2.13	2.08	2.04	2.01	1.98	1.95	1.93
40	4.08	3.23	2.84	2.61	2.45	2.34	2.25	2.18	2.12	2.08	2.04	2.00	1.97	1.95	1.92
41	4.08	3.23	2.83	2.60	2.44	2.33	2.24	2.17	2.12	2.07	2.03	2.00	1.97	1.94	1.92
42	4.07	3.22	2.83	2.59	2.44	2.32	2.24	2.17	2.11	2.06	2.03	1.99	1.96	1.94	1.91
43	4.07	3.21	2.82	2.59	2.43	2.32	2.23	2.16	2.11	2.06	2.02	1.99	1.96	1.93	1.91
44	4.06	3.21	2.82	2.58	2.43	2.31	2.23	2.16	2.10	2.05	2.01	1.98	1.95	1.92	1.90
45	4.06	3.20	2.81	2.58	2.42	2.31	2.22	2.15	2.10	2.05	2.01	1.97	1.94	1.92	1.89

Titik Persentase Distribusi F untuk Probabilita = 0,05

df untuk penyebut (N2)	df untuk pembilang (N1)														
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
46	4.05	3.20	2.81	2.57	2.42	2.30	2.22	2.15	2.09	2.04	2.00	1.97	1.94	1.91	1.89
47	4.05	3.20	2.80	2.57	2.41	2.30	2.21	2.14	2.09	2.04	2.00	1.96	1.93	1.91	1.88
48	4.04	3.19	2.80	2.57	2.41	2.29	2.21	2.14	2.08	2.03	1.99	1.96	1.93	1.90	1.88
49	4.04	3.19	2.79	2.56	2.40	2.29	2.20	2.13	2.08	2.03	1.99	1.96	1.93	1.90	1.88
50	4.03	3.18	2.79	2.56	2.40	2.29	2.20	2.13	2.07	2.03	1.99	1.95	1.92	1.89	1.87
51	4.03	3.18	2.79	2.55	2.40	2.28	2.20	2.13	2.07	2.02	1.98	1.95	1.92	1.89	1.87
52	4.03	3.18	2.78	2.55	2.39	2.28	2.19	2.12	2.07	2.02	1.98	1.94	1.91	1.89	1.86
53	4.02	3.17	2.78	2.55	2.39	2.28	2.19	2.12	2.06	2.01	1.97	1.94	1.91	1.88	1.86
54	4.02	3.17	2.78	2.54	2.39	2.27	2.18	2.12	2.06	2.01	1.97	1.94	1.91	1.88	1.86
55	4.02	3.16	2.77	2.54	2.38	2.27	2.18	2.11	2.06	2.01	1.97	1.93	1.90	1.88	1.85
56	4.01	3.16	2.77	2.54	2.38	2.27	2.18	2.11	2.05	2.00	1.96	1.93	1.90	1.87	1.85
57	4.01	3.16	2.77	2.53	2.38	2.26	2.18	2.11	2.05	2.00	1.96	1.93	1.90	1.87	1.85
58	4.01	3.16	2.76	2.53	2.37	2.26	2.17	2.10	2.05	2.00	1.96	1.92	1.89	1.87	1.84
59	4.00	3.15	2.76	2.53	2.37	2.26	2.17	2.10	2.04	2.00	1.96	1.92	1.89	1.86	1.84
60	4.00	3.15	2.76	2.53	2.37	2.25	2.17	2.10	2.04	1.99	1.95	1.92	1.89	1.86	1.84
61	4.00	3.15	2.76	2.52	2.37	2.25	2.16	2.09	2.04	1.99	1.95	1.91	1.88	1.86	1.83
62	4.00	3.15	2.75	2.52	2.36	2.25	2.16	2.09	2.03	1.99	1.95	1.91	1.88	1.85	1.83
63	3.99	3.14	2.75	2.52	2.36	2.25	2.16	2.09	2.03	1.98	1.94	1.91	1.88	1.85	1.83
64	3.99	3.14	2.75	2.52	2.36	2.24	2.16	2.09	2.03	1.98	1.94	1.91	1.88	1.85	1.83
65	3.99	3.14	2.75	2.51	2.36	2.24	2.15	2.08	2.03	1.98	1.94	1.90	1.87	1.85	1.82
66	3.99	3.14	2.74	2.51	2.35	2.24	2.15	2.08	2.03	1.98	1.94	1.90	1.87	1.84	1.82
67	3.98	3.13	2.74	2.51	2.35	2.24	2.15	2.08	2.02	1.98	1.93	1.90	1.87	1.84	1.82
68	3.98	3.13	2.74	2.51	2.35	2.24	2.15	2.08	2.02	1.97	1.93	1.90	1.87	1.84	1.82
69	3.98	3.13	2.74	2.50	2.35	2.23	2.15	2.08	2.02	1.97	1.93	1.90	1.86	1.84	1.81
70	3.98	3.13	2.74	2.50	2.35	2.23	2.14	2.07	2.02	1.97	1.93	1.89	1.86	1.84	1.81
71	3.98	3.13	2.73	2.50	2.34	2.23	2.14	2.07	2.01	1.97	1.93	1.89	1.86	1.83	1.81
72	3.97	3.12	2.73	2.50	2.34	2.23	2.14	2.07	2.01	1.96	1.92	1.89	1.86	1.83	1.81
73	3.97	3.12	2.73	2.50	2.34	2.23	2.14	2.07	2.01	1.96	1.92	1.89	1.86	1.83	1.81
74	3.97	3.12	2.73	2.50	2.34	2.22	2.14	2.07	2.01	1.96	1.92	1.89	1.85	1.83	1.80
75	3.97	3.12	2.73	2.49	2.34	2.22	2.13	2.06	2.01	1.96	1.92	1.88	1.85	1.83	1.80
76	3.97	3.12	2.72	2.49	2.33	2.22	2.13	2.06	2.01	1.96	1.92	1.88	1.85	1.82	1.80
77	3.97	3.12	2.72	2.49	2.33	2.22	2.13	2.06	2.00	1.96	1.92	1.88	1.85	1.82	1.80
78	3.96	3.11	2.72	2.49	2.33	2.22	2.13	2.06	2.00	1.95	1.91	1.88	1.85	1.82	1.80
79	3.96	3.11	2.72	2.49	2.33	2.22	2.13	2.06	2.00	1.95	1.91	1.88	1.85	1.82	1.79
80	3.96	3.11	2.72	2.49	2.33	2.21	2.13	2.06	2.00	1.95	1.91	1.88	1.84	1.82	1.79
81	3.96	3.11	2.72	2.48	2.33	2.21	2.12	2.05	2.00	1.95	1.91	1.87	1.84	1.82	1.79
82	3.96	3.11	2.72	2.48	2.33	2.21	2.12	2.05	2.00	1.95	1.91	1.87	1.84	1.81	1.79
83	3.96	3.11	2.71	2.48	2.32	2.21	2.12	2.05	1.99	1.95	1.91	1.87	1.84	1.81	1.79
84	3.95	3.11	2.71	2.48	2.32	2.21	2.12	2.05	1.99	1.95	1.90	1.87	1.84	1.81	1.79
85	3.95	3.10	2.71	2.48	2.32	2.21	2.12	2.05	1.99	1.94	1.90	1.87	1.84	1.81	1.79
86	3.95	3.10	2.71	2.48	2.32	2.21	2.12	2.05	1.99	1.94	1.90	1.87	1.84	1.81	1.78
87	3.95	3.10	2.71	2.48	2.32	2.20	2.12	2.05	1.99	1.94	1.90	1.87	1.83	1.81	1.78
88	3.95	3.10	2.71	2.48	2.32	2.20	2.12	2.05	1.99	1.94	1.90	1.86	1.83	1.81	1.78
89	3.95	3.10	2.71	2.47	2.32	2.20	2.11	2.04	1.99	1.94	1.90	1.86	1.83	1.80	1.78
90	3.95	3.10	2.71	2.47	2.32	2.20	2.11	2.04	1.99	1.94	1.90	1.86	1.83	1.80	1.78

Titik Persentase Distribusi F untuk Probabilitas = 0,05

df untuk penyebut (N2)	df untuk pembilang (N1)														
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
91	3.95	3.10	2.70	2.47	2.31	2.20	2.11	2.04	1.98	1.94	1.90	1.86	1.83	1.80	1.78
92	3.94	3.10	2.70	2.47	2.31	2.20	2.11	2.04	1.98	1.94	1.89	1.86	1.83	1.80	1.78
93	3.94	3.09	2.70	2.47	2.31	2.20	2.11	2.04	1.98	1.93	1.89	1.86	1.83	1.80	1.78
94	3.94	3.09	2.70	2.47	2.31	2.20	2.11	2.04	1.98	1.93	1.89	1.86	1.83	1.80	1.77
95	3.94	3.09	2.70	2.47	2.31	2.20	2.11	2.04	1.98	1.93	1.89	1.86	1.82	1.80	1.77
96	3.94	3.09	2.70	2.47	2.31	2.19	2.11	2.04	1.98	1.93	1.89	1.85	1.82	1.80	1.77
97	3.94	3.09	2.70	2.47	2.31	2.19	2.11	2.04	1.98	1.93	1.89	1.85	1.82	1.80	1.77
98	3.94	3.09	2.70	2.46	2.31	2.19	2.10	2.03	1.98	1.93	1.89	1.85	1.82	1.79	1.77
99	3.94	3.09	2.70	2.46	2.31	2.19	2.10	2.03	1.98	1.93	1.89	1.85	1.82	1.79	1.77
100	3.94	3.09	2.70	2.46	2.31	2.19	2.10	2.03	1.97	1.93	1.89	1.85	1.82	1.79	1.77
101	3.94	3.09	2.69	2.46	2.30	2.19	2.10	2.03	1.97	1.93	1.88	1.85	1.82	1.79	1.77
102	3.93	3.09	2.69	2.46	2.30	2.19	2.10	2.03	1.97	1.92	1.88	1.85	1.82	1.79	1.77
103	3.93	3.08	2.69	2.46	2.30	2.19	2.10	2.03	1.97	1.92	1.88	1.85	1.82	1.79	1.76
104	3.93	3.08	2.69	2.46	2.30	2.19	2.10	2.03	1.97	1.92	1.88	1.85	1.82	1.79	1.76
105	3.93	3.08	2.69	2.46	2.30	2.19	2.10	2.03	1.97	1.92	1.88	1.85	1.81	1.79	1.76
106	3.93	3.08	2.69	2.46	2.30	2.19	2.10	2.03	1.97	1.92	1.88	1.84	1.81	1.79	1.76
107	3.93	3.08	2.69	2.46	2.30	2.18	2.10	2.03	1.97	1.92	1.88	1.84	1.81	1.79	1.76
108	3.93	3.08	2.69	2.46	2.30	2.18	2.10	2.03	1.97	1.92	1.88	1.84	1.81	1.78	1.76
109	3.93	3.08	2.69	2.45	2.30	2.18	2.09	2.02	1.97	1.92	1.88	1.84	1.81	1.78	1.76
110	3.93	3.08	2.69	2.45	2.30	2.18	2.09	2.02	1.97	1.92	1.88	1.84	1.81	1.78	1.76
111	3.93	3.08	2.69	2.45	2.30	2.18	2.09	2.02	1.97	1.92	1.88	1.84	1.81	1.78	1.76
112	3.93	3.08	2.69	2.45	2.30	2.18	2.09	2.02	1.96	1.92	1.88	1.84	1.81	1.78	1.76
113	3.93	3.08	2.68	2.45	2.29	2.18	2.09	2.02	1.96	1.92	1.87	1.84	1.81	1.78	1.76
114	3.92	3.08	2.68	2.45	2.29	2.18	2.09	2.02	1.96	1.91	1.87	1.84	1.81	1.78	1.75
115	3.92	3.08	2.68	2.45	2.29	2.18	2.09	2.02	1.96	1.91	1.87	1.84	1.81	1.78	1.75
116	3.92	3.07	2.68	2.45	2.29	2.18	2.09	2.02	1.96	1.91	1.87	1.84	1.81	1.78	1.75
117	3.92	3.07	2.68	2.45	2.29	2.18	2.09	2.02	1.96	1.91	1.87	1.84	1.80	1.78	1.75
118	3.92	3.07	2.68	2.45	2.29	2.18	2.09	2.02	1.96	1.91	1.87	1.84	1.80	1.78	1.75
119	3.92	3.07	2.68	2.45	2.29	2.18	2.09	2.02	1.96	1.91	1.87	1.83	1.80	1.78	1.75
120	3.92	3.07	2.68	2.45	2.29	2.18	2.09	2.02	1.96	1.91	1.87	1.83	1.80	1.78	1.75
121	3.92	3.07	2.68	2.45	2.29	2.17	2.09	2.02	1.96	1.91	1.87	1.83	1.80	1.77	1.75
122	3.92	3.07	2.68	2.45	2.29	2.17	2.09	2.02	1.96	1.91	1.87	1.83	1.80	1.77	1.75
123	3.92	3.07	2.68	2.45	2.29	2.17	2.08	2.01	1.96	1.91	1.87	1.83	1.80	1.77	1.75
124	3.92	3.07	2.68	2.44	2.29	2.17	2.08	2.01	1.96	1.91	1.87	1.83	1.80	1.77	1.75
125	3.92	3.07	2.68	2.44	2.29	2.17	2.08	2.01	1.96	1.91	1.87	1.83	1.80	1.77	1.75
126	3.92	3.07	2.68	2.44	2.29	2.17	2.08	2.01	1.95	1.91	1.87	1.83	1.80	1.77	1.75
127	3.92	3.07	2.68	2.44	2.29	2.17	2.08	2.01	1.95	1.91	1.86	1.83	1.80	1.77	1.75
128	3.92	3.07	2.68	2.44	2.29	2.17	2.08	2.01	1.95	1.91	1.86	1.83	1.80	1.77	1.75
129	3.91	3.07	2.67	2.44	2.28	2.17	2.08	2.01	1.95	1.90	1.86	1.83	1.80	1.77	1.74
130	3.91	3.07	2.67	2.44	2.28	2.17	2.08	2.01	1.95	1.90	1.86	1.83	1.80	1.77	1.74
131	3.91	3.07	2.67	2.44	2.28	2.17	2.08	2.01	1.95	1.90	1.86	1.83	1.80	1.77	1.74
132	3.91	3.06	2.67	2.44	2.28	2.17	2.08	2.01	1.95	1.90	1.86	1.83	1.79	1.77	1.74
133	3.91	3.06	2.67	2.44	2.28	2.17	2.08	2.01	1.95	1.90	1.86	1.83	1.79	1.77	1.74
134	3.91	3.06	2.67	2.44	2.28	2.17	2.08	2.01	1.95	1.90	1.86	1.83	1.79	1.77	1.74
135	3.91	3.06	2.67	2.44	2.28	2.17	2.08	2.01	1.95	1.90	1.86	1.82	1.79	1.77	1.74

Titik Persentase Distribusi F untuk Probabilitas = 0,05

df untuk penyebut (N2)	df untuk pembilang (N1)														
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
136	3.91	3.06	2.67	2.44	2.28	2.17	2.08	2.01	1.95	1.90	1.86	1.82	1.79	1.77	1.74
137	3.91	3.06	2.67	2.44	2.28	2.17	2.08	2.01	1.95	1.90	1.86	1.82	1.79	1.76	1.74
138	3.91	3.06	2.67	2.44	2.28	2.16	2.08	2.01	1.95	1.90	1.86	1.82	1.79	1.76	1.74
139	3.91	3.06	2.67	2.44	2.28	2.16	2.08	2.01	1.95	1.90	1.86	1.82	1.79	1.76	1.74
140	3.91	3.06	2.67	2.44	2.28	2.16	2.08	2.01	1.95	1.90	1.86	1.82	1.79	1.76	1.74
141	3.91	3.06	2.67	2.44	2.28	2.16	2.08	2.00	1.95	1.90	1.86	1.82	1.79	1.76	1.74
142	3.91	3.06	2.67	2.44	2.28	2.16	2.07	2.00	1.95	1.90	1.86	1.82	1.79	1.76	1.74
143	3.91	3.06	2.67	2.43	2.28	2.16	2.07	2.00	1.95	1.90	1.86	1.82	1.79	1.76	1.74
144	3.91	3.06	2.67	2.43	2.28	2.16	2.07	2.00	1.95	1.90	1.86	1.82	1.79	1.76	1.74
145	3.91	3.06	2.67	2.43	2.28	2.16	2.07	2.00	1.94	1.90	1.86	1.82	1.79	1.76	1.74
146	3.91	3.06	2.67	2.43	2.28	2.16	2.07	2.00	1.94	1.90	1.85	1.82	1.79	1.76	1.74
147	3.91	3.06	2.67	2.43	2.28	2.16	2.07	2.00	1.94	1.90	1.85	1.82	1.79	1.76	1.73
148	3.91	3.06	2.67	2.43	2.28	2.16	2.07	2.00	1.94	1.90	1.85	1.82	1.79	1.76	1.73
149	3.90	3.06	2.67	2.43	2.27	2.16	2.07	2.00	1.94	1.89	1.85	1.82	1.79	1.76	1.73
150	3.90	3.06	2.66	2.43	2.27	2.16	2.07	2.00	1.94	1.89	1.85	1.82	1.79	1.76	1.73
151	3.90	3.06	2.66	2.43	2.27	2.16	2.07	2.00	1.94	1.89	1.85	1.82	1.79	1.76	1.73
152	3.90	3.06	2.66	2.43	2.27	2.16	2.07	2.00	1.94	1.89	1.85	1.82	1.79	1.76	1.73
153	3.90	3.06	2.66	2.43	2.27	2.16	2.07	2.00	1.94	1.89	1.85	1.82	1.78	1.76	1.73
154	3.90	3.05	2.66	2.43	2.27	2.16	2.07	2.00	1.94	1.89	1.85	1.82	1.78	1.76	1.73
155	3.90	3.05	2.66	2.43	2.27	2.16	2.07	2.00	1.94	1.89	1.85	1.82	1.78	1.76	1.73
156	3.90	3.05	2.66	2.43	2.27	2.16	2.07	2.00	1.94	1.89	1.85	1.81	1.78	1.76	1.73
157	3.90	3.05	2.66	2.43	2.27	2.16	2.07	2.00	1.94	1.89	1.85	1.81	1.78	1.76	1.73
158	3.90	3.05	2.66	2.43	2.27	2.16	2.07	2.00	1.94	1.89	1.85	1.81	1.78	1.75	1.73
159	3.90	3.05	2.66	2.43	2.27	2.16	2.07	2.00	1.94	1.89	1.85	1.81	1.78	1.75	1.73
160	3.90	3.05	2.66	2.43	2.27	2.16	2.07	2.00	1.94	1.89	1.85	1.81	1.78	1.75	1.73
161	3.90	3.05	2.66	2.43	2.27	2.16	2.07	2.00	1.94	1.89	1.85	1.81	1.78	1.75	1.73
162	3.90	3.05	2.66	2.43	2.27	2.15	2.07	2.00	1.94	1.89	1.85	1.81	1.78	1.75	1.73
163	3.90	3.05	2.66	2.43	2.27	2.15	2.07	2.00	1.94	1.89	1.85	1.81	1.78	1.75	1.73
164	3.90	3.05	2.66	2.43	2.27	2.15	2.07	2.00	1.94	1.89	1.85	1.81	1.78	1.75	1.73
165	3.90	3.05	2.66	2.43	2.27	2.15	2.07	1.99	1.94	1.89	1.85	1.81	1.78	1.75	1.73
166	3.90	3.05	2.66	2.43	2.27	2.15	2.07	1.99	1.94	1.89	1.85	1.81	1.78	1.75	1.73
167	3.90	3.05	2.66	2.43	2.27	2.15	2.06	1.99	1.94	1.89	1.85	1.81	1.78	1.75	1.73
168	3.90	3.05	2.66	2.43	2.27	2.15	2.06	1.99	1.94	1.89	1.85	1.81	1.78	1.75	1.73
169	3.90	3.05	2.66	2.43	2.27	2.15	2.06	1.99	1.94	1.89	1.85	1.81	1.78	1.75	1.73
170	3.90	3.05	2.66	2.42	2.27	2.15	2.06	1.99	1.94	1.89	1.85	1.81	1.78	1.75	1.73
171	3.90	3.05	2.66	2.42	2.27	2.15	2.06	1.99	1.93	1.89	1.85	1.81	1.78	1.75	1.73
172	3.90	3.05	2.66	2.42	2.27	2.15	2.06	1.99	1.93	1.89	1.84	1.81	1.78	1.75	1.72
173	3.90	3.05	2.66	2.42	2.27	2.15	2.06	1.99	1.93	1.89	1.84	1.81	1.78	1.75	1.72
174	3.90	3.05	2.66	2.42	2.27	2.15	2.06	1.99	1.93	1.89	1.84	1.81	1.78	1.75	1.72
175	3.90	3.05	2.66	2.42	2.27	2.15	2.06	1.99	1.93	1.89	1.84	1.81	1.78	1.75	1.72
176	3.89	3.05	2.66	2.42	2.27	2.15	2.06	1.99	1.93	1.88	1.84	1.81	1.78	1.75	1.72
177	3.89	3.05	2.66	2.42	2.27	2.15	2.06	1.99	1.93	1.88	1.84	1.81	1.78	1.75	1.72
178	3.89	3.05	2.66	2.42	2.26	2.15	2.06	1.99	1.93	1.88	1.84	1.81	1.78	1.75	1.72
179	3.89	3.05	2.66	2.42	2.26	2.15	2.06	1.99	1.93	1.88	1.84	1.81	1.78	1.75	1.72
180	3.89	3.05	2.65	2.42	2.26	2.15	2.06	1.99	1.93	1.88	1.84	1.81	1.77	1.75	1.72

Titik Persentase Distribusi F untuk Probabilita = 0,05

df untuk penyebut (N2)	df untuk pembilang (N1)														
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
181	3.89	3.05	2.65	2.42	2.26	2.15	2.06	1.99	1.93	1.88	1.84	1.81	1.77	1.75	1.72
182	3.89	3.05	2.65	2.42	2.26	2.15	2.06	1.99	1.93	1.88	1.84	1.81	1.77	1.75	1.72
183	3.89	3.05	2.65	2.42	2.26	2.15	2.06	1.99	1.93	1.88	1.84	1.81	1.77	1.75	1.72
184	3.89	3.05	2.65	2.42	2.26	2.15	2.06	1.99	1.93	1.88	1.84	1.81	1.77	1.75	1.72
185	3.89	3.04	2.65	2.42	2.26	2.15	2.06	1.99	1.93	1.88	1.84	1.80	1.77	1.75	1.72
186	3.89	3.04	2.65	2.42	2.26	2.15	2.06	1.99	1.93	1.88	1.84	1.80	1.77	1.75	1.72
187	3.89	3.04	2.65	2.42	2.26	2.15	2.06	1.99	1.93	1.88	1.84	1.80	1.77	1.74	1.72
188	3.89	3.04	2.65	2.42	2.26	2.15	2.06	1.99	1.93	1.88	1.84	1.80	1.77	1.74	1.72
189	3.89	3.04	2.65	2.42	2.26	2.15	2.06	1.99	1.93	1.88	1.84	1.80	1.77	1.74	1.72
190	3.89	3.04	2.65	2.42	2.26	2.15	2.06	1.99	1.93	1.88	1.84	1.80	1.77	1.74	1.72
191	3.89	3.04	2.65	2.42	2.26	2.15	2.06	1.99	1.93	1.88	1.84	1.80	1.77	1.74	1.72
192	3.89	3.04	2.65	2.42	2.26	2.15	2.06	1.99	1.93	1.88	1.84	1.80	1.77	1.74	1.72
193	3.89	3.04	2.65	2.42	2.26	2.15	2.06	1.99	1.93	1.88	1.84	1.80	1.77	1.74	1.72
194	3.89	3.04	2.65	2.42	2.26	2.15	2.06	1.99	1.93	1.88	1.84	1.80	1.77	1.74	1.72
195	3.89	3.04	2.65	2.42	2.26	2.15	2.06	1.99	1.93	1.88	1.84	1.80	1.77	1.74	1.72
196	3.89	3.04	2.65	2.42	2.26	2.15	2.06	1.99	1.93	1.88	1.84	1.80	1.77	1.74	1.72
197	3.89	3.04	2.65	2.42	2.26	2.14	2.06	1.99	1.93	1.88	1.84	1.80	1.77	1.74	1.72
198	3.89	3.04	2.65	2.42	2.26	2.14	2.06	1.99	1.93	1.88	1.84	1.80	1.77	1.74	1.72
199	3.89	3.04	2.65	2.42	2.26	2.14	2.06	1.99	1.93	1.88	1.84	1.80	1.77	1.74	1.72
200	3.89	3.04	2.65	2.42	2.26	2.14	2.06	1.98	1.93	1.88	1.84	1.80	1.77	1.74	1.72
201	3.89	3.04	2.65	2.42	2.26	2.14	2.06	1.98	1.93	1.88	1.84	1.80	1.77	1.74	1.72
202	3.89	3.04	2.65	2.42	2.26	2.14	2.06	1.98	1.93	1.88	1.84	1.80	1.77	1.74	1.72
203	3.89	3.04	2.65	2.42	2.26	2.14	2.05	1.98	1.93	1.88	1.84	1.80	1.77	1.74	1.72
204	3.89	3.04	2.65	2.42	2.26	2.14	2.05	1.98	1.93	1.88	1.84	1.80	1.77	1.74	1.72
205	3.89	3.04	2.65	2.42	2.26	2.14	2.05	1.98	1.93	1.88	1.84	1.80	1.77	1.74	1.72
206	3.89	3.04	2.65	2.42	2.26	2.14	2.05	1.98	1.93	1.88	1.84	1.80	1.77	1.74	1.72
207	3.89	3.04	2.65	2.42	2.26	2.14	2.05	1.98	1.93	1.88	1.84	1.80	1.77	1.74	1.71
208	3.89	3.04	2.65	2.42	2.26	2.14	2.05	1.98	1.93	1.88	1.83	1.80	1.77	1.74	1.71
209	3.89	3.04	2.65	2.41	2.26	2.14	2.05	1.98	1.92	1.88	1.83	1.80	1.77	1.74	1.71
210	3.89	3.04	2.65	2.41	2.26	2.14	2.05	1.98	1.92	1.88	1.83	1.80	1.77	1.74	1.71
211	3.89	3.04	2.65	2.41	2.26	2.14	2.05	1.98	1.92	1.88	1.83	1.80	1.77	1.74	1.71
212	3.89	3.04	2.65	2.41	2.26	2.14	2.05	1.98	1.92	1.88	1.83	1.80	1.77	1.74	1.71
213	3.89	3.04	2.65	2.41	2.26	2.14	2.05	1.98	1.92	1.88	1.83	1.80	1.77	1.74	1.71
214	3.89	3.04	2.65	2.41	2.26	2.14	2.05	1.98	1.92	1.88	1.83	1.80	1.77	1.74	1.71
215	3.89	3.04	2.65	2.41	2.26	2.14	2.05	1.98	1.92	1.87	1.83	1.80	1.77	1.74	1.71
216	3.88	3.04	2.65	2.41	2.26	2.14	2.05	1.98	1.92	1.87	1.83	1.80	1.77	1.74	1.71
217	3.88	3.04	2.65	2.41	2.26	2.14	2.05	1.98	1.92	1.87	1.83	1.80	1.77	1.74	1.71
218	3.88	3.04	2.65	2.41	2.26	2.14	2.05	1.98	1.92	1.87	1.83	1.80	1.77	1.74	1.71
219	3.88	3.04	2.65	2.41	2.26	2.14	2.05	1.98	1.92	1.87	1.83	1.80	1.77	1.74	1.71
220	3.88	3.04	2.65	2.41	2.26	2.14	2.05	1.98	1.92	1.87	1.83	1.80	1.76	1.74	1.71
221	3.88	3.04	2.65	2.41	2.25	2.14	2.05	1.98	1.92	1.87	1.83	1.80	1.76	1.74	1.71
222	3.88	3.04	2.65	2.41	2.25	2.14	2.05	1.98	1.92	1.87	1.83	1.80	1.76	1.74	1.71
223	3.88	3.04	2.65	2.41	2.25	2.14	2.05	1.98	1.92	1.87	1.83	1.80	1.76	1.74	1.71
224	3.88	3.04	2.64	2.41	2.25	2.14	2.05	1.98	1.92	1.87	1.83	1.80	1.76	1.74	1.71
225	3.88	3.04	2.64	2.41	2.25	2.14	2.05	1.98	1.92	1.87	1.83	1.80	1.76	1.74	1.71

LAMPIRAN 8
Surat Keterangan Telah
Melakukan Riset



PEMERINTAH KABUPATEN KUANTAN SINGINGI
KECAMATAN KUANTAN HILIR SEBERANG
KEPALA DESA PULAU BARU

Alamat :Jl. Lingkar Selatan Desa Pulau Baru, Kode Pos 29561

REKOMENDASI

Nomor : 108/SK/PLB/IX/2020

Tentang

**PELAKSANAAN KEGIATAN RISET/PRA RISET DAN
MENGUMPULKAN DATA UNTUK BAHAN SKRIPSI**

Kepala Desa Pulau Baru, Kecamatan Kuantan Hilir Seberang, Kabupaten Kuantan Singingi telah membaca surat Rekomendasi dari UNIVERSITAS ISLAM KUANTAN SINGINGI, Nomor : 487/FIS/UNIKS/VII/2020, tanggal 23 Juli 2020.

Dengan ini memberikan Rekomendasi kepada :

Nama : **VIVIN DELMITA**
NIM : 150412083
Jurusan : Akuntansi
Fakultas : Ilmu Sosial
Jenjang : S1
Alamat : Pulau Baru
Judul Penelitian : “Analisis Pengaruh Pendapatan Asli Desa (PADes), Dana Desa (DD), Alokasi Dana Desa (ADD), dan Bagi Hasil Pajak serta Retribusi Terhadap Belanja Desa Bidang Pembangunan Desa pada Desa Pulau Baru, Kecamatan Kuantan Hilir Seberang, Kabupaten Kuantan Singingi Periode 2015-2018.”

Untuk melakukan penelitian di : Desa Pulau Baru Kecamatan Kuantan Hilir Seberang

Dengan ketentuan sebagai berikut :

1. Tidak melakukan kegiatan yang menyimpang dari ketentuan yang telah ditetapkan yang tidak ada hubungannya dengan kegiatan riset/prariset dan pengumpulan data ini.
2. Pelaksanaan kegiatan riset/prariset dan pengumpulan data ini berlangsung selama 3 (tiga) bulan terhitung mulai tanggal rekomendasi ini dibuat.

Demikian rekomendasi ini diberikan agar digunakan sebagaimana mestinya, dan kepada pihak yang terkait diharapkan untuk dapat memberikan kemudahan dan membantu kelancaran riset/prariset ini, dan terima kasih.

Dikeluarkan di :

Pulau Baru

Pada tanggal : 01
September 2020

Kepala Desa Pulau Baru

MARSWANDI

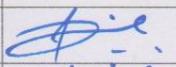
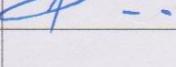
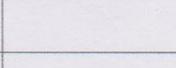
Tembusan :

1. BPD
2. Arsip

LAMPIRAN 9
Kartu Bimbingan

KARTU BIMBINGAN SKRIPSI

NAMA MAHASISWA : VIVIN DELMITA
 NPM : 150412083
 PEMBIMBING I : ZUL AMMAR, SE., ME
 PEMBIMBING II : M. IRWAN, SE., MM
 JUDUL SKRIPSI : ANALISIS PENDAPATAN DESA TERHADAP BELANJA DESA PADA DESA PULAU BARU KECAMATAN KUANTAN HILIR SEBERANG KABUPATEN KUANTAN SINGINGI

NO	TANGGAL/ BULAN/TAHUN	MATERI KONSULTASI	PARAF PEMBIMBING I	PARAF PEMBIMBING II
1	2/3 - 20	- Beli buku penduan. - Formatkan dg formatnya		
2	17/3 - 20	- penulisan - Simbolon judul dg huruf.		
3		- Analisa data - daftar pustaka		
4	15/7 - 20	- LBM - Landasan teori → DP		
5		- Margin dan penulisan - Daftar pustaka.		
6		- Lanjut ps II		
7	17/7 - 20	perbaiki yang dicoret		
8	20/7 - 20	Ace huruf.		
9				
10				

Mengetahui,

Ketua Program Studi Akuntansi



YUL EMRI YULIS, SE., M.Si

KARTU BIMBINGAN SKRIPSI

NAMA MAHASISWA : VIVIN DELMITA
 NPM : 150412083
 PEMBIMBING I : ZUL AMMAR, SE., ME
 PEMBIMBING II : M. IRWAN, SE., MM
 JUDUL SKRIPSI : ANALISIS PENDAPATAN ASLI DESA (PADes), DANA DESA (DD), ALOKASI DANA DESA (ADD), DAN BAGI HASIL PAJAK DAN RETRIBUSI (BHPR) TERHADAP BELANJA DESA BIDANG PEMBANGUNAN DESA PADA DESA PULAU BARU KECAMATAN KUANTAN HILIR SEBERANG KABUPATEN KUANTAN SINGINGI.

NO	TANGGAL/ BULAN/TAHUN	MATERI KONSULTASI	PARAF PEMBIMBING I	PARAF PEMBIMBING II
1	17/8-2020	- Lembar kerja rencana - Operasional kelayakan		
2		- Konsultasi & pembahasannya		
3	21/9-2020	- Lampiran tabel E & F - Uji asumsi klasik simpul		
4		- Pembahasan - Lembar kerja lampiran		
5	27/9-2020	- Alokasi kompone - Lampiran tabel II		
6	29/9-2020	Selesai		
7				

Mengetahui,

Ketua Program Studi
Akuntansi

YUL EMRI YULIS, SE., M.Si

LAMPIRAN 10
Biodata

BIODATA

I. Data Pribadi

Nama : **Vivin Delmita**
Tempat/Tanggal Lahir : Keresek, 04 April 1997
Kebangsaan : Indonesia
Jenis Kelamin : Perempuan
Agama : Islam
Alamat Lengkap : Pulau Baru, Kuantan Hilir Seberang
No. Telp/Wa : 082382287463
Alamat *E-mail* : Amrinakhs@gmail.com



II. Riwayat Pendidikan

1. Tahun 2009 Lulus SD Negeri 007 Kampung Baru
2. Tahun 2012 Lulus MTs Pondok Pesantren Nurul Islam
3. Tahun 2015 Lulus MA Pondok Pesantren Syafa'aturrasul
4. Tahun 2020 Lulus S1 Akuntansi Universitas Islam Kuantan Singingi

III. Riwayat Prestasi

1. Prestasi Akademik
2. Prestasi Non Akademik

Demikian Biodata ini dibuat dengan Sebenar-benarnya.

Teluk Kuantan, 14 Oktober 2020

Vivin Delmita
150412083

